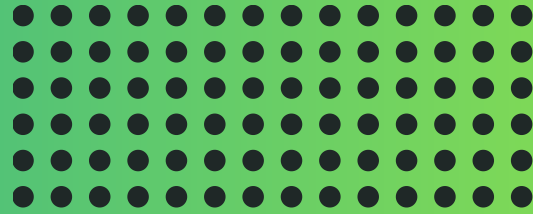




# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN SIDOARJO



# 2025



Disusun Oleh :  
Bagian Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo



BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 29 Maret 2026

Nomor : 100.1.7/3982/438.1.1.1/2026  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Surat Pengantar LPPD dan RLPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun  
Anggaran 2025

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri  
Cq. Ibu Gubernur Jawa Timur  
di  
**SURABAYA**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 2026 Nomor : 100.2.7/989/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025, maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Bupati Sidoarjo,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Subandi  
Bupati Sidoarjo

Subandi

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, Jawa Timur 61211  
Telepon (031) 8921946, 8941145, Faksimile (031) 8946924,  
Laman [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id), Pos-el**bupati@sidoarjokab.go.id**



KABUPATEN SIDOARJO

## KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,***

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan dengan baik untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah yang menyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan koreksi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya suatu pemerintahan daerah. Di samping itu, laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Pasal 71, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD bertujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai sarana laporan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka laporan ini minimal menyajikan 2 (tiga) substansi pokok capaian kinerja yang disajikan, antara lain :

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari :
  - a. capaian kinerja makro;
  - b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome (hasil);
  - c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan.

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, Jawa Timur 61211  
Telepon (031) 8921946, 8941145, Faksimile (031) 8946924,  
Laman [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id), Pos-elbupati@sidoarjokab.go.id

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 2026 Nomor : 100.2.7/989/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Sidoarjo di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi mewujudkan Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri dan Berlanjutan. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

Sidoarjo, 29 Maret 2026

Bupati Sidoarjo,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Subandi  
Bupati Sidoarjo

Subandi

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, Jawa Timur 61211  
Telepon (031) 8921946, 8941145, Faksimile (031) 8946924,  
Laman [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id), Pos-elbupati@sidoarjokab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1 Latar Belakang	1
1.1. Penjelasan Umum	1
a Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b Data Geografis Wilayah	2
c Jumlah Penduduk	7
d Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	9
e Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	11
f Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	22
a Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	22
b Visi dan Misi Kepala Daerah	25
c Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	33
d Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	34
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	35
a Dasar Pertimbangan Penerapan SPM	35
b Dasar Penerapan SPM	37
c Kebijakan Umum	38
d Kebijakan Penerapan SPM	40
A. Bidang Urusan Pendidikan	40
B. Bidang Urusan Kesehatan	41
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	42
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	43
E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44
F. Bidang Urusan Sosial	45
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	47
2.1 Capaian Kinerja Makro	47
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	56
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci	56
1 Urusan Pendidikan	56
2 Urusan Kesehatan	56
3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57

4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	59
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	60
6	Urusan Sosial	61
7	Urusan Tenaga kerja	61
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62
9	Urusan Pangan	62
10	Urusan Pertanahan	62
11	Urusan Lingkungan Hidup	63
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	63
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64
14	Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	64
15	Urusan Perhubungan	64
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	65
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	66
18	Urusan Penanaman Modal	66
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	67
20	Urusan Statistik	67
21	Urusan Persandian	67
22	Urusan Kebudayaan	67
23	Urusan Perpustakaan	68
24	Urusan Kearsipan	69
25	Urusan Kelautan dan Perikanan	69
26	Urusan Pariwisata	69
27	Urusan Pertanian	70
28	Urusan Perdagangan	70
29	Urusan Perindustrian	71
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	72
1	Urusan Perencanaan	72
2	Urusan Keuangan	72
3	Urusan Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	73
4	Urusan Penelitian dan Pengembangan	73
5	Urusan Fungsi Pengawasan	73
6	Urusan Pengadaan	74
7	Urusan Hubungan dengan Perwakilan Daerah	74
8	Urusan Pelayanan Publik	75
2.2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	75
a	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	75
b	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	76
c	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	79

d	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	80
e	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	82
f	Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	102
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>		<b>133</b>
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>		<b>134</b>
4.1.	Urusan Pendidikan	134
	4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	134
	4.1.2. Target Pencapaian	134
	4.1.3. Realisasi	135
	4.1.4. Alokasi Anggaran	138
	4.1.5. Dukungan Personil	140
	4.1.6. Permasalahan dan Solusi	140
4.2.	Urusan Kesehatan	141
	4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	142
	4.2.2. Target Pencapaian	142
	4.2.3. Realisasi	143
	4.2.4. Alokasi Anggaran	147
	4.2.5. Dukungan Personil	148
	4.2.6. Permasalahan dan Solusi	148
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum	149
	4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	149
	4.3.2. Target Pencapaian	149
	4.3.3. Realisasi	149
	4.3.4. Alokasi Anggaran	151
	4.3.5. Dukungan Personil	152
	4.3.6. Permasalahan dan Solusi	153
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat	153
	4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	153
	4.4.2. Target Pencapaian	154
	4.4.3. Realisasi	154
	4.4.4. Alokasi Anggaran	155
	4.4.5. Dukungan Personil	156
	4.4.6. Permasalahan dan Solusi	156
4.5.	Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	157
	4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	157
	4.5.2. Target Pencapaian	158
	4.5.3. Realisasi	159
	4.5.4. Alokasi Anggaran	163
	4.5.5. Dukungan Personil	165

4.5.6. Permasalahan dan Solusi	165
4.6. Urusan Sosial	167
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	167
4.6.2. Target Pencapaian	167
4.6.3. Realisasi	168
4.6.4. Alokasi Anggaran	170
4.6.5. Dukungan Personil	171
4.6.6. Permasalahan dan Solusi	171
4.7. Program dan Kegiatan	171
<b>BAB V PENUTUP</b>	179
<b>DAFTAR TABEL</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xii
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	xiii

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

##### **1.1 Penjelasan Umum**

###### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 disusun berdasarkan pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 - 2029;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2023 tentang perubahan rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

#### **b. Data Geografis Wilayah**

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki letak strategis baik secara astronomis maupun geografis. Secara astronomis, Kabupaten Sidoarjo terletak pada posisi 7,3° - 7,5° Lintang Selatan dan 112,5° - 112,9° Bujur Timur. Letak ini menempatkan Kabupaten Sidoarjo berada di kawasan beriklim tropis, yang ditandai dengan suhu udara yang relatif hangat sepanjang tahun serta adanya dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas penduduk,

khususnya dalam bidang pertanian, perikanan, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Sementara itu, secara geografis Kabupaten Sidoarjo memiliki batas wilayah yang jelas dan saling terhubung dengan daerah-daerah sekitarnya. Di sebelah utara, Kabupaten Sidoarjo berbatasan langsung dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, yang menjadikannya sebagai daerah penyangga penting bagi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Jawa Timur. Di sebelah selatan, Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, yang membuka jalur keterhubungan antarwilayah dalam bidang perdagangan dan transportasi. Pada bagian timur, wilayah Sidoarjo berbatasan dengan Selat Madura, sehingga beberapa kawasan pesisirnya memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Adapun di sebelah barat, Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, yang turut memperkuat hubungan sosial, budaya, dan ekonomi antarwilayah.

Dengan letak astronomis dan geografis tersebut, Kabupaten Sidoarjo memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan wilayah sekitarnya. Posisi yang strategis ini menjadikan Sidoarjo sebagai salah satu daerah yang terus berkembang, baik dari segi pembangunan, mobilitas penduduk, maupun aktivitas ekonomi dan sosial masyarakatnya.

Kabupaten Sidoarjo sendiri memiliki luas wilayah sebesar 719,34 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 18 Kecamatan, 318 Desa dan 28 Kelurahan. Kecamatan terluas yakni Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,53% terhadap luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Dikuti oleh kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,01% terhadap luas wilayah kabupaten.

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota Delta” dikarenakan wilayahnya yang berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Surabaya di sebelah utara dan Kali Porong di sebelah selatan.

**Tabel 1.1**

**Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2025**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Tarik	Mergosari	39,73
2	Prambon	Prambon	29,89
3	Krembung	Mojoaruntut	27,90
4	Porong	Juwetkenongo	30,71
5	Jabon	Dukuhsari	82,92
6	Tanggulangin	Kalitengah	29,78
7	Candi	Gelam	42,86
8	Tulangan	Kenongo	31,31
9	Wonoayu	Wonoayu	30,29
10	Sukodono	Anggaswangi	32,85
11	Sidoarjo	Sidokumpul	62,03
12	Buduran	Banjarkemantren	43,65
13	Sedati	Pulungan	79,23
14	Waru	Janti	30,59
15	Gedangan	Keboansikep	24,01
16	Taman	Bebekan	31,36

17	Krian	Kraton	25,89
18	Balombangendo	Wonokupang	44,34
<b>JUMLAH</b>			<b>719,34</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2026

Secara administrasi Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 318 desa dan 28 kelurahan. Sementara itu desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*). Pada tahun 2023 dilakukan penggabungan untuk desa dan kelurahan yang terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa Dalam Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagai berikut :

1. Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Gedang digabung menjadi Kelurahan Gedang;
2. Kelurahan Mindi dan Kelurahan Porong digabung menjadi Kelurahan Porong;
3. Desa Renokenongo digabung dengan Desa Glagaharum menjadi Desa Glagaharum Kecamatan Porong;
4. Desa Besuki digabung dengan Desa Dukuhsari menjadi Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon;
5. Desa Pejarakan digabung dengan Desa Kedungcangkring menjadi Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon;
6. Desa Kedungbendo digabung dengan Desa Ketapang menjadi Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin.

**Tabel 1.2**

**Desa dan Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo**

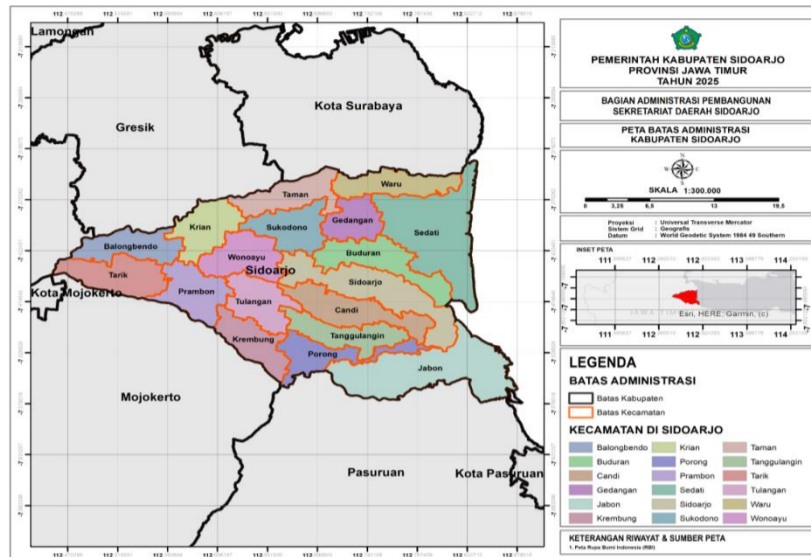
**Tahun 2025**

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
1	Tarik	20	-
2	Prambon	20	-
3	Krembung	19	-
4	Porong	12	3
5	Jabon	13	-
6	Tanggulangin	19	-
7	Candi	24	-
8	Tulangan	22	-
9	Wonoayu	23	-
10	Sukodono	19	-
11	Sidoarjo	9	14
12	Buduran	15	-
13	Sedati	16	-
14	Waru	17	-
15	Gedangan	15	-
16	Taman	16	8
17	Krian	19	3

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
18	Balombangendo	20	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>318</b>	<b>28</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2026

**Gambar 1.1**  
**Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo**



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2025

Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada pada ketinggian 0-25 mdpm dan terdiri atas tiga kelas yakni:

- ❖ 0-3 meter, daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau, yang berada disebelah timur
- ❖ 3-10. daerah bagian tengah yang berair tawar
- ❖ 10-25, daerah bagian barat

Sepanjang Tahun 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 36,4 °C, terjadi di bulan Oktober dengan kelembaban rata-rata 68,0 %. Sementara suhu terendah terjadi di bulan Maret, sebesar 21,2°C dengan kelembaban rata rata sebesar 79,0 %.

Sementara itu, BMKG juga mencatat selama Januari-Desember 2025 jumlah hari hujan di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 149 hari hujan dengan jumlah terbanyak pada bulan Januari dengan jumlah 22 hari hujan.

Curah hujan dan jumlah hari hujan sepanjang 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Curah hujan tertinggi terjadi di Bulan November, sebesar 535,0 mm/tahun dengan hari hujan sebanyak 21 hari.

**Tabel 1.3**  
**Suhu dan Kelembaban per Bulan di Tahun 2025**

Bulan Month	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	22,6	27,6	34,0	38,0	83,0	97,0
Februari/February	22,4	27,7	34,2	55,0	80,0	95,0
Maret/March	21,2	27,4	34,9	45,0	79,0	95,0
April/April	23,1	28,3	34,8	44,0	78,0	98,0
Mei/May	24,0	28,4	34,8	56,0	81,0	97,0
Juni/June	23,7	28,3	34,2	48,0	75,0	94,0
Juli/July	21,5	27,3	33,1	41,0	71,0	92,0
Agustus/August	24,3	27,8	33,0	70,0	70,0	91,0
September/September	22,3	29,2	34,9	40,0	67,0	89,0
Oktober/October	24,3	29,9	36,4	34,0	68,0	93,0
November/November	21,5	28,2	34,4	56,0	81,0	98,0
Desember/December	23,9	28,6	34,5	34,0	78,0	98,0

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2026

**Tabel 1.4**  
**Kecepatan Angin dan Tekanan Udara per Bulan di Tahun 2025**

Bulan Month	Kecepatan Angin (knot) Wind Velocity (knot)			Tekanan Udara/Atmospheric Pressure (mbar)		
	Kecepatan Rata-rata Average Velocity	Arah Rata- rata Average Direction	Kecepatan Maksimum Maximum Velocity	Minimum Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari/January	8,8	W	18	1005,6	1008,6	1011,2
Februari/February	10,0	W	17	1005,5	1009,5	1013,1
Maret/March	7,3	W	15	1004,5	1009,0	1011,4
April/April	6,0	E	12	1006,8	1010,0	1012,0
Mei/May	6,2	E	13	1007,1	1009,5	1012,0
Juni/June	7,6	E	12	1008,7	1010,9	1012,8
Juli/July	8,1	E	14	1007,4	1010,6	1012,8
Agustus/August	8,8	E	13	1008,2	1011,3	1012,9
September/September	9,96	E	15	1008,2	1011,4	1012,8
Oktober/October	7,7	E	12	1006,7	1010,7	1013,5
November/November	6,7	W	14	1007,4	1009,9	1012,6
Desember/December	6,9	W	14	1005,6	1008,6	1012,6

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2026

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari**  
**per Bulan di Tahun 2025**

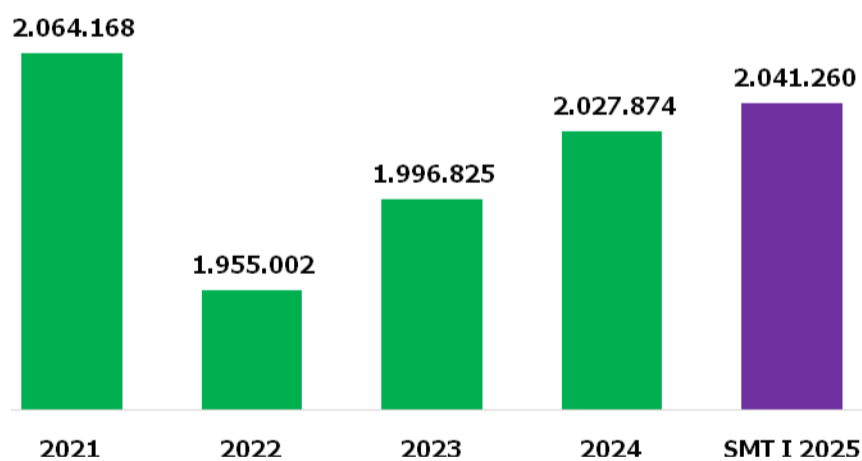
Bulan Month	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun) Number of Precipitation (mm/year)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari (jam) Duration of Sunshine (hour)
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/January	449,0	22	41,0
Februari/February	379,0	18	51,0
Maret/March	354,0	21	53,0
April/April	392,0	12	65,0
Mei/May	516,0	19	63,0
Juni/June	73,0	4	75,0
Juli/July	14,0	3	90,0
Agustus/August	36,0	4	93,0
September/September	3,0	1	91,0
Oktober/October	51,0	7	72,0
November/November	535,0	21	41,0
Desember/December	321,0	17	55,0

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2026

### c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, berdasarkan laporan perkembangan penduduk di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Semester I Tahun 2025, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.041.260 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan.

**Grafik 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo**



Sumber Data : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Juli Tahun 2025

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia tahun 2025 berdasarkan data BPS Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2026 terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

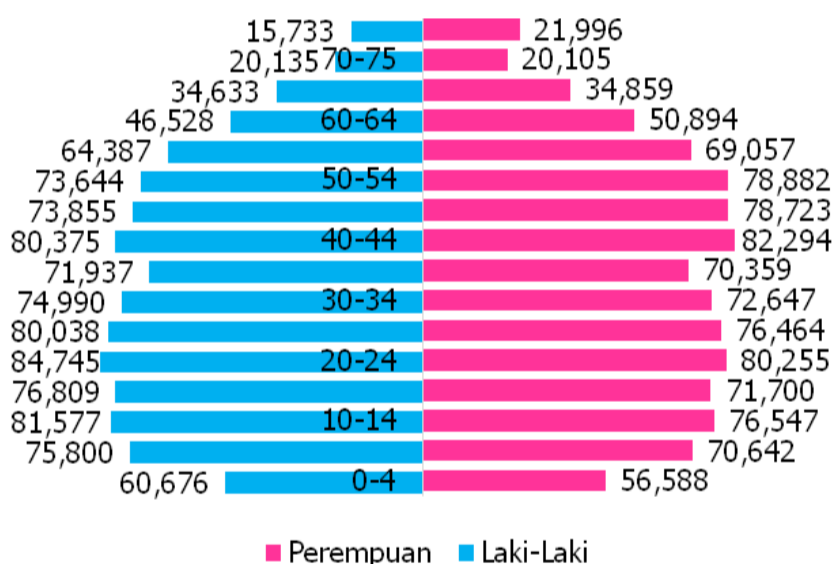
**Tabel 1.6**  
**Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2025**

Struktur	Laki-Laki	Perempuan	Total
0-4	60.676	56.588	117.264
5-9	75.800	70.642	146.442
10-14	81.577	76.547	158.124
15-19	76.809	71.700	148.509
20-24	84.745	80.255	165.000
25-29	80.038	76.464	156.502
30-34	74.990	72.647	147.637
35-39	71.937	70.359	142.296
40-44	80.375	82.294	162.669
45-49	73.855	78.723	152.578
50-54	73.644	78.882	152.526
55-59	64.387	69.057	133.444
60-64	46.528	50.894	97.422
65-69	34.633	34.859	69.492
70-75	20.135	20.105	40.240
75+	15.733	21.996	37.729
<b>JUMLAH</b>	<b>1.015.862</b>	<b>1.012.012</b>	<b>2.027.874</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2026

**Grafik 1.2**

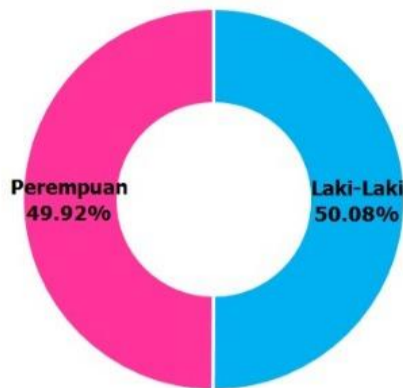
**Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo Semester I Tahun 2025**



Ket: blok kuning adalah kelompok usia produktif (15-65 tahun)

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2026

**Grafik 1.3**  
**Proporsi Penduduk Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin**  
**Semester I Tahun 2025**



*Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2026*

#### d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 318 Desa dan 28 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*). Pada Tahun 2023 dilakukan penggabungan untuk Desa dan Kelurahan yang terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo, dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa Dalam Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Gedang digabung menjadi Kelurahan Gedang;
- 2) Kelurahan Mindi dan Kelurahan Porong digabung menjadi Kelurahan Porong.
- 3) Desa Renokenongo digabung dengan Desa Glagaharum menjadi Desa Glagaharum Kecamatan Porong
- 4) Desa Besuki digabung dengan Desa Dukuhsari menjadi Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon
- 5) Desa Pejarakan digabung dengan Desa Kedungcangkring menjadi Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon
- 6) Desa Kedungbendo digabung dengan Desa Ketapang menjadi Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin.

**Tabel 1.7**  
**Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No	Kecamatan / Desa / Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	TARIK	34.401	33.845	68.246
2	PRAMBON	40.517	39.552	80.069

3	KREMBUNG	34.783	34.690	69.473
4	PORONG	35.681	35.145	70.826
5	JABON	28.187	27.895	56.082
6	TANGGULANGIN	44.460	44.367	88.827
7	CANDI	79.526	79.564	159.090
8	TULANGAN	51.968	51.646	103.614
9	WONOAYU	43.475	42.653	86.128
10	SUKODONO	63.787	63.035	126.822
11	SIDOARJO	99.721	101.520	201.241
12	BUDURAN	51.048	51.164	102.212
13	SEDATI	49.413	49.167	98.580
14	WARU	97.154	99.202	196.356
15	GEDANGAN	60.414	60.354	120.768
16	TAMAN	102.208	102.036	204.244
17	KRIAN	67.608	66.318	133.926
18	BALONGBENDO	37.901	36.855	74.756
<b>JUMLAH</b>		<b>1.022.252</b>	<b>1.019.008</b>	<b>2.041.260</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2026

**Tabel 1.8**

**Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2025**

Kecamatan District	2021 <sup>2</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>4</sup>	2024 <sup>5</sup>	2025 <sup>4</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanj	20	20	20	20	20
Prambon	20	20	20	20	20
Krembung	19	19	19	19	19
Porong	16	16	15	15	15
Jabon	14	14	13	13	13
Tanggulangin	18	18	18	18	18
Candi	24	24	24	24	24
Tulangan	22	22	22	22	22
Wonoayu	23	23	23	23	23
Sukodono	19	19	19	19	19
Sidoarjo	24	24	24	24	24
Buduran	15	15	15	15	15
Sedati	16	16	16	16	16
Waru	17	17	17	17	17
Gedangan	15	15	15	15	15
Taman	24	24	24	24	24
Krian	22	22	22	22	22
Balongbendo	20	20	20	20	20
<b>Kabupaten Sidoarjo</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2026

**Gambar 1.2**  
**Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo**



Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 13.320 orang yang terdiri dari sebagai berikut:

**Tabel 1.9**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025**

No.	PERANGKAT DAERAH	STRUKTURAL	FUNGSIONAL		PELAKSANA		TOTAL		TOTAL ASN
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
1	Sekretariat Daerah	15	36	14	73	9	124	23	147
2	Sekretariat DPRD	6	9	3	38	4	53	7	60
3	Inspektorat Daerah	7	52	1	16	0	75	1	76
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	16	3372	3675	315	2	3703	3677	7.380
5	Dinas Kesehatan	32	1081	473	156	20	1269	493	1.762
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	8	11	15	55	23	74	38	112
7	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang	8	9	8	23	7	40	15	55
8	Satuan Polisi Pamong Praja	10	52	0	14	32	76	32	108
9	Dinas Sosial	5	4	0	9	5	18	5	23
10	Dinas Tenaga Kerja	6	15	1	9	3	30	4	34
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6	4	0	12	3	22	3	25
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	6	2	4	10	1	18	5	23
13	Dinas Pangan Dan Pertanian	7	44	47	36	7	87	54	141
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	9	12	3	187	9	208	12	220

No.	PERANGKAT DAERAH	STRUKTURAL	FUNGSIONAL		PELAKSANA		TOTAL		TOTAL ASN
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6	11	7	19	3	36	10	46
16	Dinas Perhubungan	17	14	0	41	20	72	20	92
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4	12	12	32	0	48	12	60
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	6	2	1	20	0	28	1	29
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	6	1	13	19	24	20	44
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	6	3	0	33	4	42	4	46
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	12	0	11	13	29	13	42
22	Dinas Perikanan	6	5	0	18	2	29	2	31
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8	10	1	106	10	124	11	135
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	14	2	24	2	44	4	48
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6	6	3	48	0	60	3	63
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	5	7	0	66	1	78	0	78
27	Badan Kepegawaian Daerah	7	19	1	37	1	63	2	65
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4	1	0	11	2	16	2	18
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	41	51	5	57	46	103
30	Rsud R.T. Notopuro Sidoarjo	24	414	735	87	0	525	735	1.260
31	Kecamatan Sidoarjo	48	1	8	32	23	81	31	112
32	Kecamatan Candi	6	1	0	10	1	17	1	18
33	Kecamatan Buduran	8	1	1	10	1	19	2	21
34	Kecamatan Gedangan	7	1	0	8	1	16	1	17
35	Kecamatan Sedati	8	1	0	10	1	19	1	20
36	Kecamatan Waru	6	1	1	12	2	19	3	22
37	Kecamatan Taman	33	1	3	23	16	57	19	76
38	Kecamatan Sukodono	8	0	1	10	1	18	2	20
39	Kecamatan Wonoayu	5	1	0	12	1	18	1	19
40	Kecamatan Krian	19	1	0	17	8	37	8	45
41	Kecamatan Balongbendo	7	1	0	15	1	23	1	24
42	Kecamatan Tarik	5	1	0	15	1	21	1	22
43	Kecamatan Tulangan	8	1	0	10	1	19	1	20
44	Kecamatan Prambon	5	1	1	16	1	22	2	24
45	Kecamatan Krembung	3	1	0	10	1	14	1	15
46	Kecamatan Tanggulangin	8	1	0	12	1	21	1	22
47	Kecamatan Jabon	7	0	0	9	1	16	1	17
48	Kecamatan Porong	18	0	0	15	8	33	8	41
49	Rsud Sidoarjo Barat	12	133	171	23	0	168	171	339
<b>TOTAL</b>		<b>422</b>	<b>798</b>	<b>42</b>	<b>817</b>	<b>183</b>	<b>7710</b>	<b>5510</b>	<b>13.220</b>

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Data Per 31 Desember Tahun 2025

#### f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Otonomi daerah yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut semua daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Pagu pendapatan daerah dapat ditingkatkan melalui upaya optimalisasi dan penggalan

potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta melalui peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, struktur pendapatan Pemerintah Kabupaten secara umum mengalami penguatan dengan bertumpu pada beberapa sumber penerimaan utama. Sumber-sumber tersebut meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana Perimbangan; (3) Dana Alokasi Umum (DAU); (4) Dana Alokasi Khusus (DAK); dan (5) Dana Bagi Hasil Pajak serta bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi.

Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru.
- c. Optimalisasi penarikan pendapatan pajak dan retribusi dilakukan melalui pemanfaatan *information and communication technologi* (ICT).
- d. Proyeksi atas perhitungan pendapatan daerah harus berdasarkan pada pemetaan potensi dan kajian akademik
- e. Penyelesaian pajak dan retribusi terutang dioptimalkan melalui penagihan secara terus menerus dan disertai kajian mengenai cleansing data

Sebagai langkah strategis untuk mencapai target pendapatan daerah yang lebih optimal, diperlukan penetapan kebijakan yang secara khusus diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah. Kebijakan ini menitikberatkan pada upaya penguatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui peningkatan kinerja penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, namun tetap memperhatikan prinsip keadilan tanpa menambah beban masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber utama penerimaan daerah menjadi tolak ukur kekuatan fiskal serta tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan, sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.10

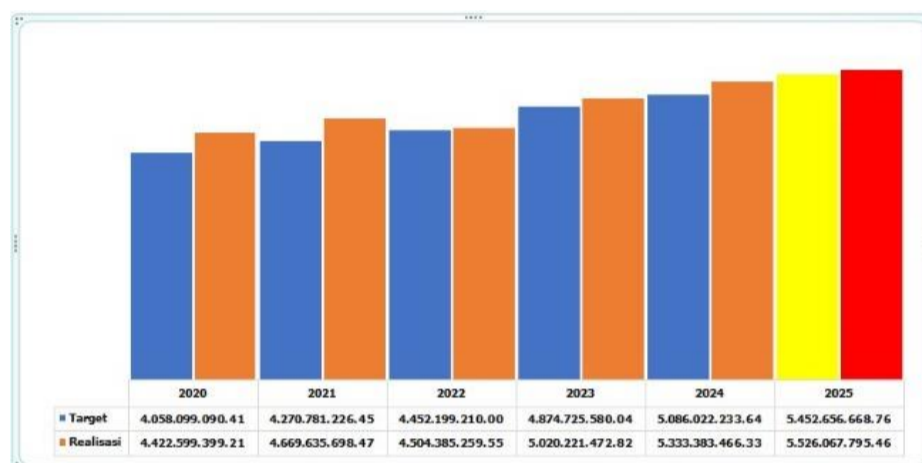
## Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020-2025

Tahun	Target Pendapatan (Rp.)	Realisasi Pendapatan (Rp.)	%
2020	Rp. 4.058.099.090.414,00	Rp. 4.422.599.399.218,15	108,98%
2021	Rp. 4.270.781.226.451,00	Rp. 4.669.635.698.473,41	109,34%
2022	Rp. 4.452.199.210.000,00	Rp. 4.504.385.259.558,71	101,17%
2023	Rp. 4.874.725.580.048,00	Rp. 5.020.221.472.820,07	102,98%
2024	Rp. 5.086.022.233.649,00	Rp. 5.333.383.466.334,81	104,86%
2025	Rp. 5.452.656.668.769,00	Rp. 5.526.067.795.469,54	101,35%

Sumber: Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2020 s.d 2024 Audited, sedangkan untuk Tahun 2025 Unaudited per tanggal 31 Januari 2025

Grafik 1.4

## Target dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020-2025



Sumber: Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2020 s.d 2024 Audited sedangkan untuk Tahun 2025 Unaudited per tanggal 31 Desember 2025

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.526.067.795.469,54 atau mencapai 101,35% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.452.656.668.769,00.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 secara umum tercapai dengan penjelasan masing-masing komponen pendapatan daerah sebagai berikut:

Tabel 1.11

## Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	Rp. 2.691.396.942.109,00	Rp. 2.786.895.912.278,54	103,55%
Pendapatan Transfer	Rp. 2.761.259.726.660,00	Rp. 2.739.171.883.191,00	99,20%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>Rp. 5.452.656.668.769,00</b>	<b>Rp. 5.526.067.795.469,54</b>	<b>101,35%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

### f.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.786.895.912.278,54 atau tercapai sebesar 103,55% dari seluruh target PAD sebesar Rp. 2.691.396.942.109,00.

**Tabel 1.12**

#### Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pajak Daerah	Rp. 1.696.451.167.743,00	Rp. 1.750.894.046.285,18	103,21%
Retribusi Daerah	Rp. 899.169.421.000,00	Rp. 919.213.105.670,27	102,23%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	Rp. 47.821.663.259,00	Rp. 47.730.122.053,50	99,81%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	Rp. 47.954.690.107,00	Rp. 69.058.638.269,59	144,01%
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp. 2.691.396.942.109,00</b>	<b>Rp. 2.786.895.912.278,54</b>	<b>103,55%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

### f.2 Pajak Daerah

Pajak daerah Tahun Anggaran 2025 realisasinya tercapai sebesar Rp.1.750,894.046.285,18 atau 103,21% dari seluruh target Rp.1.696.451.167.743,00 penerimaan pajak daerah. Dengan capaian tersebut, maka mencerminkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi pajak yang ada.

**Tabel 1.13**

#### Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025

JENIS/OBJEK PAJAK	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pajak Reklame	Rp. 20.100.000.000,00	Rp. 23.347.491.952,00	116,16%
Pajak Air Tanah	Rp. 6.300.000.000,00	Rp. 7.337.007.536,00	116,46%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp. 290.000.000.000,00	Rp. 303.909.394.144,00	104,80%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 425.000.000.000,00	Rp. 423.895.898.344,50	99,74%
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Rp. 563.900.000.000,00	Rp. 589.369.495.678,00	104,52%
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp. 266.176.607.313,00	Rp. 282.525.833.404,75	106,14%
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp. 124.974.560.430,00	Rp. 120.508.925.225,93	96,43%
<b>Total Pajak Daerah</b>	<b>Rp. 1.696.451.167.743,00</b>	<b>Rp. 1.750.894.046.285,18</b>	<b>103,21%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

### f.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp.919.213.105.670,27 atau 102,23% dari seluruh target retribusi daerah yang ditetapkan. Berikut ini rincian realisasi retribusi.

Tabel 1.14

#### Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025

JENIS / OBYEK RETRIBUSI	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Retribusi Jasa Umum	Rp. 851.688.695.000,00	Rp. 859.034.688.595,91	100,86%
Retribusi Jasa Usaha	Rp. 11.402.334.000,00	Rp. 11.411.395.170,36	100,08%
Retribusi Perizinan Tertentu	Rp. 36.078.392.000,00	Rp. 48.767.021.904,00	135,17%
<b>Total Retribusi Daerah</b>	<b>Rp. 899.169.421.000,00</b>	<b>Rp. 919.213.105.670,27</b>	<b>102,23%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

### f.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 47.821.663.259,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.730.122.053,50 atau tercapai sebesar 99,81%.

Tabel 1.15

#### Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025

JENIS / OBYEK	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	Rp. 47.821.663.259,00	Rp. 47.730.122.053,50	99,81%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

### f.4 Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 69.058.638.269,59 atau tercapai 144,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 47.954.690.107,00.

Tabel 1.16

#### Target dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025

JENIS/OBYEK	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	Rp. 4.000.000,00	Rp. 1.264.010.069,00	31.600,25%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Rp. 9.317.271.603,00	Rp. 10.027.493.477,00	107,62%
Jasa Giro	Rp. 3.305.531.683,00	Rp. 3.316.293.683,86	100,33%
Pendapatan Bunga	Rp. 13.794.215.117,00	Rp. 19.915.766.280,92	144,38%

JENIS/OBYEK	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Rp. 2.124.955.698,00	Rp. 3.330.847.354,45	156,75%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	Rp. 80.525.045,00	Rp. 8.310.134.447,96	10.319,94%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp. 69.477.148,00	Rp. 943.614.083,40	1.358,16%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	Rp. 2.208.693.722,00	Rp. 4.570.139.780,00	206,92%
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Rp. 0,00	Rp. 991.511,00	0,00%
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00%
Pendapatan dari Pengembalian	Rp. 16.248.640.556,00	Rp. 16.577.217.582,00	102,02%
Pendapatan BLUD	Rp. 0,00	Rp.0,00	0,00%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Rp. 3.449.535,00	Rp. 4.000.000,00	115,96%
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Rp. 797.930.000,00	Rp. 798.130.000,00	100,03%
<b>Jumlah Penerimaan Lain-Lain PAD</b>	<b>Rp. 47.954.690.107,00</b>	<b>Rp. 69.058.638.269,59</b>	<b>144,01%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

#### f.5 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp.2.739.171.883.191,00 atau 99,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.761.259.726.660,00. Rincian target dan realisasi pendapatan transfer sebagai berikut:

**Tabel 1.17**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025**

JENIS / OBYEK	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>Rp. 2.515.939.170.260,00</b>	<b>Rp. 2.465.790.036.041,00</b>	<b>98,01%</b>
Dana Perimbangan	Rp. 4.145.584.000,00	Rp. 5.414.602.000,00	130,61%
Dana Desa	Rp. 340.770.181.000,00	Rp. 307.367.596.442,00	90,20%
Insentif Fiskal	Rp. 14.428.969.000,00	Rp. 14.428.969.000,00	100,00%
DBH	Rp. 217.175.557.000,00	Rp. 209.289.086.700,00	96,37%
DAU	Rp. 1.317.451.887.000,00	Rp. 1.311.742.341.100,00	99,57%
DAK	Rp. 621.966.992.260,00	Rp. 617.547.440.799,00	99,29%
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>Rp. 245.320.556.400,00</b>	<b>Rp. 273.381.847.150,00</b>	<b>111,44%</b>
Pendapatan Bagi Hasil	Rp. 234.071.479.400,00	Rp. 262.332.020.150,00	112,07%
Bantuan Keuangan	Rp. 11.249.077.000,00	Rp.11.049.827.000,00	98,23%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>Rp. 2.761.259.726.660,00</b>	<b>Rp.2.739.171.883.191,00</b>	<b>99,20%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

## f.6 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk mampu mengelola belanja secara efisien dan efektif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam rangka menjawab tuntutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mengoptimalkan alokasi belanja, serta menyusun perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan ini, pengelolaan anggaran tidak hanya berfokus pada besarnya dana yang digunakan, tetapi juga pada pencapaian hasil yang sebanding dengan input yang direncanakan. Selain itu, anggaran berbasis kinerja juga menekankan penilaian terhadap prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara terukur dan berorientasi pada hasil.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Pada jenis belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan multi-years dan atau model pembayaran dengan turn-keys, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian misi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana berikut:

1. Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, antara lain belanja pegawai dan *overheadcost* di setiap Perangkat Daerah Secara Proporsional;
2. Belanja Daerah difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar dan 1 (tujuh belas) program prioritas yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026;
3. Kebijakan selektif dalam pembangunan infrastruktur yang akan diprioritaskan pada pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;

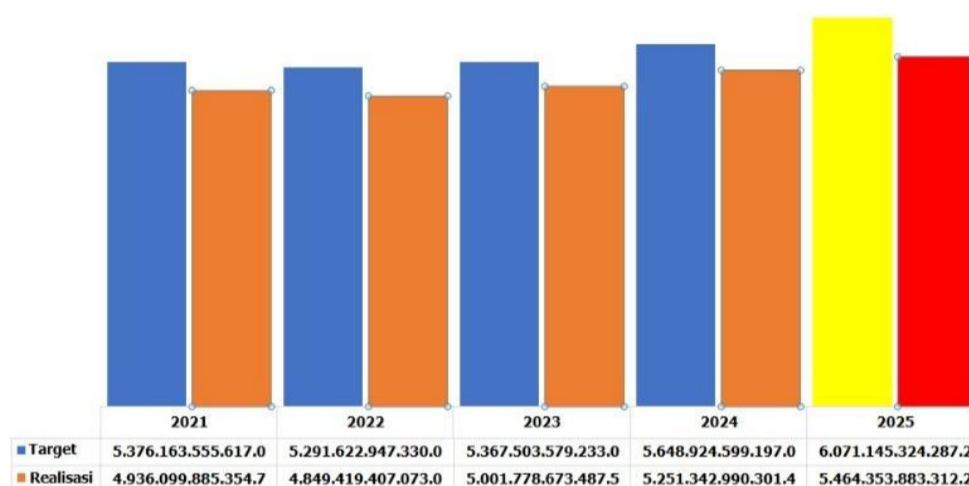
4. Kebijakan matching program lintas Perangkat Daerah maupun dengan pihak swasta

**Tabel 1.18**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun Anggaran 2021-2025**

Tahun	Target Belanja	Realisasi Belanja	%
2021	Rp. 5.376.163.555.617,00	Rp. 4.936.099.885.354,76	91,81%
2022	Rp. 5.291.622.947.330,00	Rp. 4.849.419.407.073,06	91,64%
2023	Rp. 5.367.503.579.233,00	Rp. 5.001.778.673.487,58	93,19%
2024	Rp. 5.648.924.599.197,00	Rp. 5.251.342.990.301,47	92,96%
2025	Rp 6.071.145.324.287,20	Rp5.464.353.883.312,25	90,01%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

**Grafik 1.5**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran**  
**2021-2025**



Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

Target belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.6.071.145.324.287,20 dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 5.464.353.883.312,25 atau tercapai sebesar 90,01% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.19**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran**  
**2025**

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Operasi	Rp.4.380.444.407.659,20	Rp.4.039.796.915.419,43	92,22%
Belanja Modal	Rp.906.290.705.142,00	Rp.683.337.397.730,82	75,40%
Belanja Tidak Terduga	Rp.19.977.358.000,00	Rp.10.254.834.782,00	51,33%
Belanja Transfer	Rp.764.432.853.486,00	Rp.730.964.735.380,00	95,62%
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>Rp.6.071.145.324.287,20</b>	<b>Rp.5.464.353.883.312,25</b>	<b>90,01%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

#### f.6.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp.4.039.796.915.419,43 atau 92,22% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.4.380.444.407.659,20.

Rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.20**

#### Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	Rp. 1.914.484.607.621,20	Rp. 1.786.341.122.963,05	93,31%
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.073.392.534.605,00	Rp. 1.883.020.460.459,29	90,82%
Belanja Bunga	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 2.580.053.896,65	86,00%
Belanja Subsidi	Rp. 5.040.000.000,00	Rp. 2.955.285.939,00	58,64%
Belanja Hibah	Rp. 277.433.120.433,00	Rp. 273.391.805.661,44	98,54%
Belanja Bantuan Sosial	Rp.107.094.145.000,00	Rp. 91.508.186.500,00	85,45%
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp. 4.380.444.407.659,20</b>	<b>Rp. 4.039.796.915.419,43</b>	<b>92,22%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

#### f.6.2 Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 terealisasi Rp.683.337.397.730,82 atau 75,40% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.906.290.705.142,00.

Rincian realisasi belanja modal sebagai berikut:

**Tabel 1.21**

#### Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	Rp. 52.043.827.186,00	Rp. 23.250.256.678,00	44,67%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 223.496.322.012,00	Rp. 206.772.187.050,00	92,52%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 357.334.751.113,00	Rp. 252.754.816.360,50	70,73%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 272.050.633.991,00	Rp. 199.730.563.281,32	73,42%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 599.320.840,00	Rp. 584.702.457,00	97,56%
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 765.850.000,00	Rp 244.871.904,00	31,97%
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>Rp. 906.290.705.142,00</b>	<b>Rp. 683.337.397.730,82</b>	<b>75,40%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

### f.6.3 Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp.10.254.834.782,00 atau 51,33% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.977.358.000,00.

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp.730.963.735.380,00 atau 95,62% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.764.432.853.486,00.

Rincian realisasi belanja tidak terduga dan belanja transfer yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.22**

#### Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>			
Belanja Tidak Terduga	Rp. 19.977.358.000,00	Rp. 10.254.834.782,00	51,33%
<b>BELANJA TRANSFER</b>			
Belanja Bagi Hasil	Rp. 195.803.206.786,00	Rp. 195.802.206.786,00	100,00%
Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 568.629.646.700,00	Rp. 535.161.528.594,00	94,11%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

### f.7 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran yakni penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah.

Struktur Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.23**

#### Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025

PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	Rp. 618.488.655.518,20	Rp. 618.940.644.143,08	100,07%
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	Rp. 642.775.655.518,20	Rp. 643.226.702.161,36	100,07%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 642.775.655.518,20	Rp. 642.775.655.518,20	100,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. 0,00	Rp. 451.046.643,16	0,00%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 642.775.655.518,20</b>	<b>Rp. 643.226.702.161,36</b>	<b>100,07%</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang	Rp. 24.287.000.000,00	Rp. 24.286.058.018,28	100,00%
	Rp. 0,00	Rp 0,00	0,00%

PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
yang Jatuh Tempo			
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 24.287.000.000,00	Rp. 24.286.058.018,28	100,00%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 24.287.000.000,00</b>	<b>Rp. 24.286.058.018,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp. 618.488.655.518,20</b>	<b>Rp. 618.940.644.143,08</b>	<b>100,07%</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>Rp. 680.654.556.300,37</b>	<b>95,63%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

## 1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Jawa Timur. Isu Strategis merupakan acuan yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD. Isu Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
  - a) Mewujudkan good governance melalui pengelolaan pemerintahan yang Tangkas, Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
  - b) Penguatan komitmen ASN, penyederhanaan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis *Information and Communication Technology* (ICT).
  - c) Pengembangan kualitas ASN secara merit system serta berkelanjutan.
  - d) Pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
  - e) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan investasi.
  - f) Meningkatkan kualitas tatakelola dan kemandirian Desa.
2. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Ekonomi, Pengembangan Investasi, Perluasan Lapangan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan.
  - a) Menciptakan kebijakan perekonomian yang kondusif bagi percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, utama sektor informal dan usaha mikro,
  - b) Memperluas Lapangan Kerja melalui kemitraan dengan swasta dan penciptaan wirausaha.
  - c) Penguatan Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan

- kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- d) Mengembangkan nilai tambah (value added) komoditas unggulan lokal yang halal dan mampu berdaya saing serta berkelanjutan.
  - e) Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk halal lokal berbasis on line yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
  - f) Mendorong kemudahan investasi baru, berkembangnya ekonomi digital melalui start up bisnis dan industry kreatif.
  - g) Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
  - h) Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi tumbuh kembangnya ekonomi lokal dan Usaha Mikro.
  - i) Pengembangan pertanian berbasis teknologi dan penguatan sistim ketahanan pangan daerah.
3. Pemantapan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Berkarakter. Pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka Panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Berbagai variable yang dapat mengilustrasikan isu ini bagi kabupaten Sidoarjo antara lain;
- a. Mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan Pendidikan yang memiliki daya saing regional dan memiliki karakter budi pekerti yang baik.
  - b. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting.
  - c. Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik di seluruh wilayah.
  - d. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata.
  - e. Pengelolaan potensi dan peningkatan peran pemuda yang mampu berperan dalam semua sektor pembangunan.
  - f. Cakupan layanan jaminan Pendidikan dan Kesehatan, kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.
  - g. Prioritas implementasi pencapaian target SDGs pada indicator 1 sampai dengan nomor 9 dan dan nomor 11, yaitu menyangkut, kemiskinan, sanitasi lingkungan dan tatakota.
  - h. Meningkatkan kestaraan dan kehidupan yang inklusif bagi disabilitas dan seluruh elemen masyarakat.

4. Penataan Kota, Implementasi Sistem Transportasi Terpadu dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
  - a. Penyediaan sarana prasarana umum antara lain; RTH, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, dan ruang publik lainnya.
  - b. Pengembangan transportasi massal bagi orang dan barang yang dapat mengatasi kemacetan.
  - c. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
  - d. Pengembangan sistem sanitasi perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan 100% sanitasi,
  - e. Sistem pengelolaan persampahan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang efektif dan efisien serta berkelanjutan.
  - f. Pengembangan eco-energi untuk sarana prasarana publik.
5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar, Pengembangan Wilayah Berbasis Keterkaitan antar Daerah yang Mendukung Percepatan Sektor Strategis.
  - a. Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa,
  - b. Optimalisasi kebijakan penataan ruang wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Sidoarjo guna menguatkan konektivitas pembangunan antar wilayah,
  - c. Integrasi pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung pemantapan Sektor Utama yaitu Perdagangan dan Industri,
  - d. Integrasi pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung percepatan Sektor Strategis, yaitu pariwisata, pertanian modern, perikanan dan jasa.
  - e. Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
  - f. Percepatan pengembangan jaringan irigasi teknis pendukung sector pertanian dan perikanan.
6. Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat dan Harmoni Sosial yang berbasis Kesetaraan, Keamanan dan Ketentraman.
  - a. Peningkatan kapasitas dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
  - b. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain command center, jaringan pemadam kebakaran, pos tanggap darurat dll.
  - c. Penanganan terhadap dampak bencana geologi lumpur Sidoarjo, antara lain penurunan tanah, banjir dan dampak lain yang ditimbulkan.

- d. Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, perlindungan terhadap kaum disabilitas, anti diskriminasi SARA, gotong-royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
- e. Mengarusutamakan kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
- f. Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban

## **b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan arah yang jelas agar hasilnya efektif, efisien, dan mampu meningkatkan daya saing. Dengan memperhatikan potensi daerah, sekaligus tantangan dan ancaman di masa depan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama masyarakat telah merumuskan visi, misi, serta strategi sebagai pedoman pencapaian tujuan pembangunan. Rumusan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026, sebagai berikut :

### **1. Visi**

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo di masa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah :

**”TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU,  
BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN”**

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.24**  
**Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<b><i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”</i></b>	<b><i>Sidoarjo Sejahtera</i></b>	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ( <i>growth</i> ) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan ( <i>equality</i> ). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	<b><i>Sidoarjo Maju</i></b>	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumber daya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di

		segala bidang.
	<b>Sidoarjo Berkarakter</b>	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai ( <i>value</i> ) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	<b>Pembangunan Berkelanjutan</b>	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan ( <i>sustainable development</i> ). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Keempat pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

## 2. Misi

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1.25**

**Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
------	------------------	------------

<b>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”</b>	<b>Sidoarjo Sejahtera</b>	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasad Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	<b>Sidoarjo Maju</b>	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha
	<b>Sidoarjo Berkarakter</b>	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.  Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	<b>Pembangunan Berkelanjutan</b>	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada tabel di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut :

**Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.**

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor

penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat .

**Misi 2: *Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.***

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

**Misi 3: *Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.***

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolitan Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagikelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo

**Misi 4: *Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.***

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*humanresources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait

dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasarnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

**Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.**

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertibtentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan cara untuk mencapainya melalui Tujuan dan Sasaran. Tujuan adalah kinerja jangka menengah / lima tahunan, sedangkan Sasaran adalah kinerja tahunan. Adapun Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerjanya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.26**

**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi-1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Nilai SAKIP Kabupaten Opini atas Audit BPK Survey Eksternal Persepsi Korupsi Status Kinerja LPPD Nilai Indeks

Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			SPBE
				Indeks Inovasi Daerah
				Tingkat Maturitas SPIP
			Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Misi-2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan
				Persentase kontribusi PDRB sektor industri
				Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas
				Persentase pertumbuhan nilai investasi
		Indeks GINI	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase usaha mikro mandiri
				Persentase koperasi berkualitas
				Persentase Desa Mandiri
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor

	Penanggulangan Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Menurunnya Penduduk miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan
Misi-3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
				Indeks Infrastruktur Pendidikan
				Indeks Infrastruktur Kesehatan
				Indeks Kualitas Air
Misi-4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.
				Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Tutuan Lahan
				Indeks Resiko Bencana
Misi-5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai	Indeks Kesalehan Sosial	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
				Usia Harapan Hidup (UHH)
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Terciptanya	Indeks Rasa

Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Keruk unan dan Ketentraman dalam masyarakat		kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Aman
--	--	--	---	------

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

### c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode tahun 2021-2026.

Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang Maju, Aman dan Sejahtera, maka disusun 17 (tujuh belas) Program Strategis yang merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Program Prioritas 1 : 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. Program Prioritas 2 : BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Program Prioritas 3 : Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. Program Prioritas 4 : 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Program Prioritas 5 : Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Program Prioritas 6 : Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Program Prioritas 7 : Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT
8. Program Prioritas 8 : 20.000 UMKM Naik Kelas
9. Program Prioritas 9 : Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan
10. Program Prioritas 10 : Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu
11. Program Prioritas 11 : Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer
12. Program Prioritas 12 : Youth Center, Bangun Pusa Kreativitas Anak Muda
13. Program Prioritas 13 : 2.000 Warung Rakyat Direnovasi
14. Program Prioritas 14 : Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera
15. Program Prioritas 15 : 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat

- 16. Program Prioritas 16 : Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif
- 17. Program Prioritas 17 : Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

**d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Tema pembangunan Tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen perencanaan tahunan yang ditetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang kemudian disesuaikan melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Sebagaimana Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, adalah “Pengembangan Kerjasama Lintas Daerah yang memposisikan Sidoarjo sebagai Penyedia Logistik Regional dan Nasional bertumpu pada Potensi Daerah, Kesiapan SDM yang Unggul serta Berdaya Saing untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan,” dimana Prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.27**

**Prioritas dan Arah Kebijakan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025**

Prioritas RKPD Tahun 2025	Arah Kebijakan Tahun 2025
Intensifikasi kerjasama dan penyalarsan pembangunan lintas daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi baru;	Pengembangan Kerja Sama Lintas Daerah yang Memposisikan Sidoarjo sebagai Penyedia Logistik Regional dan Nasional Bertumpu Pada Kesiapan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.
Optimalisasi peran Sidoarjo sebagai penyedia logistik nasional dan regional melalui peningkatan Industri, dan Surplus Perdagangan Antar Daerah (Regional Trade Surplus) serta Surplus Perdagangan Internasional (Net Export) guna mempercepat penanggulangan pengangguran;	
Implementasi kebijakan yang mendukung berkembangnya perikanan, pertanian, ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan Koperasi dan Usaha Mikro hingga level desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan;	
Penguatan Kapasitas SDM Berkarakter yang unggul utamanya bidang kesehatan dan pendidikan serta kompetensi Angkatan Kerja yang match dengan kebutuhan sektor swasta (user);	
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui Percepatan transformasi digital dan pelayanan publik berkualitas serta implementasi pembangunan berkelanjutan.	

Pada tahun anggaran 2025 telah ditetapkan paket strategis pengadaan barang/ jasa sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/254/438.1.1.3/2025 tentang Paket Strategis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, yaitu antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.28

## Pagu Anggaran Paket Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025

No.	Paket Strategis	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
1	Belanja Modal Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sedati	Rp.57.081.763.200,00	Dinas Kesehatan
2	Pembangunan Alun-alun (Lanjutan)	Rp.29.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3a	Pembangunan Rumah Pompa Kedungpeluk	Rp.8.950.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
3b	Pengadaan Pompa Banjir dan Utilitasnya	Rp.5.850.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
4	Peningkatan Jalan Sidodadi-Bringinbendo	Rp.12.525.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
5	Peningkatan Jalan Pabean Ngingas (Lanjutan)	Rp.10.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
6	Peningkatan Jalan Kureksari-Kepuhkiriman	Rp.9.650.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
7	Peningkatan Jalan Buduran-Sidokepung	Rp.8.750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
8	Peningkatan Jalan Gedangan-Bentro (Lanjutan)	Rp.14.550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
9	Pembangunan USB SMPN 2 Tulangan (Lanjutan)	Rp.8.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Pembangunan USB SMPN 2 Prambon (Lanjutan)	Rp.7.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Perluasan SPAM Desa Ngampelsari Kecamatan Candi (DAKP)	Rp.5.920.612.936,00	Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang
12	Perluasan SPAM Desa Damarsi Kecamatan Buduran (DAKP)	Rp.3.782.985.544,00	Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang
13	Perluasan SPAM Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo (DAKP)	Rp.4.192.379.136,00	Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang
14	Rehabilitasi Masjid Agung	Rp.2.790.000.000,00	Sekretariat Daerah
15	Pembangunan Double Deck	Rp.28.500.000.000,00	RSUD. Notopuro

### 1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

#### a. Dasar Pertimbangan Penerapan SPM

Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor

2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

#### **b. Dasar Penerapan SPM**

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, yang diganti dengan

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

### c. Kebijakan Umum

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan kunci dari Strategi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/ terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal 4 perspektif sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arahan ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara. Fleksibilitas pelayanan pemerintahan juga diarahkan kepada terselenggaranya sinkronisasi dan harmonisasi hubungan eksternal antara Pemerintah kabupaten dengan seluruh PD, dan pemerintahan desa.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).
- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah dioptimalkan untuk menambah porsi

Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

#### d. Kebijakan Penerapan SPM

Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

##### A. Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM di bidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
1	Pendidikan Dasar
2	Pendidikan Kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini

##### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	2025
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2025
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2025

## B. Bidang Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang SPM Bidang Kesehatan.

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV

### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100%	2025

### C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100%	2025
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2025

### D. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

#### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2025

## E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentangperubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2	Pelayanan Informasi rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	2025
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2025
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2025
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2025
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	2025

## F. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Sosial Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana

### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	100%	2025
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2025
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2025
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	2025
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	100%	2025

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Makro**

NO	IKK	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2025	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	82.67	83.35	0,82
2	Persentase Penduduk Miskin	4.53	4.40	-2.87
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.49	5.75	-11.40
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.54	5.63	1.62
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	136.72	145.53	6.44
6	Ketimpangan Pendapatan ( <i>Gini Ratio</i> )	0.327	0.316	-3.36

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*)

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

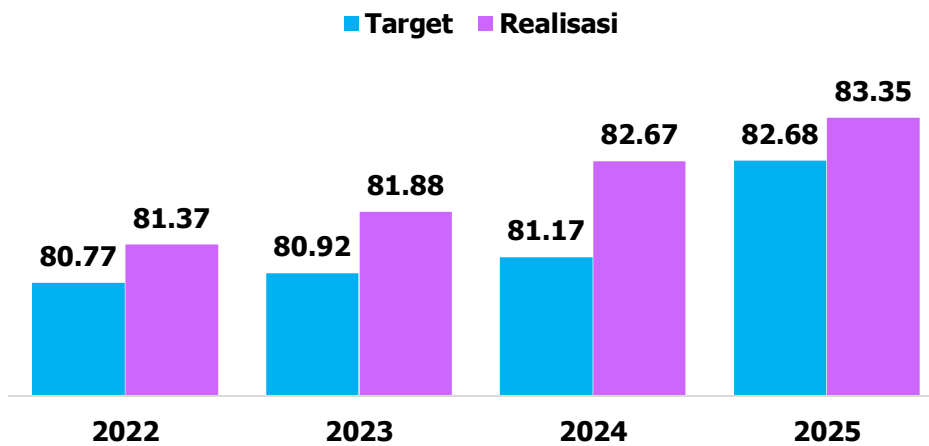
- a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
  - b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Pembangunan manusia di Sidoarjo terus mengalami kemajuan. Sejak Tahun 2021, status pembangunan manusia Sidoarjo sudah berada di level “sangat tinggi”. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2025 mencapai 83,35 dari target 82,68 atau mencapai target dengan capaian 100,81%. Apabila dibanding dengan capaian Tahun 2024 yaitu 82,67 maka terdapat kenaikan 0,68 poin atau sekitar 0,82%.

Apabila dibandingkan dengan seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Timur, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-1 untuk Kabupaten dan peringkat ke-4 untuk Kabupaten dan Kota. Berikut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :

**Grafik 2.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo**



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo**

Dimensi/Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025
<b>Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>					
- Umur Harapan Hidup saat Lahir(UHH SPLF 2020)	Tahun	75,06	75,36	75,63	76,08
<b>Pengetahuan</b>					

- Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,95	14,97	15,22	15,23
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,77	10,78	10,91	10,94
<b>Standar Hidup Layak</b>					
- Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	14.808	15.311	15.710	16.366
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>		<b>81,37</b>	<b>81,88</b>	<b>82,67</b>	<b>83,35</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

## 2. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Pada level Kabupaten, tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 berada pada posisi terendah, kemudian diikuti oleh Kabupaten Tulungagung, Banyuwangi, Blitar dan Pasuruan. Sedangkan untuk level Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo berada pada urutan ke-5 terendah setelah Kota Batu, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Madiun. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo secara agregasi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2025 Tingkat Kemiskinan mencapai 4,40 persen turun dari tahun 2024 yang masih berada pada angka 4,53 persen. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2025 yang sebesar 4,54 persen maka capaian tahun 2025 sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2025 mencapai 107,57 ribu jiwa. Berkurang sebesar 1,82 ribu jiwa, dibandingkan kondisi Maret 2024 yang sebesar 109,39 ribu jiwa.

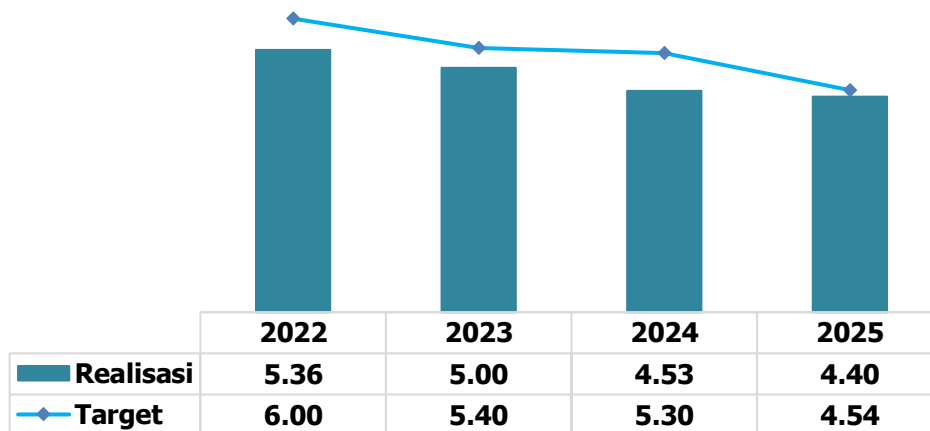
Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2025 sebesar Rp 617.911 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 20.627 atau meningkat sebesar 3,45 persen, dibandingkan kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp 597.284.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidoarjo Maret 2025 sebesar 0,63 mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan Maret 2024. Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidoarjo Maret 2025 sebesar 0,19 mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin dibandingkan Maret 2024.

Perkembangan tingkat miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat sebagaimana grafik sebagai berikut :

**Grafik 2.2**  
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo**



*Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo*

### 3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh Pemerintah Kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2025 sebesar 5,75 persen, turun 0,74 poin dibandingkan dengan tahun 2024 yang masih berada pada angka 6,49 persen. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 6,48 persen, maka capaian tahun 2025 jauh melebihi target yang ditetapkan.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo pada Agustus 2025 sebanyak 1.209,70 ribu orang, meningkat 37,14 ribu orang dibandingkan Agustus 2024

sebanyak 1.172,56 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sidoarjo sebesar 69,53 persen, naik 1,16 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

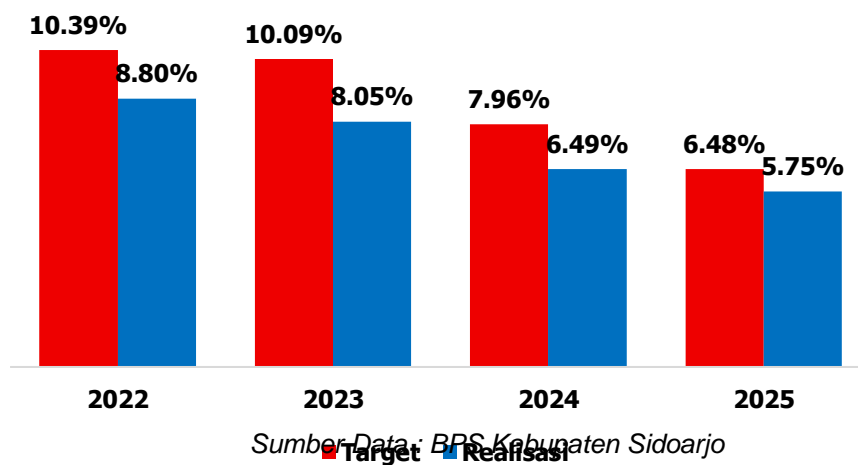
Penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 sebanyak 1.140,15 ribu orang atau bertambah 43,66 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Sektor Manufaktur menjadi sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi yakni sebesar 45,57 ribu orang, sedangkan sektor pertanian mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 30,39 ribu orang. Sementara itu, sektor jasa justru mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 32,31 ribu orang.

Sebanyak 710 ribu orang (62,27 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun 2,35 persen dibandingkan Agustus 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 5,75 persen atau turun 0,74 persen poin dibandingkan Agustus 2024 sebesar 6,49 persen. Lulusan sekolah menengah atas (SMA dan SMK) mengalami kenaikan TPT dimana SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) memiliki TPT tertinggi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 8,37 persen. Di sisi lain, lulusan SMP dan perguruan tinggi (Diploma dan Universitas) mengalami penurunan TPT dibandingkan Agustus 2024.

Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran terbuka :

**Grafik 2.3**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo**



**4. Pertumbuhan Ekonomi**

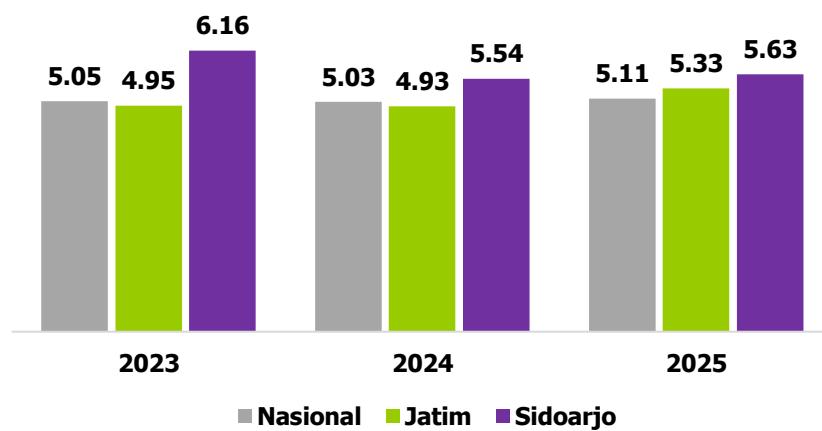
Indikator laju pertumbuhan tidak dapat dihitung secara parsial; indikator ini mensyaratkan konsolidasi PDRB atas dasar harga konstan, verifikasi komponen sektoral, serta penyesuaian metodologis agar angka yang dipublikasikan bersifat final dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo sudah lebih baik dibandingkan

dengan Provinsi. Angka pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 sebesar 5,63 (93,83% dari target yang telah ditetapkan). Angka ini melebihi capaian nasional yaitu sebesar 5,11 dan Provinsi Jawa Timur sebesar 5,33. Dari seluruh wilayah di Jawa Timur, yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota Peringkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025: 10 dari 38 Kabupaten/Kota. Artinya, Kabupaten Sidoarjo berada dalam kelompok 25% teratas pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Sidoarjo secara konsisten tumbuh lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur dalam dua tahun berturut-turut. Pada 2025, selisihnya sekitar +0,30 poin persentase di atas Provinsi. Ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Sidoarjo relatif lebih dinamis dibanding agregat Provinsi. Kenaikan Sidoarjo dari 5,54% (2024) ke 5,63% (2025) menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan cenderung menguat.

**Grafik 2.4**

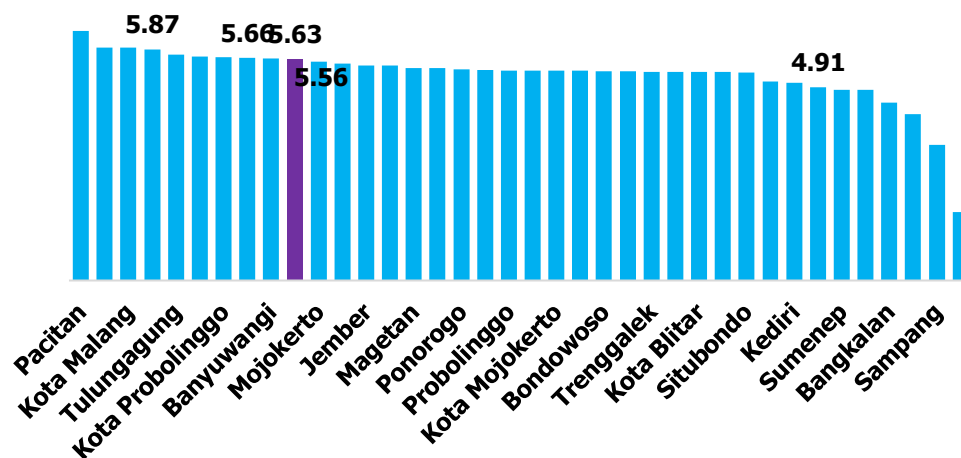
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo dibanding Provinsi dan Nasional**



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

**Grafik 2.5**

**Pertumbuhan Ekonomi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025**



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Konteks Makro yang Mempengaruhi Pertumbuhan 2025 :

Dalam membaca laju pertumbuhan ekonomi daerah, perlu dipahami bahwa kinerja PDRB tidak berdiri sendiri. Tahun 2025 berada dalam lanskap yang dipengaruhi faktor makro nasional, regional, dan internasional, yang umumnya memengaruhi daerah industri–perdagangan seperti Sidoarjo melalui jalur permintaan, biaya produksi, logistik, dan kepercayaan pelaku usaha. Faktor-faktor utama yang lazim menjadi pemicu fluktuasi pertumbuhan antara lain:

a. Ketidakpastian ekonomi global dan perdagangan internasional

Tekanan permintaan global, perubahan biaya logistik, serta dinamika rantai pasok dapat menahan ekspansi sektor manufaktur dan perdagangan, terutama pada subsektor yang terkait pasar ekspor maupun bahan baku impor.

b. Perubahan harga komoditas dan biaya energi/transportasi

Kenaikan atau volatilitas biaya input (energi, transportasi, bahan baku) berpengaruh langsung pada struktur biaya industri, margin usaha, dan keputusan ekspansi investasi.

c. Kebijakan moneter dan biaya pembiayaan (*cost of fund*)

Perubahan suku bunga dan likuiditas perbankan berdampak pada konsumsi, permintaan kredit, serta investasi sektor riil. Daerah dengan basis UMKM dan industri pengolahan sensitif terhadap dinamika pembiayaan.

d. Dinamika regional Jawa Timur

Arus barang, konektivitas pelabuhan/koridor logistik, serta kompetisi antar-kawasan industri di Jawa Timur turut memengaruhi pergerakan produksi, distribusi, dan investasi di Sidoarjo.

e. Perubahan struktur ekonomi domestik

Transisi dari pola pertumbuhan berbasis kuantitas menuju kualitas (produktivitas, efisiensi, nilai tambah) sering membuat pertumbuhan lebih “selektif”: sektor yang adaptif tumbuh lebih cepat, sementara sektor yang kurang produktif cenderung melambat.

Pemerintah Daerah tetap menyiapkan langkah mitigasi yang relevan dengan risiko-risiko makro tersebut.

Mitigasi dan langkah penguatan yang dapat dilakukan daerah untuk menjaga ketahanan pertumbuhan dan memperkecil dampak tekanan eksternal, kebijakan daerah diarahkan pada penguatan mesin ekonomi yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah, melalui:

1. Stabilisasi biaya dan kelancaran distribusi  
Penguatan koordinasi pasokan–distribusi, pengurangan hambatan logistik lokal, dan dukungan kelancaran arus barang untuk menahan biaya ekonomi tinggi.
2. Penguatan industri bernilai tambah dan hilirisasi  
Mendorong transformasi dari sekadar produksi menjadi nilai tambah (*processing, quality upgrading, standardisasi, packaging, cold chain* untuk pangan/perikanan, dan integrasi rantai pasok lokal) agar ekonomi lebih tahan terhadap fluktuasi harga input dan permintaan.
3. Perluasan pasar dan substitusi impor selektif  
Memperkuat akses pasar antar-daerah dan *digital channel*, sekaligus mendorong penggunaan input lokal yang *feasible* untuk mengurangi kerentanan pada bahan baku tertentu.
4. Percepatan investasi yang berkualitas (bukan sekadar kuantitas)  
Penyederhanaan perizinan berbasis risiko, kepastian lahan/*utility*, dan fasilitasi penyelesaian kendala proyek agar investasi yang masuk cepat berproduksi (lebih cepat menjadi output PDRB).
5. Penguatan UMKM dan daya beli  
Penguatan produktivitas UMKM (kurasi produk, pembiayaan, pendampingan, digitalisasi) dan stabilisasi harga kebutuhan pokok untuk menjaga permintaan domestik sebagai bantalan (*shock absorber*) saat tekanan global meningkat.
6. Penguatan koordinasi data dan *early warning* ekonomi  
Membangun pemantauan indikator cepat (produksi industri, mobilitas logistik, inflasi, penyerapan tenaga kerja) agar respons kebijakan lebih cepat dan terarah sebelum tekanan makro tercermin pada PDRB tahunan.

## 5. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tidak bisa secara langsung diartikan meningkat pula kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Dampak pertumbuhan ekonomi tersebut harus bisa dipastikan dinikmati oleh seluruh masyarakat daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan relatif kurang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat jika pertumbuhan jumlah penduduk juga tinggi. Salah satu indikator yang dianggap bisa lebih menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut adalah PDRB per kapita/Pendapatan perkapita.

Dengan definisi PDRB per kapita adalah total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dianggap bahwa tiap penduduk juga ikut merasakan

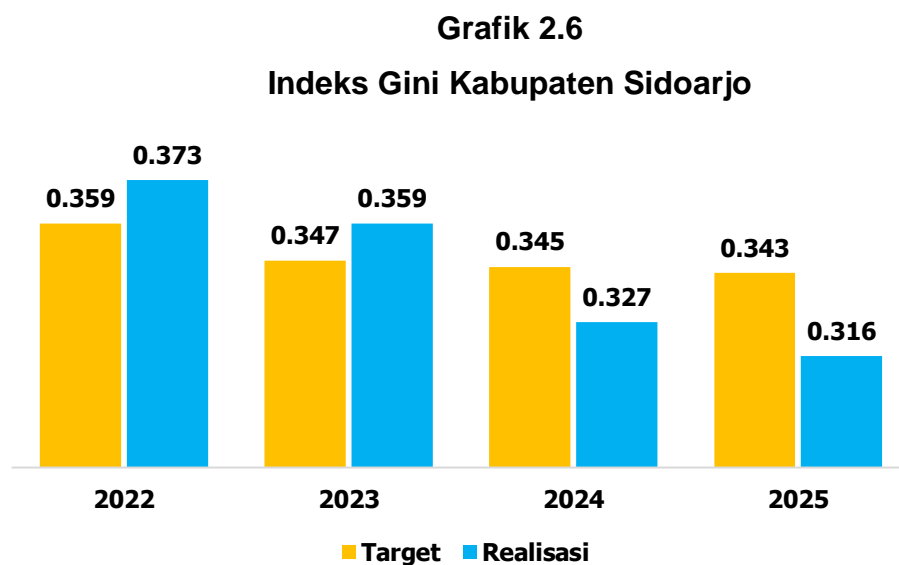
peningkatan atau hasil pertumbuhan jika terjadi peningkatan PDRB per kapita di suatu daerah.

Pendapatan perkapita tahun 2025 naik menjadi 145,53%, dari tahun 2024 sebesar 136,72%

## 6. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa – apa.

Berikut perkembangan Disparitas (Indeks Gini) di Kabupaten Sidoarjo :



*Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo*

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1, atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 tercapai 0,316 dari target 0,343 sehingga sudah mencapai target yang telah ditentukan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 maka capaian Tahun 2025 lebih baik, yaitu menurun 0,011 poin atau sekitar 3,36%.

## 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

### 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci

#### 1. URUSAN PENDIDIKAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	<b>99,02%</b>	PD	
2		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	<b>99,64 %</b>	PD	
3		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	<b>98,44 %</b>	PD	
4		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	<b>50,86 %</b>	PD	
5		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	<b>57,46 %</b>	PD	

#### 2. URUSAN KESEHATAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kesehatan	Persentase kematian ibu	<b>0,08%</b>	PD	
2		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	<b>2,47%</b>	PD	
3		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	<b>100%</b>	PD	
4		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	<b>100%</b>	PD	

5		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	PD	
6		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	PD	
7		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%	PD	
8		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	PD	
9		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	PD	
10		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100%	PD	
11		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100%	PD	
12		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100%	PD	
13		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100%	PD	
14		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100%	PD	

### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	99,77 %	PD	
2		Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	95,92 %	PD	

3		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	100%	PD	
4		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,97%	PD	
5		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	86,90%	PD	
6		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Tidak dapat dilaksanakan	PD	Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki kewenangan pada infrastruktur pengaman pantai
7		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100 %	PD	
8		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Tidak dapat dilaksanakan	PD	belum terdapat permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang diajukan dengan kategori MBR melalui sistem perizinan yang berlaku. Sebagian besar permohonan PBG yang masuk merupakan pembangunan rumah tinggal umum oleh masyarakat maupun pengembang yang tidak secara khusus didaftarkan sebagai pembangunan bagi MBR. Selain

					itu, belum terdapat program pembangunan perumahan MBR yang difasilitasi secara langsung oleh pemerintah daerah pada tahun pelaporan, sehingga tidak terdapat penerbitan PBG yang dapat diklasifikasikan dalam kategori tersebut
9		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,30%	PD	
10		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100%	PD	

**4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	<b>Tidak dapat dilaksanakan</b>	PD	pada periode pelaporan tidak terdapat kejadian bencana yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan tempat tinggal bagi warga masyarakat yang memerlukan penyediaan rumah layak huni melalui fasilitasi pemerintah daerah

2		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100%	PD	
3		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	100%	PD	
4		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100%	PD	

**5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100 %	PD	
2		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	PD	
3		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100 %	PD	
4		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	PD	
5		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	PD	
6		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	81,53 %	PD	

**6. URUSAN SOSIAL**

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<b>100%</b>	PD	
2		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<b>100 %</b>	PD	
3		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<b>100 %</b>	PD	
4		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<b>100 %</b>	PD	
5		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	<b>100 %</b>	PD	
6		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	<b>86,40%</b>	PD	

**7. URUSAN TENAGA KERJA**

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	<b>100%</b>	PD	
2		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	<b>81,93%</b>	PD	

3		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100%	PD	
---	--	---	------	----	--

## 8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	PD	
2		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	PD	

## 9. URUSAN PANGAN

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0%	PD	belum adanya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## 10. URUSAN PERTANAHAN

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	50,82%	PD	
2		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	76,41%	PD	
3		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	5,56%	PD	

**11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	<b>53,33</b>	PD	
2		Persentase jumlah sampah yang tertangani	<b>94,59%</b>	PD	

**12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	<b>99,43%</b>	PD	
2		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	<b>61,50%</b>	PD	
3		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	<b>100%</b>	PD	
4		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	<b>99,32%</b>	PD	
5		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	<b>100%</b>	PD	
6		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi	<b>100%</b>	PD	

		yang melaporkan			
7		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	<b>100%</b>	PD	

### 13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	<b>0%</b>	PD	Kabupaten Sidoarjo sudah tidak ada desa tertinggal
2		Persentase peningkatan status desa mandiri	<b>100%</b>	PD	
3		Persentase fasilitasi kerja sama desa	<b>100%</b>	PD	

### 14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	<b>101,69%</b>	PD	
2		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	<b>70,21%</b>	PD	
3		Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	<b>5,48%</b>	PD	

### 15. URUSAN PERHUBUNGAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0.47	PD	
2		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.60	PD	
3		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	0%	PD	Masih terdapat kendala terkait pemenuhan persyaratan legalitas oleh Pengusaha Angkutan atau Koperasi Angkutan Umum. Kondisi ini berdampak pada pengajuan ijin penyelenggaraan sehingga pemenuhan kewajiban pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yang mewajibkan pemegang ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan. Akibatnya, implementasi Sistem Manajemen Keselamatan pada beberapa koperasi angkutan umum belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	<b>100%</b>	PD	
2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	<b>100%</b>	PD	
3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	<b>100%</b>	PD	

#### 17. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	<b>16,88%</b>	PD	
2		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	<b>18,65%</b>	PD	

#### 18. URUSAN PENANAMAN MODAL

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	<b>10,80%</b>	PD	
2		Realisasi total terhadap target investasi	<b>104,93%</b>	PD	

**19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	<b>12,63 %</b>	PD	
2		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	<b>12,36 %</b>	PD	
3		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	<b>21,33 %</b>	PD	
4		Persentase jumlah atlet berprestasi	<b>72,58 %</b>	PD	

**20. URUSAN STATISTIK**

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	<b>100 %</b>	PD	

**21. URUSAN PERSANDIAN**

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	<b>68,41%</b>	PD	

**22. URUSAN KEBUDAYAAN**

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
-----	--------	-------------	---------	-------------	-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	<b>100 %</b>	PD	
2		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	<b>0 %</b>	PD	Capaian indikator pusat peninggalan bersejarah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun pelaporan tercatat nihil. Kondisi ini disebabkan sebagian besar peninggalan bersejarah yang terdapat di wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan objek cagar budaya yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sebagai contoh, pengelolaan situs bersejarah seperti Candi Pari dan Candi Sumur berada di bawah instansi pelestarian cagar budaya pemerintah pusat, sedangkan pengelolaan Museum Mpu Tantular berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak secara langsung mengelola pusat peninggalan bersejarah pada periode pelaporan, sehingga indikator dimaksud tidak memiliki capaian

**23. URUSAN PERPUSTAKAAN**

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
-----	--------	-------------	---------	-------------	-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	<b>58,03</b>	PD	
2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	<b>10,96</b>	PD	

#### 24. URUSAN KEARSIPAN

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	<b>100%</b>	PD	

#### 25. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kelautan dan Perikanan	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	<b>25,58%</b>	PD	
2		Produksi perikanan tangkap dan budidaya	<b>102,10%</b>	PD	

#### 26. URUSAN PARIWISATA

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	<b>0,61%</b>	PD	
2		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	<b>40,02%</b>	PD	
3		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke	<b>8,98%</b>	PD	

		kabupaten/kota			
--	--	----------------	--	--	--

**27. URUSAN PERTANIAN**

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	<b>0%</b>	PD	Indikator Kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian tidak menggunakan presentase peningkatan Produksi, tetapi menggunakan perhitungan presentase peningkatan Produktivitas yang didasarkan semakin berkurangnya luas lahan sawah
2		Peningkatan produksi hortikultura	<b>0%</b>	PD	Indikator Kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian tidak menggunakan presentase peningkatan Produksi, tetapi menggunakan perhitungan presentase peningkatan Produktivitas yang didasarkan semakin berkurangnya luas lahan hortikultura
3		Peningkatan produksi komoditas peternakan	<b>-23,23%</b>	PD	
4		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	<b>98,06%</b>	PD	

**28. URUSAN PERDAGANGAN**

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
-----	--------	-------------	---------	-------------	-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	<b>100 %</b>	PD	

## 29. URUSAN PERINDUSTRIAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	<b>100%</b>	PD	
2		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	<b>23,96 %</b>	PD	
3		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	<b>11,07%</b>	PD	

4		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	<b>67,06%</b>	PD	
---	--	--	---------------	----	--

## 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

### 1. URUSAN PERENCANAAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<b>94,12%</b>	PD	Program no.9 Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta hubungan internasional yang kondusif tidak masuk dalam program yang direncanakan dan dianggarkan Kabupaten Sidoarjo karena sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya Prioritas ini adalah Kewenangan Pemerintah Pusat

### 2. URUSAN KEUANGAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	<b>26,86 %</b>	PD	

2		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	50,43 %	PD	Data yang disajikan laporan unreview/unaudited
3		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	89,76%	PD	Data yang disajikan laporan unreview/unaudited
4		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	43,20%	PD	

### 3. URUSAN KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	53,22%	PD	

### 4. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100%	PD	

### 5. URUSAN FUNGSI PENGAWASAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Fungsi Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.00	PD	
2		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	2.00	PD	Untuk surat pengesahan dari BPKP rencana terbit Bulan April 2026
3		Manajemen risiko Indeks	2.00%	PD	
4		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	93,13%	PD	

## 6. URUSAN PENGADAAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	35.56	PD	
2		Pemanfaatan sistem pengadaan	27.18	PD	
3		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	19.71	PD	

## 7. URUSAN HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu	PD	

2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	42,86%	PD	
---	---	--------	----	--

## 8. URUSAN PELAYANAN PUBLIK

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	91.19		

### 2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah

#### a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan wujud kewajiban Bupati selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintah Daerah kepada publik atas kinerja yang telah dicapai. Pedoman penyusunan laporan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 menetapkan Visi : **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**, didukung 5 Misi dan 6 Tujuan, 13 Sasaran Strategis, 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 31 Indikator Kinerja Daerah (IKD). Hasil penyelenggaraan pembangunan dijabarkan dalam 37 urusan (6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib pelayanan non dasar, 5 urusan pilihan dan 8 urusan penunjang pemerintahan) telah dipetakan dalam Tujuan dan indikator Tujuan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025. Dalam Laporan kinerja ini akan disajikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis seperti yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025. Oleh karena itu hasil penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Formulasi pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis adalah membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaian kinerjanya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Skala Pengukuran Kinerja**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 90,01%	Sangat Baik
2	80,01% s.d 90%	Baik
3	70,01% s.d 80%	Cukup
4	Kurang dari 70 %	Kurang

Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Sidoarjo Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Sidoarjo merupakan kinerja tahun ke-5 pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian seluruh kinerja tujuan atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 adalah 99,96%. Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran capaian kinerja tertinggi dari tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 terdapat 9 IKU yang menjadi tolak ukur keberhasilan utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang capain hasil keberhasilan kinerjanya pada tahun anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2025**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA
	<b>MISI 1</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha</b>					
	<b>TUJUAN 1</b>	<b>: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha</b>					
	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Katagori</b>	A (86,48)	A (86,71)*	100,26	<b>MENPAN RB</b>
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1. Nilai SAKIP Kabupaten	Katagori	A (81)	BB (72,62)	89,65	MENPAN RB
		2. Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	100	BPK
		3. Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,91	72,82 **)	-	KPK
		4. Status Kinerja LPPD	Katagori	Sangat Tinggi	Belum Dirilis	0	MENDAGRI
		5. Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	4,10	Tidak menjadi lokus penilaian ***)	-	MENPAN RB
		6. Indeks Inovasi Daerah	Katagori	Sangat Inovatif (75,70)	Sangat Inovatif (91,54)	120,92	MENPAN RB
		7. Tingkat Maturitas SPIP	Katagori	Level 3 Terdefinisi	Level 3	100	BPKP
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Katagori	A (4,66) Pelayanan Prima	A (4,55) Pelayanan Prima	97,64	MENPAN RB
	<b>MISI 2</b>	<b>Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan</b>					
	<b>TUJUAN 2</b>	<b>: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan</b>					
	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>1. Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Angka</b>	6,00	5,63	93,83	<b>BPS</b>
	<b>:</b>	<b>2. Indeks Gini</b>	<b>Indeks</b>	0,343	0,316	108,54	<b>BPS</b>
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,33	15,66	95,90	BPS
		2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	48,82	49,95	102,31	BPS
		3. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	3,11	1,39	44,69	BPS
		4. Persentase	%	1,33	10,80	812,03	BKPM

			Pertumbuhan Nilai Investasi					
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	2,10	2,51	119,52	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	%	28,30	28,71	101,45	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		3.	Persentase Desa Mandiri	%	67,92	81,13	119,45	KEMENDES
	<b>TUJUAN 3</b>	:	<b>Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan</b>					
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)</b>	%	<b>6,48</b>	<b>5,75</b>	<b>112,69</b>	<b>BPS</b>
		2.	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	%	<b>4,54</b>	<b>4,40</b>	<b>103,18</b>	<b>BPS</b>
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	%	90,56	94,25	104,07	BPS
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	94,80	95,60	100,84	BPS
	<b>MISI 3</b>	<b>Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan</b>						
	<b>TUJUAN 4</b>	:	<b>Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan</b>					
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Infrastruktur</b>	Indeks	<b>0,772</b>	<b>0,827</b>	<b>107,12</b>	<b>BPS</b>
		2.	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	Indeks	<b>65,08</b>	<b>62,37</b>	<b>95,84</b>	<b>BPS</b>
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,772	0,827	107,12	BAPPEDA
		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	90,67	96,37	106,28	BAPPEDA
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	72,59	92,00	126,74	BAPPEDA
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	Indeks	65,79	71,00	107,92	DLHK
		2.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	77,63	65,65	84,57	DLHK
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	40,66	41,50	102,06	DLHK
		4.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	72	91,68	78,55	BNPB
	<b>MISI 4</b>	<b>Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya</b>						
	<b>TUJUAN 5</b>	:	<b>Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya</b>					
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	Indeks	<b>82,68</b>	<b>83,35</b>	<b>100,81</b>	<b>BPS</b>

9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	16,12	15,23	94,48	BPS
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	12,09	10,94	90,49	BPS
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,31	76,08	99,70	BPS
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,77	94,9 ****)	99	BPS
<b>MISI 5</b>		<b>Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</b>						
<b>TUJUAN 6</b>		<b>: Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat</b>						
<b>Indikator Tujuan</b>		1.	<b>Indeks Kesalehan Sosial</b>	<b>Indeks</b>	<b>87,35</b>	<b>87,52</b>	<b>100,19</b>	<b>Bappeda</b>
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	Indeks	86,65	87,03	100,44	Bappeda
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	92,56	92,59	100,03	Bappeda
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	Indeks	83,06	83,11	100,60	Bappeda

Keterangan :

\*) : Nilai masih akan update, Per 27 Februari 2026 masih dalam proses sanggah

\*\*) : Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi (EPK) tidak rilis sedangkan yang rilis adalah Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang selanjutnya pada saat penyusunan Renstra Tahun 2025, Indikator Persepsi Anti Korupsi (IPAK) berubah menjadi Indeks Integritas

\*\*\*): transisi indikator yang sebelumnya indeks SPBE menjadi indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)

\*\*\*\*): nilai IPG 2025 masih mengikuti IPG 2024

### c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Tahun Sebelumnya

Berikut adalah penjabaran terkait capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 terdapat 9 IKU yang menjadi tolak ukur keberhasilan utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo :

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2022	2023	2024	2025			Ket
						Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	81.37	81.88	82.67	83.51	83.35	99,81%	Tidak Tercapai
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.360	5.000	4.530	4.52	4.40	97,35%	Tidak Tercapai
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7.53	6.16	5.54	6.00	5.63	93,83%	Tidak Tercapai
4	Tingkat	Persen	8.800	8.050	6.490	6.48	5.75	112,70%	Tercapai

	Pengangguran Terbuka (TPT)								
5	Indeks Gini	Angka	0.373	0.359	0.327	0.326	0.316	96,93%	Tidak Tercapai
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	B (68,88)	BB (75,38)	A (86,98)	A (87,00)	A (86,71)	99,67%	Tidak Tercapai
7	Indeks Infrastruktur	Angka	0.792	0.843	0.850	0.858	0.860	102,02%	Tercapai
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	57.540	58.970	53.350	65.08	62.37	94,55%	Tidak Tercapai
9	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	84.230	85.150	87.330	87.35	87.52	102,78%	Tercapai

Sumber data: RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021- 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas, untuk 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 3 indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 6 indikator.

**d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah**

Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan terhadap penyelenggaraan program Perangkat Daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026, capaian keberhasilan kinerja penyelenggaraan program Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025**

N o.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Katagori	A (81)	BB (72,62)	89,65	Tidak Tercapai
2	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	100	Belum rilis
3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,91	72,82	-	Sudah tidak dilakukan penilaian
4	Status Kinerja LPPD	Katagori	Sangat Tinggi (4,3)	Tidak Dinilai	0	Belum rilis

5	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	4,10	Tidak menjadi lokus penilaian	-	Tidak menjadi lokus penilaian
6	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif (75,70)	Sangat Inovatif (91,54)	120,92	Tercapai
7	Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3 Terdefinisi	Level 3	100	Tercapai
8	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	A (Prima) 4,66	A (Prima) 4,55	97,64	Tidak Tercapai
9	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,33	15,66	95,90	Tidak Tercapai
10	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	48,82	49,95	102,31	Tercapai
11	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	3,11	1,39	44,69	Tidak Tercapai
12	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1,33	10,80	812,03	Tercapai
13	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	2,10	2,51	119,52	Tercapai
14	Persentase Koperasi Berkualitas	%	28,30	28,71	101,45	Tercapai
15	Persentase Desa Mandiri	%	67,92	81,13	119,45	Tercapai
16	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	%	90,56	94,25	104,07	Tercapai
17	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	94,80	95,60	100,84	Tercapai
18	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,772	0,827	107,12	Tercapai
19	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	90,67	96,37	106,28	Tercapai
20	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	72,59	92,00	126,74	Tercapai
21	Indeks Kualitas Air	Indeks	65,79	71,00	107,92	Tercapai

2 2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	77,63	65,65	84,57	Tidak Tercapai
2 3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	40,66	41,50	102,06	Tercapai
2 4	Indeks Risiko Bencana	Indeks	72	91,68	78,55	Tidak Tercapai
2 5	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	16,12	15,23	94,48	Tidak Tercapai
2 6	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	12,09	10,94	90,49	Tidak Tercapai
2 7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,31	76,08	99,70	Tidak Tercapai
2 8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,77	94,9	99	Belum rilis
2 9	Indeks Toleransi	Indeks	86,65	87,03	100,44	Tercapai
3 0	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	92,56	92,59	100,03	Tercapai
3 1	Indeks Rasa Aman	Indeks	83,06	83,11	100,60	Tercapai

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026

Sedangkan untuk capaian 31 Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 16 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 10 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 3 target. Karena belum dirilis oleh kementerian dan lembaga terkait; dan
- 5) Target yang sudah tidak menjadi lokus penilaian sebanyak 1 target

**e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai**

**- Indeks Reformasi Birokrasi (RB)**

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami perbaikan signifikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo ditargetkan berada pada kategori A (Sangat Baik). Hasil penilaian menunjukkan Kabupaten Sidoarjo memperoleh predikat A (Sangat Baik) dengan nilai **sementara 86,71 (A)**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 86,48 maka sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 ini belum final. Pada tanggal 27 Februari 2026 masih dalam proses pengajuan sanggah. Sehingga masih sangat dimungkinkan untuk mendapatkan nilai lebih tinggi dari 86,71.

Secara kategori, capaian ini menegaskan bahwa reformasi tata kelola telah berjalan kuat dan stabil. Adapun deviasi terhadap target angka yang ditetapkan pada dokumen perencanaan bersifat marginal dan perlu dibaca secara proporsional : perbedaan kecil pada skor total dapat terjadi karena RB merupakan agregasi dari banyak sub-indikator, dimana pergeseran pada sebagian kecil komponen (misalnya bukti dukung, pemenuhan standar, atau hasil verifikasi) dapat memengaruhi skor akhir tanpa mengubah kategori kinerja yang tetap berada pada level “Sangat Baik”. Adapun perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2025 sebagaimana grafik berikut :

**Tabel 2.6**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo**

TAHUN	INDEKS REFORMASI BIROKRASI
2021	B
2022	B
2023	BB
2024	A
<b>2025</b>	<b>A</b>

*Sumber Data : Kementerian PAN RB*

Untuk memperkuat capaian pada periode berikutnya, langkah mitigasi diarahkan pada dua jalur yang terukur. Pada jalur substantif, fokus penguatan dilakukan pada konsistensi implementasi lintas perangkat daerah terhadap indikator RB yang paling sensitif terhadap penilaian (akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, SPBE, integritas dan pengendalian internal, serta efektivitas tindak lanjut pengawasan dan pengaduan). Pada jalur tata kelola penilaian, penguatan dilakukan melalui pengendalian kualitas dokumen dan eviden: standardisasi bukti dukung, *quality assurance internal* sebelum *submit*, penguatan *clearing house* verifikasi OPD, serta penjadwalan pemenuhan eviden yang lebih awal agar tidak terjadi penurunan skor akibat ketidaklengkapan administrasi atau perbedaan interpretasi eviden saat verifikasi.

Dalam Indeks Reformasi Birokrasi, terdapat dua komposisi dalam pembentuknya. Pertama, penguatan tata kelola inti pemerintahan (RB General) telah menjadi fondasi yang kuat—menyangkut akuntabilitas kinerja, pengendalian internal, layanan publik, SPBE, pengadaan, statistik sektoral, *merit system*, serta tindak lanjut pengaduan dan rekomendasi pengawasan. Kedua, kontribusi RB Tematik telah terbangun dan perlu terus ditingkatkan agar dampak reformasi birokrasi lebih terasa langsung pada *outcome* prioritas pembangunan (kemiskinan, investasi, inflasi, stunting, dan TKDN).

Beberapa faktor utama **Pendukung Peningkatan Reformasi Birokrasi** yang berkontribusi terhadap peningkatan skor reformasi birokrasi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 antara lain:

#### 1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Implementasi sistem manajemen kinerja yang lebih transparan dan terukur.
- Peningkatan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) berbasis indikator kinerja utama (IKU).
- Optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital guna memastikan keterbukaan informasi publik.

#### 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Digitalisasi layanan publik melalui sistem pelayanan berbasis elektronik (e-government).
- Penyederhanaan prosedur layanan administrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
- Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah.

#### 3. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Internal

- Penguatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Peningkatan peran Inspektorat dalam melakukan audit kinerja dan kepatuhan.
- Implementasi sistem pengendalian gratifikasi dan whistle blowing system untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

#### 4. Pengembangan SDM Aparatur yang Profesional

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
- Implementasi sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia.
- Penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima.

#### 5. Peningkatan Kinerja Organisasi dan Budaya Kerja

- o Pembentukan budaya kerja yang adaptif dan inovatif.
- o Penerapan sistem kerja berbasis kinerja yang lebih produktif.
- o Peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah untuk memastikan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi.

**Dampak dan Implikasi** Peningkatan nilai reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, peningkatan efektivitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Sidoarjo semakin dekat menuju tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.

Keberhasilan dalam peningkatan skor reformasi birokrasi tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat seluruh perangkat daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Memperkuat sinergi antar perangkat daerah** dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi.
- **Melanjutkan inovasi dalam layanan publik** berbasis teknologi digital.
- **Meningkatkan keterlibatan masyarakat** dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah.
- **Mengevaluasi secara berkala** pelaksanaan reformasi birokrasi guna mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan Kabupaten Sidoarjo dapat terus meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”, didukung melalui 2 Sasaran Strategis, sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas dan Berbasis Digital;
2. Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.

**Sasaran 1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas dan Berbasis Digital.**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Katagori	A	BB	89,65	Tidak

			(81)	(72,62)		Tercapai
2.	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP*)	100	Belum rilis
3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,91	72,82	-	Sudah tidak dilakukan penilaian
4.	Status Kinerja LPPD	Kategori	Sangat Tinggi (4,3)	Tidak Dinilai**)	0	Belum rilis
5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	4,10	Tidak menjadi lokus penilaian	-	Tidak menjadi lokus penilaian
6.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif (75,70)	Sangat Inovatif (91,54)	120,92	Tercapai
7.	Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3 Terdefinisi	Level 3	100	Tercapai

Keterangan :

\*) :Realisasi merupakan realisasi tahun 2024

\*) : Penilaian atas LPPD Tahun Anggaran 2023 dan untuk LPPD Tahun Anggaran 2024 belum rilis

## Sasaran I.

### Indikator Kinerja I : Nilai SAKIP Kabupaten

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen nasional untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi pada capaian hasil (outcome). Evaluasi SAKIP dilakukan oleh Kementerian PANRB berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dengan menilai kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja internal.

Hasil evaluasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 72,62 dengan kategori BB (Sangat Baik). Meskipun belum mencapai target kategori A sebagaimana ditetapkan dalam P-RKPD, capaian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan pada tingkat yang baik dan terstruktur. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.7**

### Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

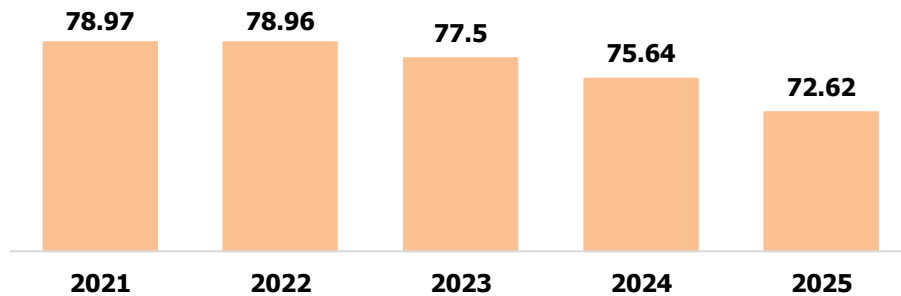
No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	26,09	25,43
2	Pengukuran Kinerja	30	21,66	19,98
3	Pelaporan Kinerja	15	11,68	11,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,21	16,21
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>75,64</b>	<b>72,62</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>BB</b>	<b>BB</b>

Sumber: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Jika dibandingkan Tahun 2024 (75,64), terdapat penurunan nilai agregat sebesar 3,02 poin. Penurunan ini terutama terjadi pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Namun demikian, komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tetap stabil, yang menunjukkan bahwa fungsi pengendalian internal dan evaluasi telah berjalan konsisten.

**Grafik 2.7**

**Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025**



Sumber: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Perlu dicermati bahwa evaluasi SAKIP bersifat relatif dan kompetitif secara nasional. Penyesuaian bobot penilaian serta peningkatan standar evaluasi dari Kementerian PANRB dapat memengaruhi nilai akhir, meskipun praktik tata kelola secara substantif tetap berjalan. Hal ini cukup menguatkan bahwa perubahan nilai tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kualitas tata kelola, tetapi adanya dinamika standar evaluasi nasional yang semakin ketat.

Adapun Hasil Evaluasi SAKIP masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut

**Tabel 2.8**

**Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Nilai SAKIP Tahun 2024-2025**

Kategori Nilai	Jumlah OPD	
	Tahun 2024	Tahun 2025
AA (Sangat Memuaskan)	1 OPD (2,04%)	1 OPD (2,04%)
A (Memuaskan)	32 OPD (65,31%)	38 OPD (77,55%)
BB (Sangat Baik)	16 OPD (32,65%)	10 OPD (20,41%)

Sumber: Bagian Organisasi Tahun 2026

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (SAKIP PD) Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja dibandingkan Tahun 2024. Pada Tahun 2025, sebanyak 1 OPD (2,05%) memperoleh predikat AA (Sangat Memuaskan), 38 OPD (77,55%) meraih predikat A (Memuaskan), dan 10 OPD (20,41%) berada pada kategori BB (Sangat Baik).

Dibandingkan Tahun 2024, jumlah OPD kategori A meningkat dari 32 menjadi 38, dan OPD kategori BB menurun dari 16 menjadi 10. Ini menunjukkan bahwa secara struktural, implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah mengalami penguatan dan semakin merata pada kategori A.

Dengan kata lain, meskipun nilai agregat kabupaten belum mencapai kategori A, fondasi implementasi SAKIP di tingkat perangkat daerah menunjukkan tren perbaikan yang konsisten. Hal ini menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan nilai kabupaten secara keseluruhan pada evaluasi berikutnya.

Maka penguatan diarahkan pada peningkatan kualitas cascading kinerja hingga level individu, penyempurnaan indikator outcome yang lebih terukur dan berbasis dampak, integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara lebih konsisten, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data.

Dengan pendekatan tersebut, peningkatan nilai SAKIP tidak hanya ditujukan untuk memenuhi target administratif kategori A, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan benar-benar berorientasi hasil dan berdampak bagi masyarakat.

Berdasarkan perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo serta capaian target akhir RPJMD tahun 2026 adalah AA, merupakan tantangan yang amat berat bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu Kabupaten Sidoarjo harus bekerja ekstra keras untuk mencapainya, perlu komitmen yang kuat dari setiap elemen yang ada, mulai pimpinan dan semua sumber daya yang dimiliki harus serius bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkannya. Kalau dibandingkan dengan nilai rata-rata Kabupaten/Kota secara Nasional sebesar 64,23, maka Kabupaten Sidoarjo masih unggul 11,41 poin.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan implementasi SAKIP, antara lain :

1. Membangun aplikasi PAKSI sebagai aplikasi e-SAKIP di Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SAKIP;
2. Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan SAKIP pada Pejabat Perencanaan Perangkat Daerah;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang sudah dibuat setiap triwulan dengan aplikasi e-Money;
4. Melakukan evaluasi internal Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dengan mengacu Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021;
5. Memasukkan nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai salah satu bahan pertimbangan pemberian besaran TPP (Perbup Nomor 106 Tahun 2022);

6. Memberikan reward dan punishment bagi Perangkat Daerah atas nilai SAKIP yang dicapai.

### Indikator Kinerja II : Opini Atas Laporan BPK

Opini atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional auditor negara terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun tren capaian Opini atas Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 5 tahun terakhir, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Hasil Opini atas Audit BPK**

Tahun	Opini atas Audit BPK
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
<b>2025</b>	<b>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</b>

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Adapun upaya yang dilakukan agar dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu :

- ❖ Bimtek dan asistensi pengelolaan dan penatausahaan laporan keuangan secara berkala kepada seluruh pengelola keuangan pada seluruh OPD dan Desa/Kelurahan
- ❖ Bimtek dan asistensi penatausahaan aset daerah secara berkala
- ❖ Kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi lainnya terhadap pengelolaan keuangan

### Indikator Kinerja III : Survey Eksternal Persepsi Korupsi

Indikator Survey Eksternal Persepsi Korupsi belum dapat dihitung capaiannya sejak tahun 2021 dikarenakan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi nomor : B/324/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi (EPK) tidak rilis sedangkan yang rilis adalah Indeks

Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang selanjutnya pada saat penyusunan Renstra Tahun 2025, Indikator Persepsi Anti Korupsi (IPAK) berubah menjadi Indeks Integritas.

Indeks Integritas merupakan indeks yang diukur melalui Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan perolehan nilai sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Tren Capaian Kapabilitas APIP**

TAHUN	KAPABILITAS APIP
2021	75,49
2022	75,90
2023	75,30
2024	67,91
<b>2025</b>	<b>2,44</b>

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, diketahui bahwa terdapat perubahan format penilaian sehingga Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2025 dilaksanakan secara bertahap yaitu pada triwulan 4 tahun 2025 dan dilanjutkan pada triwulan 1 Tahun 2026 yang menyebabkan data tahun 2025 belum rilis.

Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 adalah level 2 (terstruktur) dengan skor 2,44. Hasil evaluasi ini menggunakan formulasi yang baru sebagaimana tertuang pada Surat Kepala BPKP Nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 tanggal 1 Desember 2025 hal Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sesuai dengan poin nomor 5 yang menyatakan perubahan juga terdapat pada kriteria dan deskripsi level kapabilitas APIP dalam peraturan baru, sehingga tingkatan level pada peraturan sebelumnya tidak setara dengan tingkatan level pada peraturan baru. Tambahan penjelasan pada nomor 6 pada surat tersebut bahwa penerapan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 ini dapat berdampak kepada potensi penurunan capaian level kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan level ini mengarah kepada level yang secara riil menunjukkan kapabilitas APIP dalam melakukan perbaikan tata Kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, serta pengendalian kekurangan, sehingga APIP dapat memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Tren capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.11**  
**Tren Capaian Kapabilitas APIP**

TAHUN	KAPABILITAS APIP
2021	Level 2 ( <i>Structured</i> )
2022	Level 3 ( <i>Integrated</i> )
2023	Level 3 ( <i>Integrated</i> )
2024	Level 3 ( <i>Integrated</i> )
2025	Level 2 ( <i>Structured</i> )

Adapun upaya yang telah dilakukan agar nilai Kapabilitas APIP lebih optimal, yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang berkaitan pengawasan berbasis risiko.
- Memuatkhirkan risk register yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

#### Indikator Kinerja IV : Status Kinerja LPPD

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu instrumen utama pengukuran kinerja tersebut adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang selanjutnya dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui mekanisme Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Dalam dua tahun terakhir sebelum Tahun 2024, kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan capaian yang sangat progresif di tingkat nasional.

**Tabel 2.12**  
**Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2025**

Tahun	Kepmendagri	Nilai	Status Kinerja	Peringkat
2022 (Kinerja Tahun 2021)	Nomor : 100.2.1.3-1109 Tahun 2023	3,6100	Tinggi	Ke-5 Nasional
2023 (Kinerja Tahun 2022)	Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023	3,7800	Tinggi	Ke-2 Nasional
2024 (Kinerja Tahun 2023)	Nomor : 100.2.1.7-2109 Tahun 2025	Tidak Dinilai		
<b>2025 (Kinerja Tahun 2024)</b>		<b>Belum Dimumkan</b>		

Pada Tahun 2022 (kinerja Tahun 2021), Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 3,6100 dengan status kinerja Tinggi dan menempati peringkat ke-5 nasional. Pada

Tahun 2023 (kinerja Tahun 2022), capaian tersebut meningkat dengan nilai 3,7800, tetap dalam kategori Tinggi, serta berhasil naik ke peringkat ke-2 nasional.

Peningkatan ini mencerminkan konsistensi penguatan tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian kinerja perangkat daerah, serta peningkatan kualitas pelaporan berbasis indikator yang terukur dan terverifikasi.

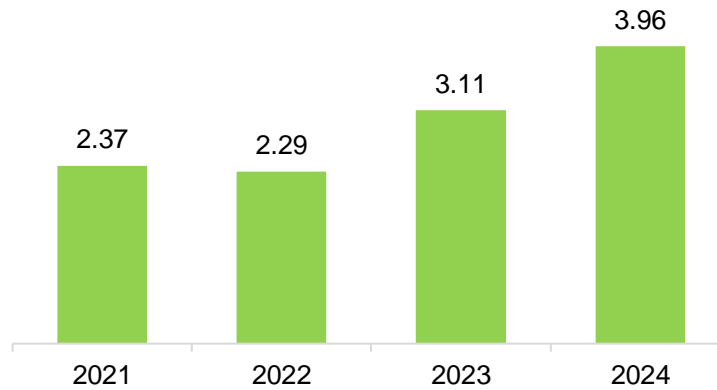
Adapun terhadap LPPD Tahun 2024 (Kinerja Tahun 2023), secara nasional proses evaluasi tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian, Kabupaten Sidoarjo tidak termasuk dalam daftar daerah yang dilakukan penilaian pada tahun tersebut dikarenakan Pimpinan Daerah tersangkut kasus hukum. Kondisi ini merupakan bagian dari dinamika administratif yang terjadi pada periode pelaporan. Meskipun tidak terdapat hasil pemeringkatan untuk Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024, Pemerintah Daerah tetap melaksanakan seluruh tahapan penyusunan LPPD secara lengkap, sistematis, dan sesuai regulasi. Proses pengumpulan data, validasi capaian indikator, serta konsolidasi pelaporan lintas perangkat daerah tetap berjalan secara tertib dan profesional. Untuk LPPD Tahun 2025, belum ada Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai penilaian atas LPPD.

Selanjutnya untuk hasil evaluasi dan pemeringkatan nasional atas kinerja Tahun 2024 yang dilaporkan tahun 2025 akan diumumkan oleh Pemerintah Pusat bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah di Tahun 2026.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk menjaga kesinambungan sistem pengukuran kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mempertahankan standar capaian kinerja tinggi yang telah diraih pada periode sebelumnya.

#### **Indikator Kinerja V : Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu : Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata Kelola dari birokrasinya, Keandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

**Grafik 2.8****Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 4,10. Namun, berdasarkan pada Surat Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Nomor B/38/PD.03/2025 tanggal 4 Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak termasuk dalam lokus pelaksanaan pemantauan SPBE Tahun 2025. Selain itu, dalam Surat Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025, dimana dilakukan penguatan kebijakan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdigi).

**Indikator Kinerja VI : Indeks Inovasi Daerah**

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembaruan dan kreativitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Indeks ini dihitung berdasarkan laporan inovasi daerah yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

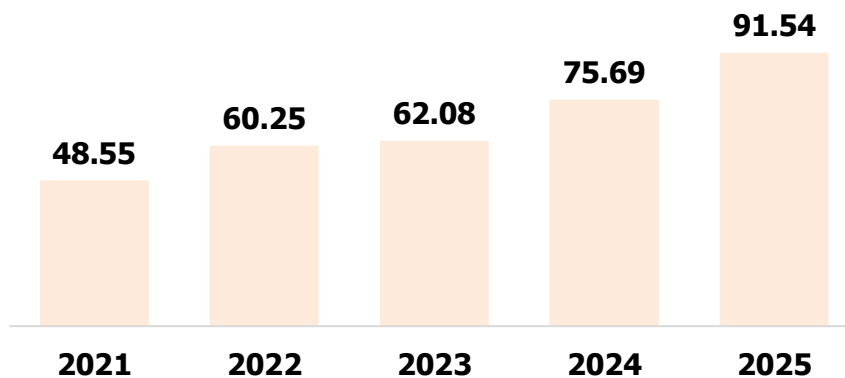
Pada tahun 2025 indeks inovasi daerah di targetkan mendapatkan predikat Sangat Inovatif dan berdasarkan hasil penilaian indeks inovasi daerah tahun 2025, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan kategori Sangat Inovatif. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan kategori Sangat Inovatif berturut-turut.

**Tabel 2.13****Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025**

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Target</b>	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
<b>Realisasi</b>	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Kepmendagri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025

**Grafik 2.9**  
**Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025**



Sumber: Kepmendagri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2021 nilai indeks sebesar 48,55 dan meningkat menjadi 60,25 pada Tahun 2022. Kenaikan tersebut berlanjut pada Tahun 2023 menjadi 62,08 serta mengalami peningkatan yang lebih signifikan pada Tahun 2024 menjadi 75,69. Pada Tahun 2025, indeks kembali meningkat hingga mencapai 91,54.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menghasilkan dan mengimplementasikan inovasi penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan nilai indeks secara berkelanjutan mencerminkan komitmen daerah dalam mendorong pembaruan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

#### **Indikator Kinerja VII : Tingkat Maturitas SPIP**

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control. Fokus penilaian SPIP ada 5 (lima) unsur yaitu :

1. Unsur Lingkungan Pengendalian
2. Unsur Penilaian Resiko
3. Unsur Aktivitas Pengendalian
4. Unsur Informasi dan Komunikasi

## 5. Unsur Pemantauan Pengendalian Internal

Tabel 2.14

## Capaian Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025

Tahun	Level Maturitas SPIP
2021	Terdefinisi
2022	Terdefinisi
2023	Terdefinisi
2024	Terdefinisi
<b>2025</b>	<b>Terdefinisi</b>

Sumber: Hasil Evaluasi SPIP oleh BPKP Provinsi Jawa Timur, 2025

Tabel 2.15

## Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/(Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,981	3,265	(0,716)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,094	2,952	(1,142)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,090	2,724	(1,366)

Sumber: Hasil Evaluasi SPIP oleh BPKP Provinsi Jawa Timur, 2025

Adapun upaya yang telah dilakukan agar dapat pengendalian intern optimal, yaitu antara lain :

- ❖ Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi SPIP
- ❖ Meningkatkan kualitas pengawasan melalui reuiu, evaluasi, dan pendampingan terhadap manajemen risiko tidak hanya pada tataran operasional tetapi pada tataran sasaran strategis OPD.
- ❖ Melaksanakan sosialisasi dan implementasi secara masif terkait kegiatan anti korupsi yang mencakup tiga hal yaitu cegah, deteksi, dan respon.

### Sasaran II: Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.

#### Indikator Kinerja VIII : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator strategis yang mencerminkan kualitas tata kelola pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. IPP tidak hanya menilai kepatuhan administratif terhadap standar pelayanan, tetapi juga mengukur konsistensi implementasi, kualitas sarana dan prasarana, efektivitas sistem informasi pelayanan, mekanisme konsultasi dan pengaduan, serta inovasi yang dihadirkan dalam pelayanan publik.

Bagi pemerintah daerah, IPP menjadi representasi langsung persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap kinerja aparatur. Oleh karena itu, capaian IPP tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan tingkat profesionalisme, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan yang berfokus pada kebutuhan publik.

Berikut ini merupakan target dan realisasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2025.

**Tabel 2.16**

**Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target P-RKPD 2025	Realisasi	Ketercapaian dengan PRKPD 2025
Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,66	4,55 (A) Pelayanan Prima	97,64%

Sumber : Kepmenpan RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025

Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 sebesar 4,55 dan tetap berada pada Kategori A (Sangat Baik) yaitu Pelayanan Prima. Meskipun terdapat selisih 0,11 poin dari target tahunan yang bersifat akseleratif, posisi Kabupaten Sidoarjo tidak mengalami perubahan kategori dan tetap berada dalam kelompok daerah dengan kualitas pelayanan publik yang tinggi.

Perlu dicermati bahwa pada Tahun 2025 terdapat penyesuaian metodologi evaluasi dari Kementerian PANRB, termasuk peningkatan cakupan lokus penilaian minimal 25 persen dari seluruh organisasi penyelenggara pelayanan publik. Perluasan cakupan ini membuat penilaian menjadi lebih komprehensif dan berbasis representasi yang lebih luas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dengan standar evaluasi yang lebih ketat tersebut, capaian kategori A menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga secara sistemik.

**Tabel 2.17**

**Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pelayanan Publik	%	A	A	A	4,65 (A)	4,55 (A)

Sumber : Kepmenpan RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Sidoarjo secara konsisten mempertahankan predikat A. Konsistensi ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan publik telah berjalan stabil dan berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Ke depan, fokus penguatan diarahkan pada pemerataan kualitas layanan di seluruh unit pelayanan, percepatan digitalisasi, integrasi sistem pengaduan masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur pada unit yang masih berada pada kategori B dan C. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan IPP tidak hanya ditargetkan dari sisi angka, tetapi juga dari sisi kualitas pengalaman pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Adapun untuk pengukuran Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah sebagaimana Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/591/438.3.1.3/2025 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, berikut hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 :

**Tabel 2.18**

**Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI	KET
<b>KATEGORI KHUSUS ROLE MODEL</b>				
1	RSUD Notopuro	4,842	A	Pelayanan Prima
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,817	A	Pelayanan Prima
3	Dinas Sosial	4,519	A	Pelayanan Prima
4	DPMPTSP	4,398	A-	Sangat Baik
<b>KATEGORI PERANGKAT DAERAH TEKNIS (DINAS)</b>				
1	Dinas Tenaga Kerja	4,772	A	Pelayanan Prima
2	RSUD SIBAR	4,755	A	Pelayanan Prima
3	Dinas Kesehatan	4,567	A	Pelayanan Prima
4	DLHK	4,410	A-	Sangat Baik
5	Dinas Pangan dan Pertanian	4,305	A-	Sangat Baik
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4,232	A-	Sangat Baik
7	Dinas Perikanan	4,207	A-	Sangat Baik
8	Dinas Pendidikan	4,168	A-	Sangat Baik
9	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4,107	A-	Sangat Baik
10	Dinas Kominfo	4,106	A-	Sangat Baik
11	Dinas Perhubungan	4,091	A-	Sangat Baik
12	Dinas PPPA dan KB	4,056	A-	Sangat Baik
13	Dinas PMD	4,052	A-	Sangat Baik
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4,039	A-	Sangat Baik

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI	KET
15	Dinas Perkim CKTR	4,018	A-	Sangat Baik
16	Dinas PU Bina Marga dan SDA	4,010	A-	Sangat Baik
17	Dinas Pemuda, OR Dan Pariwisata	3,521	B	Baik
18	Satpol PP	3,076	B-	Baik (Dengan Catatan)
<b>KATEGORI PERANGKAT DAERAH PENUNJANG (Badan, Sekretariat dan Inspektorat)</b>				
1	Sekretariat Daerah	4,314	A-	Sangat Baik
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4,273	A-	Sangat Baik
3	Badan Kepegawaian Daerah	4,240	A-	Sangat Baik
4	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4,192	A-	Sangat Baik
5	Inspektorat Daerah	4,153	A-	Sangat Baik
6	Badan Pelayanan Pajak Daerah	4,044	A-	Sangat Baik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,760	B	Baik
8	Sekretariat DPRD	3,687	B	Baik
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,256	B-	Baik (Dengan Catatan)
<b>KATEGORI KECAMATAN</b>				
1	Kecamatan Gedangan	4,614	A	Pelayanan Prima
2	Kecamatan Waru	4,363	A-	Sangat Baik
3	Kecamatan Prambon	4,361	A-	Sangat Baik
4	Kecamatan Sukodono	4,299	A-	Sangat Baik
5	Kecamatan Tulangan	4,269	A-	Sangat Baik
6	Kecamatan Sidoarjo	4,258	A-	Sangat Baik
7	Kecamatan Krian	4,212	A-	Sangat Baik
8	Kecamatan Taman	4,205	A-	Sangat Baik
9	Kecamatan Jabon	4,174	A-	Sangat Baik
10	Kecamatan Krembung	4,165	A-	Sangat Baik
11	Kecamatan Porong	4,162	A-	Sangat Baik
12	Kecamatan Candi	4,135	A-	Sangat Baik
13	Kecamatan Balongbendo	4,088	A-	Sangat Baik
14	Kecamatan Sedati	4,075	A-	Sangat Baik
15	Kecamatan Tarik	3,693	B	Baik
16	Kecamatan Buduran	3,572	B	Baik
17	Kecamatan Tanggulangin	3,496	B-	Baik (Dengan Catatan)
18	Kecamatan Wonoayu	3,302	B-	Baik (Dengan Catatan)
<b>KATEGORI PUSKESMAS</b>				
1	Puskesmas Porong	4,757	A	Pelayanan Prima
2	Puskesmas Tulangan	4,744	A	Pelayanan Prima
3	Puskesmas Sidoarjo	4,658	A	Pelayanan Prima
4	Puskesmas Tarik	4,609	A	Pelayanan Prima
5	Puskesmas Candi	4,592	A	Pelayanan Prima
6	Puskesmas Prambon	4,576	A	Pelayanan Prima
7	Puskesmas Balong Bendo	4,565	A	Pelayanan Prima
8	Puskesmas Jabon	4,564	A	Pelayanan Prima

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI	KET
9	Puskesmas Wonoayu	4,549	A	Pelayanan Prima
10	Puskesmas Tanggulangin	4,548	A	Pelayanan Prima
11	Puskesmas Buduran	4,543	A	Pelayanan Prima
12	Puskesmas Kedungsolo	4,535	A	Pelayanan Prima
13	Puskesmas Urangaung	4,535	A	Pelayanan Prima
14	Puskesmas Ganting	4,533	A	Pelayanan Prima
15	Puskesmas Kepadangan	4,417	A-	Sangat Baik
16	Puskesmas Sedati	4,414	A-	Sangat Baik
17	Puskesmas Tarik 2	4,371	A-	Sangat Baik
18	Puskesmas Sekardangan	4,366	A-	Sangat Baik
19	Puskesmas Gedangan	4,330	A-	Sangat Baik
20	Puskesmas Krembung	4,259	A-	Sangat Baik
21	Puskesmas Krian	4,258	A-	Sangat Baik
22	Puskesmas Taman	4,241	A-	Sangat Baik
23	Puskesmas Sukodono	4,224	A-	Sangat Baik
24	Puskesmas Trosobo	4,192	A-	Sangat Baik
25	Puskesmas Waru	4,133	A-	Sangat Baik
26	Puskesmas Wonokasian	4,116	A-	Sangat Baik
27	Puskesmas Medaeng	4,085	A-	Sangat Baik
28	Puskesmas Tambakrejo	4,041	A-	Sangat Baik
29	Puskesmas Sidodadi	4,034	A-	Sangat Baik
30	Puskesmas Barengkrajan	3,205	B-	Baik (Dengan Catatan)
<b>KATEGORI KELURAHAN</b>				
1	Kelurahan Sepanjang	4,433	A-	Sangat Baik
2	Kelurahan Bulusidokare	4,411	A-	Sangat Baik
3	Kelurahan Celep	4,231	A-	Sangat Baik
4	Kelurahan Sekardangan	4,228	A-	Sangat Baik
5	Kelurahan Kemasari	4,214	A-	Sangat Baik
6	Kelurahan Pucanganom	4,210	A-	Sangat Baik
7	Kelurahan Sidokare	4,116	A-	Sangat Baik
8	Kelurahan Ketegan	4,075	A-	Sangat Baik
9	Kelurahan Urangagung	4,061	A-	Sangat Baik
10	Kelurahan Kalijaten	4,042	A-	Sangat Baik
11	Kelurahan Sidokumpul	3,885	B	Baik
12	Kelurahan Lemahputro	3,865	B	Baik
13	Kelurahan Tambakkemerakan	3,813	B	Baik
14	Kelurahan Taman	3,804	B	Baik
15	Kelurahan Geluran	3,803	B	Baik
16	Kelurahan Porong	3,748	B	Baik
17	Kelurahan Ngelom	3,554	B	Baik
18	Kelurahan Gebang	3,553	B	Baik
19	Kelurahan Juwetkenongo	3,476	B-	Baik (Dengan Catatan)
20	Kelurahan Bebekan	3,334	B-	Baik (Dengan Catatan)
21	Kelurahan Cemengkalang	3,323	B-	Baik (Dengan Catatan)

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI	KET
22	Kelurahan Magersari	3,305	B-	Baik (Dengan Catatan)
23	Kelurahan Sidoklumpuk	3,229	B-	Baik (Dengan Catatan)
24	Kelurahan Pucang	3,172	B-	Baik (Dengan Catatan)
25	Kelurahan Krian	3,139	B-	Baik (Dengan Catatan)
26	Kelurahan Wonocolo	3,110	B-	Baik (Dengan Catatan)
27	Kelurahan Pekauman	3,079	B-	Baik (Dengan Catatan)
28	Kelurahan Gedang	2,666	C	Cukup
<b>KATEGORI BUMD</b>				
1	BPR DELTA ARTHA	3,709	B	Baik
2	PERUMDA DELTA TIRTA	2,947	C	Cukup
3	PT.ANEKA USAHA (PERSERODA)	2,880	C	Cukup

Hasil evaluasi pada tabel di atas, menunjukkan bahwa mayoritas unit pelayanan publik Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori A dan A-, termasuk sejumlah unit yang memperoleh predikat Pelayanan Prima. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya terpusat pada perangkat daerah tertentu, tetapi telah terdistribusi secara relatif merata hingga tingkat kecamatan dan puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.

Unit yang masih berada pada kategori B dan C telah teridentifikasi secara jelas sebagai area penguatan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memosisikan hasil evaluasi ini sebagai peta perbaikan yang konstruktif, bukan sekadar penilaian administratif. Dengan pendekatan pembinaan terarah, peningkatan kapasitas aparatur, dan integrasi digitalisasi layanan, kualitas pelayanan publik diharapkan semakin merata dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 menegaskan bahwa sistem pelayanan publik Kabupaten Sidoarjo tetap berada pada kategori sangat baik secara nasional. Perbedaan tipis terhadap target tahunan tidak mengubah posisi struktural kualitas layanan, melainkan menjadi momentum penguatan untuk mencapai standar pelayanan yang semakin tinggi pada periode berikutnya.

Pelayanan publik merupakan wajah utama Pemerintah Daerah di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten, terukur, dan

transparan, sehingga kepercayaan publik tetap terpelihara dan reformasi birokrasi berjalan secara nyata.

**f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo, disusun program-program Pembangunan yang menjadi prioritas. Program prioritas ini merupakan langkah percepatan untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan. Adapun Program Prioritas yang menjadi agenda Pembangunan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT
8. 20.000 UMKM Naik Kelas
9. Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan
10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu
11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorir
12. Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi
14. Tingkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sejahtera
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat
16. Reformasi Perijinan untuk Bisnis yang Kondusif
17. Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah.

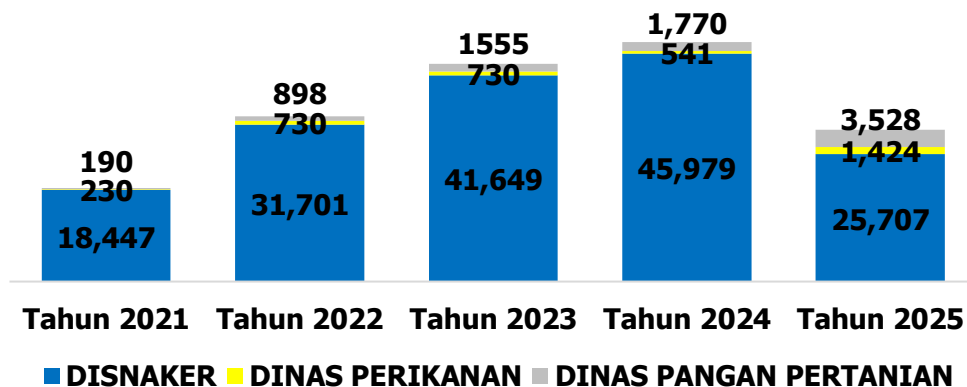
**1. 100.000 Lapangan Kerja Baru**

Program prioritas ini diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja baru, baik melalui pengembangan wirausaha baru hasil pelatihan kerja, maupun melalui penempatan tenaga kerja pada berbagai kesempatan kerja, seperti lowongan usaha, bursa kerja, dan perjanjian kerja. Adapun akumulasi capaian pelaksanaan hingga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.19**  
**Capaian Program 100.000 Lapangan Kerja Baru Tahun 2021-2025**

Indikator Program Prioritas	OPD	2021	2022	2023	2024	2025		Akumulasi
						Target	Realisasi	
Jumlah lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja bagi penduduk Kabupaten Sidoarjo	DISNAKER	18.447	31.701	41.649	45.979	*	25.707	163.483
Jumlah lapangan kerja baru pada sektor perikanan	DINAS PERIKANAN	230	730	730	541	768	1.424	3.655
Jumlah lapangan kerja baru pada sektor pertanian	DINAS PANGAN PERTANIAN	190	898	1555	1.770	3.533	3.528	7.941

**Grafik 2.10**  
**Program Prioritas 100.000 Lapangan Kerja Baru Tahun 2021-2025**



Program prioritas ini dilaksanakan oleh tiga perangkat daerah yaitu:

- Dinas Tenaga Kerja, dan
- Dinas Perikanan, dan
- Dinas Pangan dan Pertanian

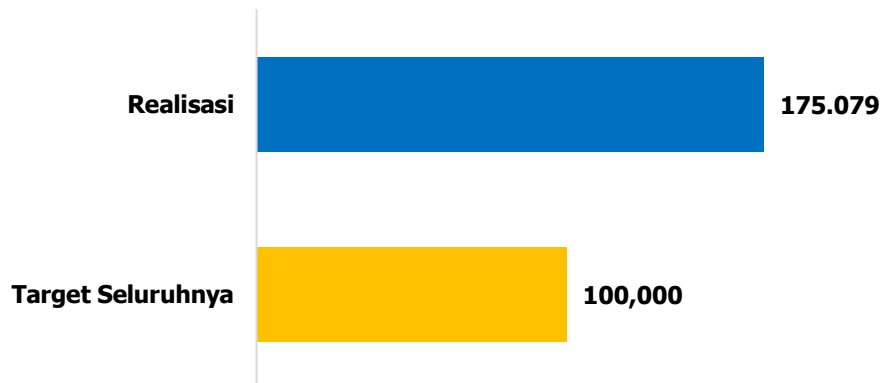
Berdasarkan data jumlah lapangan kerja baru pada periode Tahun 2021–2025, terlihat tren peningkatan yang signifikan dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024. Jumlah

lapangan kerja baru meningkat dari 18.447 pada Tahun 2021 menjadi 31.701 pada Tahun 2022, kemudian terus bertambah menjadi 41.649 pada Tahun 2023 dan mencapai puncaknya pada Tahun 2024 sebesar 45.979. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas berbagai program penciptaan dan penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Namun, pada Tahun 2025 terjadi penurunan jumlah lapangan kerja baru menjadi 25.707.

Pada sektor perikanan, jumlah lapangan kerja baru menunjukkan pola fluktuatif, yaitu 230 pada Tahun 2021, meningkat menjadi 730 pada Tahun 2022 dan tetap pada angka yang sama pada Tahun 2023, kemudian menurun menjadi 541 pada Tahun 2024, dan kembali meningkat secara signifikan pada Tahun 2025 menjadi 1.424. Sementara itu, sektor pangan dan pertanian menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yaitu 190 pada Tahun 2021, meningkat menjadi 898 pada Tahun 2022, bertambah menjadi 1.555 pada Tahun 2023, 1.770 pada Tahun 2024, dan mencapai 3.528 pada Tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor primer dalam mendukung penciptaan lapangan kerja serta memperkuat struktur ketenagakerjaan daerah.

**Grafik 2.11**

**Capaian Pelaksanaan Program Prioritas 100.000 Lapangan Kerja Baru Sampai dengan Tahun 2025**



Adapun dari target penciptaan sebanyak 100.000 lapangan kerja baru, realisasi hingga Tahun 2025 telah mencapai 175.079 lapangan kerja baru, sehingga program prioritas ini berhasil melampaui target. Pencapaian tersebut turut tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang menurun dari 6,49 persen pada Tahun 2024 menjadi 5,75 persen pada Tahun 2025, menunjukkan perbaikan kondisi pasar kerja serta efektivitas pelaksanaan kebijakan penciptaan lapangan kerja.

## 2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga

Program prioritas ini diarahkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo melalui kepesertaan BPJS Kesehatan, sekaligus memastikan kemudahan dan pemerataan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pembiayaan kesehatan masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan penduduk, serta mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

**Tabel 2.20**

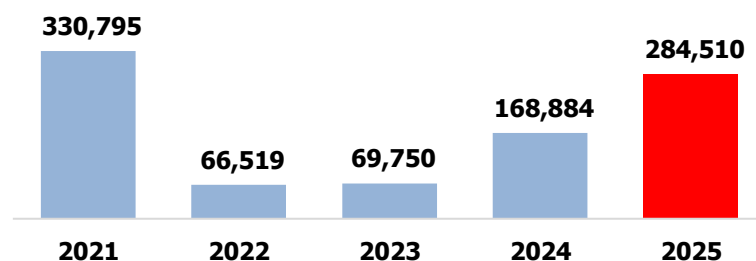
**Capaian Program BPJS Kesehatan Gratis Tahun 2021-2025**

Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	2021	2022	2023	2024	2025
BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga	Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan gratis selama satu tahun dalam satuan orang	330.795	66.519	69.750	168.884	284.510

Berdasarkan data capaian Program BPJS Kesehatan Gratis pada periode Tahun 2021–2025, jumlah penerima manfaat menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 330.795 peserta, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2022 dan 2023 masing-masing menjadi 66.519 dan 69.750 peserta. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh proses penyesuaian data kepesertaan, verifikasi dan validasi peserta, serta perubahan skema pembiayaan dan kebijakan nasional. Selanjutnya, pada Tahun 2024 jumlah peserta kembali meningkat secara signifikan menjadi 168.884 orang dan terus mengalami lonjakan pada Tahun 2025 hingga mencapai 284.510 peserta. Peningkatan ini menunjukkan penguatan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat serta semakin optimalnya pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Gratis guna menjamin akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh warga Kabupaten Sidoarjo.

**Grafik 2.12**

**Program BPJS Kesehatan Gratis Tahun 2021-2025**



Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Implementasi berbagai program prioritas, termasuk perluasan jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, telah memberikan dampak nyata terhadap perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sidoarjo yang secara konsisten mengalami tren positif, dari 74,06 tahun pada Tahun 2021 menjadi 75,63 tahun pada Tahun 2024, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 hingga mencapai 76,08 tahun. Peningkatan UHH ini mengindikasikan semakin efektifnya intervensi sektor kesehatan dalam menurunkan risiko kematian, meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

### 3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin

Program prioritas ini diarahkan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam bentuk pemberian makanan dan minuman gratis kepada penduduk miskin yang termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lansia. Program ini bertujuan untuk menjamin kecukupan gizi, menjaga ketahanan fisik, serta meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, program prioritas ini didukung oleh Dinas Sosial, yang berperan dalam pendataan sasaran, penyaluran bantuan, serta pengawasan agar bantuan diterima secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

**Tabel 2.21**

#### **Gratis Makan Tiap Hari Warga Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2025**

<b>Program Prioritas</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin	730 orang per hari 2 kali makan	730 orang per hari 2 kali makan	800 orang per hari 2 kali makan	800 orang per hari 2 kali makan

Sebanyak 800 penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo telah menerima bantuan makanan bergizi lengkap secara gratis dengan frekuensi dua kali sehari dan nilai bantuan sebesar Rp15.000 per porsi. Pelaksanaan program ini berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan serta penguatan ketahanan pangan rumah tangga miskin. Keberhasilan kinerja tersebut turut tercermin pada penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan tren menurun secara konsisten, dari 5,93 persen pada Tahun 2021 menjadi 4,53 persen pada Tahun 2024, dan kembali

menurun pada Tahun 2025 hingga mencapai 4,40 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa intervensi perlindungan sosial berbasis pemenuhan kebutuhan dasar efektif dalam mendukung upaya percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

#### 4. 10.000 Beasiswa Kuliah

Program prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Pemberian beasiswa difokuskan pada kelompok sasaran strategis, yaitu pemuda berprestasi, mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan, serta mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan, mendorong peningkatan prestasi akademik dan nonakademik, serta memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan tingkat pendidikan.

Beasiswa diberikan kepada tiga kelompok sasaran utama, yaitu:

1. Mahasiswa dari keluarga miskin;
2. Mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang keagamaan; dan
3. Mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik.

**Tabel 2.22**

#### Capaian Pelaksanaan 10.000 Beasiswa Kuliah Sampai dengan Tahun 2025

Target	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
Jumlah mahasiswa miskin yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	497 Orang	493 Orang	502 Orang	500 Orang	500 Orang
Jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang
Jumlah mahasiswa berprestasi bidang keagamaan yang menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	357 Orang	650 Orang	497 Orang	500 Orang	500 Orang
Jumlah mahasiswa berprestasi yang berkuliah di luar negeri, menerima bantuan biaya pendidikan tinggi	-	-	14 Orang	10 Orang	7 Orang

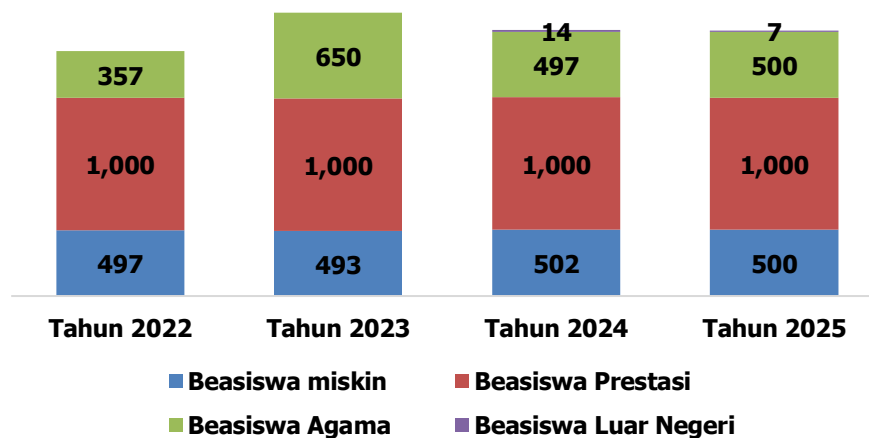
Pelaksanaan program prioritas ini dilaksanakan oleh 3 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Sosial, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pada Tahun 2025, target pemberian beasiswa kuliah sebesar 2.010 beasiswa, namun realisasi diberikan pada 2.007 orang. Hal ini dikarenakan hanya 7 orang yang dapat lulus seleksi untuk pemberian beasiswa pendidikan tinggi di luar negeri.

Keberhasilan program prioritas 10.000 beasiswa kuliah ini berdampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Tahun 2021 mencapai 80,65 dan pada Tahun 2025 mencapai 83,35 dan peningkatan rata-rata lama sekolah dari Tahun 2021 sebesar 10,72 menjadi 10,94 di Tahun 2025. Angka merupakan angka tertinggi untuk Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, pemberian beasiswa untuk tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut.

**Grafik 2.13**  
**Pemberian Beasiswa**



**Grafik 2.14**  
**Realisasi Pemberian Beasiswa Sampai Dengan Tahun 2025**



Adapun dari target yang ditetapkan sebanyak 10.000 Beasiswa, sampai dengan Tahun 2025 sudah diberikan sebanyak 8.017 Beasiswa, sehingga masih terdapat selisih 1.983 Beasiswa.

## 5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama

Program prioritas ini diarahkan untuk memperkuat pembangunan karakter dan nilai-nilai keagamaan masyarakat Kabupaten Sidoarjo melalui peningkatan kesejahteraan Guru Ngaji dan Guru Agama. Pemberian insentif atau tambahan penghasilan dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas peran strategis guru keagamaan dalam pembinaan moral, akhlak, dan spiritual masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keberlanjutan pengabdian, serta kualitas pembelajaran keagamaan, sehingga berdampak pada penguatan kehidupan sosial yang religius, harmonis, dan berkarakter di Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 2.23**

### **Realisasi Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025**

<b>Program Prioritas</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Akumulasi</b>
Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama	8.351	9.677	10.023	10.564	7.810	38.615

Berdasarkan data pelaksanaan Program Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama pada periode Tahun 2021–2025, jumlah penerima manfaat menunjukkan kecenderungan meningkat dari 8.351 orang pada Tahun 2021 menjadi 9.677 orang pada Tahun 2022, dan terus bertambah menjadi 10.023 orang pada Tahun 2023 serta 10.564 orang pada Tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperluas jangkauan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan guru keagamaan.

Pada Tahun 2025, jumlah penerima manfaat Program Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama tercatat sebanyak 7.810 orang, yang terdiri atas 5.623 Guru TPQ, 250 Guru Agama, serta 1.937 Guru Madrasah Diniyah (Ula dan Wustha). Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima merupakan pendidik keagamaan tingkat dasar nonformal yang memiliki peran strategis dalam pembinaan nilai-nilai keagamaan sejak usia dini. Penyaluran insentif kepada berbagai jenjang dan jenis pendidik keagamaan tersebut mencerminkan pendekatan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat keberlanjutan pendidikan keagamaan di Kabupaten Sidoarjo.

Secara kumulatif, hingga Tahun 2025 program ini telah menjangkau 38.615 Guru Ngaji dan Guru Agama, yang berkontribusi pada penguatan peran pendidikan keagamaan serta pembentukan karakter dan nilai-nilai religius masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

**6. Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan**

Program ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro mandiri melalui pemberdayaan perempuan sebagai penggerak usaha mikro dengan pemberian modal usaha, yaitu dengan Program KURMA (Kartu Usaha Perempuan Mandiri). Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.24**

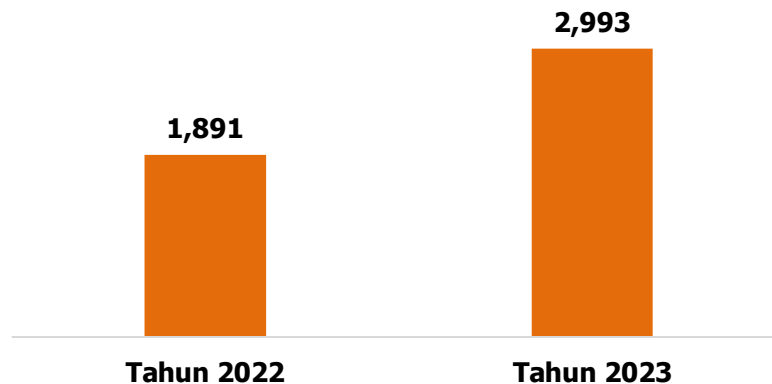
**Realisasi Program Prioritas Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan**

Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024
18.891 kelompok	2.993 kelompok	2.000 kelompok

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

**Grafik 2.15**

**Jumlah Penerima Program KURMA**



Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan monitoring tahun sebelumnya, mulai Tahun 2024 Program KURMA tidak dilaksanakan.

**7. Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT**

Prioritas Rp 6 Juta Operasional Bagi RT ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga Desa/Kelurahan melalui peran aktif RT dengan memberikan anggaran operasional.

Capaian pelaksanaan Program Prioritas Rp 6 Juta Operasional Bagi RT Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

Tabel 2.25

## Insentif RT/RW di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

Bulan	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah RT dan RW	Insentif RT	Insentif RW	Total Insentif RT RW
Januari	8.029	1.895	9.924	4.014.500.000	947.500.000	4.962.000.000
Februari	8.038	1.898	9.936	4.019.000.000	949.000.000	4.968.000.000
Maret	8.040	1.899	9.939	4.020.000.000	949.500.000	4.969.500.000
April	8.042	1.899	9.941	4.021.000.000	949.500.000	4.970.500.000
Mei	8.036	1.901	9.937	4.018.000.000	950.500.000	4.968.500.000
Juni	8.039	1.900	9.939	4.019.500.000	950.000.000	4.969.500.000
Juli	8.039	1.900	9.939	4.019.500.000	950.000.000	4.969.500.000
Agustus	8.040	1.900	9.940	4.020.000.000	950.000.000	4.970.000.000
September	8.036	1.897	9.933	4.018.000.000	948.500.000	4.966.500.000
Oktober	8.035	1.895	9.930	4.017.500.000	947.500.000	4.965.000.000
November	8.043	1.898	9.941	4.021.500.000	949.000.000	4.970.500.000
Desember	8.043	1.897	9.940	4.021.500.000	948.500.000	4.970.000.000
<b>Total</b>				<b>48.230.000.000</b>	<b>11.389.500.000</b>	<b>59.619.500.000</b>

Pada tahun anggaran 2025, alokasi insentif diberikan untuk seluruh RT dan RW se Kabupaten Sidoarjo, dengan memberikan insentif Rp 500.000,00 setiap bulan.

## 8. 20.000 UMKM Naik Kelas

Program prioritas ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar mampu naik kelas dan berdaya saing. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian pembinaan dan pelatihan yang terintegrasi, meliputi peningkatan kapasitas manajerial, kualitas produk, akses pembiayaan, perluasan pasar, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi usaha. Program ini bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi kerakyatan, meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku usaha, serta mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2.26

## 20.000 UMKM Naik Kelas Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025

Program Prioritas	OPD	2021	2022	2023	2024	2025	AKUMULASI
20.000 UMKM Naik Kelas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.664	4.633	4.284	5.377	5.317	21.275
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	900	901	220	460	2.481
	TOTAL	1.664	5.533	5.185	5.597	5.777	23.756

Capaian program UMKM Naik Kelas di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perkembangan yang dinamis dalam kurun waktu Tahun 2021–2025. Pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 1.664 UMKM yang naik kelas, kemudian meningkat signifikan pada Tahun 2022 menjadi 4.633 UMKM dan 900 IKM. Pada Tahun 2023 terjadi sedikit penurunan pada kelompok UMKM menjadi 4.284 UMKM dan 901 IKM, dan kembali meningkat pada Tahun 2024 menjadi 5.377 UMKM dan 220 IKM. Sementara itu, pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 5.317 UMKM dan 460 IKM yang berhasil naik kelas. Secara umum, tren tersebut menunjukkan adanya penguatan pembinaan dan pendampingan UMKM dan IKM secara berkelanjutan meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu.

**Grafik 2.16**

**Target dan Realisasi 20.000 UMKM Naik Kelas Kabupaten Sidoarjo**



Secara kumulatif sampai dengan Tahun 2025, jumlah UMKM yang naik kelas telah mencapai 23.756 yang terdiri dari 21.275 UMKM dan 2.481 IKM, melampaui target yang ditetapkan sebesar 20.000 UMKM. Capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, daya saing, serta akses pasar dan pembiayaan. Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama perekonomian daerah dan pendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

## **9. Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan**

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang memadai di Kabupaten Sidoarjo melalui: betonisasi jalan, pembangunan jalan pendamping (frontage road), pembangunan fly over, peningkatan sarana prasarana perhubungan, dan lain sebagainya. Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### **Tahun 2021**

Uraian Kegiatan	Realisasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	1.290 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	16.132,20 meter
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Review RTBL Kawasan Mix Use Lingkar Timur Review RTBL Kota Baru PUZZLE A Review RTBL Kawasan Kota Lama	3 Dokumen

**Tahun 2022**

Uraian Kegiatan	Realisasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	3.003,9 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	23.305 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	17 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	837 titik
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan REVIEW RTBL Koridor Jalan Raya Buduran REVIEW RTBL Koridor Jalan Raya Sidoarjo-Candi REVIEW RTBL Lingkar Barat	3 Dokumen

**Tahun 2023**

Uraian Kegiatan	Realisasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	1.093 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	24.950,72 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	10 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	848 titik
Pembangunan Fly Over	Fly Over Juanda Fly Over Krian Fly Over Tarik
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan RTBL Kawasan Peruntukkan Industri Jabaran Kecamatan Balongbendo RTBL Kawasan Watutulis Kecamatan Prambon RTBL Kawasan Pilang Kec. Wonoayu	3 Dokumen

**Tahun 2024**

Uraian Kegiatan	Realisasi
-----------------	-----------

Uraian Kegiatan	Realisasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	2.391 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	28.909,55 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	17 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	420 titik
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan RTBL Kecamatan Prambon RTBL Kawasan Wonoayu Kecamatan Wonoayu RTBL Kawasan Minapolitan Kecamatan Candi	3 Dokumen

### **Target Tahun 2025**

Uraian Kegiatan	Target
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	700 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	11.333 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	6 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	604 titik
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan RTBL Kecamatan Prambon (Lanjutan) RTBL Kawasan Wonoayu Kecamatan Wonoayu (Lanjutan) RTBL Kawasan Minapolitan Kecamatan Candi (Lanjutan)	3 Dokumen

### **Realisasi Tahun 2025**

Uraian Kegiatan	Realisasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Ruas Waru – Buduran	10 meter
Panjang Jalan Kabupaten yang dibetonisasi	16.776 meter
Jumlah titik pembangunan dan/atau pengembangan jalan pengurai kemacetan	6 titik
Jumlah titik pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun	604 titik
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan RTBL Kecamatan Prambon (Lanjutan) RTBL Kawasan Wonoayu Kecamatan Wonoayu (Lanjutan) RTBL Kawasan Minapolitan Kecamatan Candi (Lanjutan)	3 Dokumen

Pelaksanaan Program Prioritas dilaksanakan oleh :

- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air;

- Dinas Perhubungan;
- Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya Indeks Infrastruktur, yang pada Tahun 2025 mencapai 0,860 mengalami peningkatan yang tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang berada pada angka 0,793.

#### **Pembangunan Frontage Road Waru – Buduran**

Total Lahan yang telah dibebaskan adalah 20.181 m<sup>2</sup>, dengan rincian per tahunnya sebagai berikut :

**Tabel 2.27**

#### **Pembebasan Lahan Frontage Tahun 2021-2025**

<b>Pembebasan Lahan Frontage</b>	
Tahun 2021	4.772 m <sup>2</sup>
Tahun 2022	5.637 m <sup>2</sup>
Tahun 2023	9.654 m <sup>2</sup>
Tahun 2024	59 m <sup>2</sup>
Tahun 2025	1.191 m <sup>2</sup>

Total dari Tahun 2021 s.d Tahun 2025 telah dibangun Frontage Road sepanjang 7.7787,9 meter, dengan rincian pembangunan sebagai berikut :

**Tabel 2.28**

#### **Rincian Pembangunan Tahun 2021-2025**

<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Realisasi 2025</b>
1.290 meter	3.003,9 meter	1.093 meter	2.391 meter	700 meter	10meter

#### **Betonisasi Jalan**

Dari Tahun 2021 s.d Tahun 2025 telah dilakukan Pembangunan Betonisasi Jalan sepanjang 110.073,47 meter, dengan rincian pembangunan sebagai berikut:

**Tabel 2.29**

#### **Rincian Pembangunan Betonisasi Jalan Tahun 2021-2025**

<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Realisasi 2025</b>
16.132,20 meter	23.305 meter	24.950,72 meter	28.909,55 meter	8.469 meter	16.776 meter

Adapun pembangunan betonisasi jalan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

#### **Tahun 2021**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
1	Peningkatan Jalan RT.4 dan 8 Desa Tambak Oso	Waru	181,60	4,00
2	Peningkatan Jalan Ruas jalan Banjarasri dari KUD Mina Dwisamudra ke Timur – Banjar Asri	Tanggulangun	250,00	5,00
3	Peningkatan Jalan Desa Tambak Sumur	Waru	259,70	7,00
4	Peningkatan Jalan Ngaban – Kedung Banteng (LJT)	Tanggulangun	602,50	5,00
5	Peningkatan Jalan Ganting – Wage (Desa Bohar) (LJT)	Gedangan - Taman	925,00	4,00
6	Peningkatan Jalan Betro – Damarsi (Desa Kwangsan) Ruas No 047	Sedati	968,00	5,00
7	Peningkatan Jalan Betro – Kalanganyar (LJT) (DAK)	Sedati	980,00	6,00
8	Peningkatan Jalan Kebon Agung – Kemasari (LJT)	Sukodono	1721,00	6,00
9	Peningkatan Jalan Wonoplintahan - Jedongcangkring	Prambon	2026,30	6,00
10	Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Road Waru Buduran	Waru Buduran	1580,00	Segmen 1a : 15; Segmen 1b : 15-10 ; Segmen 2a : 10; Segmen 2b-2d : 4,1 (kiri), 3,9(kanan)
11	Peningkatan Jalan Taruna Desa Wage	Taman	515,00	5,50
12	Peningkatan Jalan Jeruk s/d Jl. Mangga Desa Wage	Taman	352,00	4,00
13	Peningkatan Jalan Dsn Suko Legok RT 15 RW 05 Desa Suko	Sukodono	225,00	5,00
14	Peningkatan Jalan Kebon Agung – Sukodono (LJT) Pajak Rokok	Sukodono	676,00	7,00
15	Peningkatan Jalan Gedangan – Betro (LJT)	Gedangan	518,00	9,00
16	Peningkatan Jalan Mandala RW.04 dan RW.05 Desa Semambung	Gedangan	564,00	4,00
17	Pembangunan Jalan RW.5 - 6 Desa Semambung - Gedangan - Semambung	Gedangan	146,20	4,00
18	Peningkatan Jalan Tenggulunan - Sugihwaras ( 085 ) - Tenggulunan	Candi	437,50	4,00
19	Peningkatan Jalan Pilang – Sawo Cengkring (Pajak Rokok)	Wonoayu	750,00	5,00
20	Peningkatan Jalan Krembung - Kepadangan (LJT)	Krembung Tulangan	445,00	7,00
21	Peningkatan jalan Ds. Tebel s/d Ds. Kragan – Tebel	Gedangan	456,00	4,00
22	Peningkatan Jalan A. Yani	Waru	200,00	3,00

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
	depan Balai desa Medaeng			
23	Peningkatan Jalan Aryo Bebangah (Desa Bangah RW 01, 03, 04)	Gedangan	262,00	5,50
24	Peningkatan jalan Sepanjang jalan mangga s/d jl gadung desa wage	Taman	116,90	4,00
25	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarasri s/d Sentul - Sentul	Tanggulangun	765,50	5,00
26	Peningkatan Jalan Wadungasri - Tambaksumur	Waru	209,00	5,00
<b>TOTAL JALAN BETON 2021</b>			<b>16.132,20</b>	<b>3,90 – 9,00</b>

**Tahun 2022**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
1	Ruas Jalan Pawindo – Jaticalang	Krian	639,00	5,5;11,33
2	Ruas Jalan Tulangan – Kepadangan, Kepadangan – Bulang, Simpang Tiga Tulangan	Tulangan	6.335,00	8,00
3	Ruas Jalan Betro - Kalanganyar (DAK)	Tulangan	922,40	6,00
4	Ruas Jalan Pilang - Tulangan	Tulangan	1020,10	8;6
5	Ruas Jalan Kebonagung - Kemas	Sedati	5.099,50	6,00
6	Ruas Jalan Pabean - Wadungasri	Tulangan	532,00	6;8;9
7	Ruas Jalan Krian - Kemangsen	Sukodono	476,20	7,00
8	Ruas Jalan Pabean - Ngingas	Sedati	835,00	5,00
9	Ruas Jalan Wonoayu - Candinegoro	Krian	875,00	5,00
10	Ruas Jalan Panjunan - Suko (DAK)	Waru	1.855,60	3,50-4,00
11	Ruas Jalan Panjunan - Suko	Wonoayu	556,00	4,00
12	Ruas Jalan Krembung - Kepadangan	Sukodono	469,80	7,00
13	Ruas Jalan Semambung - Sedatigede (Ljt)	Sukodono	302,50	4,00
14	Ruas Jalan Tenggulunan - Sugihwaras ( Ljt )	Krembung	217,40	3,5-3,9
15	Ruas Jalan Durungbedug - Sidodadi	Gedangan	887,20	5,00
16	Jalan Akses Ex Tol Menuju Tlocor	Candi	150,36	7;8
17	Ruas Jalan Sidorejo - Barengkrajan	Candi	576,9	8;10
18	Ruas Jalan Desa Tambak Sawah RT.03 RT.04 Rw.02,	Jabon	1.969,00	5,00

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
	Kab. Sidoarjo, Waru, Tambaksawah			
19	Ruas Jalan Masanganwetan Menuju Dusun Wagir, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Masanganwetan	Gedangan - Buduran	502,00	5,00
20	Ruas Jalan Sepanjang Jalan RT 13, 14, 15, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Suko	Krian	133,00	3,50
21	Ruas Jalan Sepanjang Jalan Suko RT 15 RW 05, Kab. Sidoarjo, Sukodono, Suko	Waru	118,75	5,51
22	Pembangunan Gorong-Gorong Desa Kali Tengah RT.01 RW.01, Kab. Sidoarjo, Tanggulangin, Kalitengah	Sukodono	105,00	5,50
23	Jalan Desa Tulangan-Medalem, Kab. Sidoarjo, Tulangan, Tulangan, Seluruh Kelurahan/Desa	Sukodono	205,00	4,00
24	Jalan Dusun Sangangewu RT 04 RW 01, Kab. Sidoarjo, Tanggulangin	Sukodono	318,30	3,00
25	Jalan Masanganwetan RT 03 Menuju Masangankulon, Kab. Sidoarjo, Masanganwetan	Tanggulangin	183,50	3,52
26	Jalan Ngingas, Waru	Tulangan	81,40	4,03
27	Ruas Jalan Gedangan - Betro	Tanggulangin	924,00	3,20
28	Peningkatan Jalan Gedangan-Betro (Pemenang Kedua)	Sukodono	531,00	8,00
<b>TOTAL JALAN BETON 2022</b>			<b>26.820,91</b>	<b>3 – 11,33</b>

**Tahun 2023**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
1	Peningkatan Jalan Kwangsan (Ljt)	Sedati	sgmn1 =475 sgmn2 =391,5	5,00
2	Peningkatan Jalan Banjarsari – Damarsi	Buduran	1.833,42	5,00
3	Peningkatan Jalan Tulangan - Durungbedug	Candi	1.597,70	4,00
4	Peningkatan Jalan Tropodo I	Waru	933,50	4,00
5	Peningkatan Jalan Krembung – Mojaruntut (DAK)	Krembung	sgmn1 =1251,2 sgmn2 =791,3 (aspal), 100,7 (rigid)	5,6
6	Peningkatan Jalan Banjarpanji, Tanggulangin	Tanggulangin	950,00	4,50
7	Peningkatan Jalan Geluran – Suko	Taman	sgmn 1 =1057,1 sgmn2 =498,3	4; 4,4; 6; 7

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
8	Peningkatan Jalan Bringinbendo – Tanjungsari (DAK)	Taman	705.,5	5,00
9	Peningkatan Jalan Tarik – Mirip	Tarik	5.698,8	5,00
10	Peningkatan Jalan Desa Krembangan Kab. Sidoarjo (Ulang)	Taman	29,00	5,00
11	Peningkatan Jalan Semambung I Kab. Sidoarjo	Wonoayu	128,00	
12	Juwetkenongo – Krembung (Realisasi IJD PJBH JS 2 2023)	Krembung	Krembung 2 = 4+150 S/D 9+578 = 5,428 meter Krembung 1 = 1+383 s/d 4+150 dan 9+578 s/d 10+684 = 3873 meter	7,50
<b>TOTAL JALAN BETON 2023</b>			<b>24.950,72</b>	<b>3,04 - 8,00</b>

**Tahun 2024**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
1	Peningkatan Jalan Bakungpringgondani – Penambangan (DAK)	Balongbendo	2.523,10	4,00 - 5,00
2	Peningkatan Jalan Banjarsari, Tanggulangin	Tanggulangin	1.017,60	5,00
3	Peningkatan Jalan Banjarsari - Dukuhtengah (LJT)	Buduran	1.886,00	3,04 - 6,5
4	Peningkatan Jalan Barengkrajan - Ngelom (DAK)	Krian	2.450,00	5,00
5	Peningkatan Jalan Bringinbendo - Sidodadi	Taman	856,00	3,70 - 4,00
6	Peningkatan Jalan Candinegoro - Terungkulon	Wonoayu	1.961,75	5,00
7	Peningkatan Jalan Desa Bakungpringgodani	Balongbendo	893,70	4,00
8	Peningkatan Jalan Dukuhsari - Semambung	Jabon	1.731,00	STA 0+000- 0+350 = 4,50 STA 0+350- 1+700 = 5,00
9	Peningkatan Jalan dusun delik desa seduri s/d dusun girang desa wonokupang	Balongbendo	1.994,70	3,70 - 4,00
			784,53	4,00
10	Peningkatan Jalan Kludan - Tulangan	Tulangan	1.280,70	8,00
11	Peningkatan Jalan Masanganwetan - Sukodono	Sukodono	2.620,00	6,00

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
	(DAK)			
12	Peningkatan Jalan Modong - Grabagan (DAK)	Tulangan	3.521,50	3,10 - 4,00
13	Peningkatan Jalan Pabean - Semampir (Jalan. KH. Husein)	Sedati	537,87	3,70 - 5,00
14	Peningkatan Jalan Pilang - Sawocangkring	Wonoayu	1.339,40	5,00
15	Peningkatan Jalan Tebel - Gemurung	Gedangan	937,00	4,00
16	Peningkatan Jalan Wage (Jalan Jeruk dan Jalan Mangga)	Taman	Panjang = 83,7m (Mangga S1), 392,2 (Mangga S2), 378,8 (Jeruk)	4,00
		Gedangan		
17	Peningkatan Jalan Wonoplintahan - Jedongcangkring (LJT)	Prambon	1.720,00	6,00
<b>TOTAL JALAN BETON 2024</b>			<b>28.909,55</b>	<b>3,04 - 8,00</b>

### Tahun 2025

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
1	Gedangan – Betro	800	7	1
2	Buduran – Sidokepong	814	4 – 6	2
3	Kureksari – Kepuhkiriman	1,317	4,4 – 5	3
4	Wadungasri – Tambaksawah	1,565	4 – 5	4
5	Kalanganyar – Segorotambak	1,950	4 – 5	5
6	Pabean – Ngingas	1,842	4 – 5	6
7	Jl. Zainal Abidin (Kec. Waru)	361	5	7
8	Jl. Anusapati (Kec. Waru)	550	5	8
9	Jl. Anggrek & Jl. Tanjung (Kec. Waru)	282	3,5 – 4,2	9
10	Tambakrejo – Tambaksawah	171	5	10
11	Kedungrejo – Wadungasri	1,028	7 – 7,5	11
12	Sidodadi – Bringinbendo	2,496	4	12
13	Banjarkemantren – Prasung (Lingkar Timur)	3,600	7	13
<b>TOTAL JALAN BETON 2025</b>			<b>16.776</b>	

Dengan semakin masifnya pembangunan betonisasi jalan, maka persentase jalan dengan kondisi mantap di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2025 mencapai angka 95,87%. Angka tersebut masih akan terus naik dengan adanya target betonisasi jalan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026, yang antara lain meliputi :

**Target 2026**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
1	KRIAN (RPH) - KEMANGSEN (BALDES)	KRIAN	7	450
2	KEBONAGUNG - TAMBAK KEMERAKAN (Ljt) (Ruas Kebonagung - Kemas)	SUKODONO	6	1,100
3	KEDUNGTURI - KEDUNGTURI (Ruas Wage - Kedungturi)	TAMAN	5	650
4	GEDANGAN - BETRO (Ljt)	GEDANGAN	7,00 - 8,00	820
5	TAMBAKCEMANDI - TAMBAKOSO	SEDATI	6	1,505
6	BLURUKIDUL (LINGKAR TIMUR) - SIDOKLUMPUK	SIDOARJO	5	1,680
7	Depan SMP 2 Tanggulangin (Ruas Ngaban - Kedungbanteng)	TANGGULANGIN	5	475
<b>TOTAL JALAN BETON 2025</b>				<b>6,68</b>

**10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu**

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan program peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader posyandu. Program prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui pemberian honorarium bulanan serta pembinaan secara berkelanjutan kepada tenaga kesehatan dan kader posyandu. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi, kompetensi, dan kinerja petugas kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, khususnya pada layanan promotif dan preventif di tingkat masyarakat.

**Tabel 2.30**

**Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu  
Tahun 2021–2025**

TAHUN	KADER POSYANDU	TENAGA KESEHATAN
2021	606	0
2022	7.198	133
2023	12.579	210
2024	12.633	185
<b>2025</b>	<b>12.794</b>	<b>204</b>

Berdasarkan data pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu pada periode Tahun 2021–2025, jumlah penerima honorarium menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, khususnya pada kader posyandu. Pada Tahun 2021, pemberian honorarium menjangkau 606 kader posyandu. Sejak Tahun 2022, cakupan program diperluas secara substansial, dengan peningkatan jumlah kader posyandu penerima honorarium menjadi 7.198 orang, serta pemberian honorarium kepada 133 tenaga kesehatan. Tren peningkatan berlanjut pada Tahun 2023 dan 2024, di mana jumlah kader posyandu meningkat menjadi 12.579 orang dan 12.633 orang, sementara penerima dari unsur tenaga kesehatan masing-masing mencapai 210 orang dan 185 orang. Pada Tahun 2025, cakupan program kembali meningkat dengan menjangkau 12.794 kader posyandu dan 204 tenaga kesehatan. Peningkatan jumlah penerima ini mencerminkan penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kesejahteraan petugas layanan kesehatan dasar, yang berperan penting dalam mendukung pelayanan promotif dan preventif serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

#### 11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan program peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Swasta, dan Tenaga Honorer. Program prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja tenaga pendidik serta tenaga pendukung pendidikan melalui pemberian honorarium bulanan dan insentif, sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis mereka dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Peningkatan kesejahteraan tersebut diharapkan dapat mendorong stabilitas tenaga kerja di sektor pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendukung pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 2.31**

#### **Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta dan Tenaga Honorer Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025**

<b>Program Prioritas</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Akumulasi</b>
Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta dan Tenaga Honorer	12.834	9.837	13.206	11.455	10.989	47.332

Berdasarkan data pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer pada periode Tahun 2021–2025, jumlah penerima manfaat menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 12.834 orang penerima, kemudian menurun pada Tahun 2022 menjadi 9.837 orang. Selanjutnya, jumlah penerima kembali meningkat pada Tahun 2023 hingga mencapai 13.206 orang, sebelum mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 11.455 orang dan 10.989 orang pada Tahun 2025. Secara kumulatif, hingga Tahun 2025 program ini telah menjangkau 47.332 orang, yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga pendukung pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan daerah.

## 12. Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dengan memfasilitasi kreativitas para pemuda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dalam bidang sains, olahraga, maupun seni budaya.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.32**

### Kegiatan Program Prioritas Yourt Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda

Urusan Kegiatan	Target	Realisasi
Jumlah kegiatan pengembangan kreativitas kepemudaan yang dilakukan per tahun	8	8
Jumlah dan jenis kelompok kepemudaan yang dibina	2	2
Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun / ditingkatkan	1	0

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kegiatan pengembangan kreativitas kepemudaan yang dilakukan pada tahun 2025 mencapai 8 kegiatan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 8 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mendorong kreativitas pemuda telah berjalan optimal dan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan untuk jumlah dan jenis kelompok kepemudaan yang dibina juga mencapai 2 kelompok, sesuai dengan target yang ditetapkan yang mencerminkan keberhasilan dalam pembinaan dan penguatan kelembagaan kepemudaan sebagai wadah dalam partisipasi dan pemberdayaan generasi muda. Namun, pada indikator penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendukung yang dibangun/ ditingkatkan, dari target 1 unit yang ditargetkan, realisasi masih 0. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan atau peningkatan sarana prasarana belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga

menjadi catatan penting untuk di tindaklanjuti pada periode berikutnya guna mendukung keberlanjutan dan efektivitas program pengembangan kepemudaan secara lebih optimal.

**13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi**

Dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan program prioritas renovasi 2.000 warung rakyat. Program ini diarahkan untuk memberdayakan warung dan usaha perdagangan rakyat melalui pendampingan usaha, pemberian bantuan, serta renovasi sarana usaha guna meningkatkan kenyamanan, kelayakan, dan daya saing warung. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku usaha kecil, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat peran warung rakyat sebagai penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 2.33**

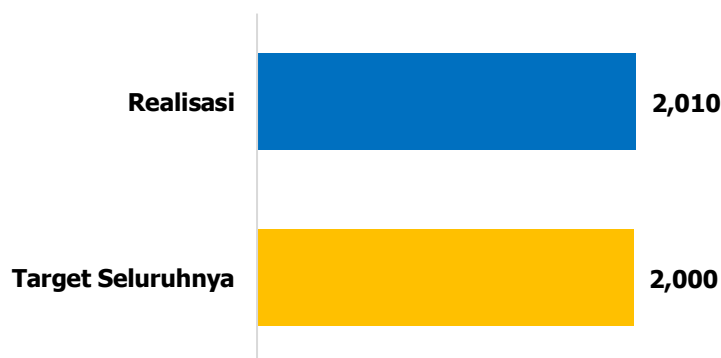
**2.000 Warung Rakyat Direnovasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2025**

Program Prioritas	2022	2023	2024	2025	Akumulasi
2.000 Warung Rakyat Direnovasi	393 Warung	422 Warung	395 Warung	800 Warung	2.010

Berdasarkan data pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat pada periode Tahun 2022–2025, jumlah warung yang mendapatkan pendampingan dan renovasi menunjukkan capaian yang progresif. Pada Tahun 2022, program menjangkau 393 warung rakyat, kemudian meningkat menjadi 422 warung pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024, jumlah warung yang direnovasi relatif stabil sebanyak 395 warung, sebelum mengalami peningkatan signifikan pada Tahun 2025 dengan capaian 800 warung.

**Grafik 2.17**

**2.000 Warung Rakyat Direnovasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2025**



Secara kumulatif, hingga Tahun 2025 program ini telah merealisasikan renovasi terhadap 2.010 warung rakyat, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan yakni 2.000 warung rakyat di renovasi. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat usaha perdagangan rakyat melalui peningkatan kualitas sarana usaha, yang diharapkan berdampak pada peningkatan daya saing, keberlanjutan usaha kecil, serta penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.

#### 14. Tingkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Sejahtera

Dalam rangka memperkuat pembangunan desa dan mendorong peningkatan kemandirian desa, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan program prioritas peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD). Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas operasional pemerintahan desa serta mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga mampu mendorong peningkatan status desa menuju Desa Mandiri. Peningkatan ADD diharapkan dapat memperkuat tata kelola desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, serta mempercepat terwujudnya desa yang sejahtera dan berdaya saing.

**Tabel 2.34**

#### **Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025**

TAHUN	ADD SILTAP	ADD Bagi Hasil	Total
2021	120.061.733.364	12.528.833.443	132.320.566.807
2022	124.942.712.235	13.036.176.834	137.977.889.069
2023	126.403.322.463	13.200.275.437	139.603.597.900
2024	130.948.187.475	12.665.556.325	143.613.743.800
2025	129.764.800.000	20.970.665.700	150.735.465.700

Berdasarkan data transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten kepada desa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada periode Tahun 2021–2025, terlihat adanya tren peningkatan alokasi anggaran secara konsisten. Total anggaran yang ditransfer meningkat dari Rp132,32 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp137,98 miliar pada Tahun 2022, kemudian bertambah menjadi Rp139,60 miliar pada Tahun 2023 dan Rp143,61 miliar pada Tahun 2024, serta kembali meningkat pada 2025 hingga mencapai Rp150,74 miliar. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat kapasitas fiskal desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Ditinjau dari komposisinya, alokasi ADD SILTAP sebagai komponen utama pembiayaan operasional pemerintahan desa mengalami peningkatan dari Rp120,06 miliar pada

Tahun 2021 menjadi Rp130,95 miliar pada Tahun 2024, sebelum mengalami sedikit penyesuaian pada Tahun 2025 menjadi Rp129,76 miliar. Sementara itu, ADD Bagi Hasil menunjukkan fluktuasi pada periode 2021–2024, namun meningkat signifikan pada Tahun 2025 hingga mencapai Rp20,97 miliar. Kondisi ini mengindikasikan adanya penguatan dukungan fiskal desa melalui skema bagi hasil, yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi desa serta peningkatan status desa menuju Desa Mandiri di Kabupaten Sidoarjo.

**15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat**

Prioritas dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo melalui tindakan respon cepat terhadap pengaduan, serta peningkatan kualitas pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Pada Tahun 2022, telah dirilis Sidoarjo Call Center 112 untuk respon cepat bebas pulsa 24 jam penuh melayani pengaduan masyarakat. Capaian pelayanan Call Center 112 Sidoarjo sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.35**

**Capaian Pelayanan Call Center 112 Sidoarjo Sampai dengan Tahun 2025**

Indikator Program Prioritas	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
Jumlah layanan pengaduan yang disediakan		2	2	3
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	1.945 Pengaduan	2.311 Pengaduan	1.800 Pengaduan	4.397 Pengaduan

Dalam pelaksanaan program prioritas 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat, Bupati Sidoarjo didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Keberhasilan kinerja berdampak pada bertahannya capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo yang pada tahun 2025 berada pada kategori A (Prima).

**16. Reformasi Perizinan untuk Bisnis yang Kondusif**

Program Prioritas Reformasi Perizinan untuk Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif diarahkan untuk mendorong peningkatan investasi daerah melalui penyederhanaan dan kemudahan layanan perizinan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, sehingga tercipta kepastian usaha dan iklim bisnis yang lebih inklusif dan kompetitif.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36

## Program Prioritas Reformasi Perizinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai prosedur	Jumlah UM yang diberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan
Tahun 2021	-	78
Tahun 2022	1.611	300
Tahun 2023	1.158	300
Tahun 2024	1.507	750
Tahun 2025	804	730

Program prioritas ini dilaksanakan oleh dua perangkat daerah yaitu:

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Keberhasilan kinerja berdampak pada meningkatnya nilai investasi daerah, dimana pada Tahun 2025 Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp.18.887.629.765.950,-.

#### 17. Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Rebolusi Manajemen Sampah.

Prioritas Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui Revitalisasi RTH (Ruang Terbuka Hijau), Normalisasi Sungai dan Pengelolaan sampah secara terpadu.

Akumulasi capaian pelaksanaan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37

## Target Tahun 2024

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	1 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	975 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	25 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	4 titik

Tabel 2.38

## Realisasi Tahun 2024

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	Keterbatasan kompetensi penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan Taman Alun-alun sehingga mengalami gagal tender
Jumlah RTH yang direvitalisasi/ dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taman Tara (ASEAN)</li> <li>• Taman Segitiga exit tol</li> </ul>

Uraian Kegiatan	Capaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taman Fasum Pondok Mutiara</li> <li>Taman Abirupa Krian</li> <li>Taman Fasum Bumi Suko Indah</li> <li>Taman Fasum Puri Indah</li> <li>Taman Fasum Grand Aloha Regency</li> <li>Taman Fasum Wisma Perma</li> <li>Taman Fasum Omah Pesona Buduran</li> <li>Taman Fasum Citra Sentosa Mandiri</li> </ul>
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	913 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	25 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	4 titik

**Tabel 2.39**  
**Target Tahun 2025**

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	1 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	975 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	25 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	4 titik

**Tabel 2.40**  
**Realisasi Tahun 2025**

Uraian Kegiatan	Capaian
Jumlah RTH yang dibangun/ ditingkatkan	4 RTH
Jumlah/ volume sampah yang diolah (recycle)	824 ton/hari
Jumlah sarana prasarana irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	39 sarpras
Jumlah titik sungai yang direvitalisasi	4 titik

### **Perluasan PTH**

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2025 sebesar 32,72 hektar.

### **Revitalisasi Sungai**

Tingkat kebutuhan air untuk jaringan irigasi di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2025 mencapai 3295 Liter/Detik jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 3556 Liter/Detik maka mengalami penurunan sebesar 241 Liter/Detik yang sudah menunjukkan kecukupan. Selain daripada itu, prioritas dimaksud juga untuk mengendalikan banjir dan genangan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Adapun luasan genangan tertangani pada tahun 2025 adalah seluas 491 Ha,

meningkat dibanding tahun 2024 hanya sebesar 462 Ha. Hal tersebut terjadi peningkatan sebesar 29 ha.

Pada Tahun 2024, luas genangan banjir berhasil disusutkan menjadi 462 Ha, atau setara dengan 82% dari total kawasan rawan banjir. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah rawan banjir telah mendapatkan intervensi penanganan, meskipun masih terdapat beberapa titik genangan yang relatif besar, terutama di wilayah dengan karakteristik topografi rendah dan kepadatan saluran yang tinggi.

Selanjutnya pada tahun 2025, luas genangan kembali mengalami penurunan menjadi 491 Ha, dengan tingkat penanganan meningkat menjadi 87%. Peningkatan persentase ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja pengendalian banjir, baik melalui kegiatan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas drainase, pembangunan/optimalisasi rumah pompa, maupun pemeliharaan jaringan pengendali banjir secara berkelanjutan.

### **Revolusi Manajemen Sampah**

Pada tahun 2025 sampah yang terkelola dengan sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle) sebesar 824 ton/hari mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 913 ton per hari.

Penurunan ini tidak serta merta mencerminkan kemunduran, melainkan dapat menunjukkan adanya perubahan pola pengelolaan dan perilaku masyarakat, seperti meningkatnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya (reduce), pemanfaatan kembali (reuse), serta pemilahan yang lebih efektif. Dengan semakin kuatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurangi timbulan sampah sejak awal, volume sampah yang harus masuk ke sistem pengolahan 3R pun menjadi lebih terkendali sehingga mengalami peningkatan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa Revolusi Manajemen Sampah tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah sampah yang diolah, tetapi juga pada transformasi pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun volume sampah terkelola 3R pada 2025 lebih rendah dibandingkan 2024, hal tersebut tetap mencerminkan arah kebijakan yang semakin menekankan efisiensi, pengurangan timbulan, dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan.

### **PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2025**

Sehubungan dengan berakhirnya periode RPJMD Tahun 2021–2025 dan dimulainya periode RPJMD Tahun 2025–2029, terdapat masa transisi perencanaan

pembangunan daerah yang perlu dijelaskan dalam laporan ini. Pada periode RPJMD Tahun 2021–2025 telah ditetapkan 17 Program Prioritas sebagai fokus pembangunan daerah. Selanjutnya, pada RPJMD Tahun 2025–2029 ditetapkan 14 Program Unggulan yang menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan lima tahun ke depan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta memberikan gambaran komprehensif atas pelaksanaan program strategis daerah, dokumen ini tidak hanya memuat realisasi kinerja atas 17 Program Prioritas RPJMD Tahun 2021–2025, tetapi juga mencantumkan realisasi awal atas 14 Program Unggulan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan adanya kesinambungan kebijakan serta sinkronisasi antara periode perencanaan yang berakhir dan periode perencanaan yang baru dimulai.

Berikut merupakan kinerja 14 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 :

**Tabel 2.41**  
**Realisasi 14 Program Unggulan Tahun 2025**

PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025
100.000 Lapangan Kerja Baru	Dinas Tenaga Kerja	Peserta Pelatihan	1.000	973
		<b>Pagu</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>7.253.471.976</b>
	Dinas Tenaga Kerja	Peserta Job Fair, Job Matching & PKWT	15.000	22.577
		<b>Pagu</b>	<b>800.000.000</b>	<b>1.134.951.249</b>
	Dinas Pangan dan Pertanian	Peserta Pelatihan	450	3528
		<b>Pagu</b>	<b>562.500.000</b>	<b>6.318.691.179</b>
	Dinas Pendidikan	Peserta Pelatihan	-	-
		<b>Pagu</b>	-	-
	Dinas Perikanan	Peserta Pelatihan	350	964
		<b>Pagu</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>5.055.170.544,00</b>
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	WUB	-	-
		<b>Pagu</b>	-	-
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Peserta Pelatihan	-	-
		<b>Pagu</b>	-	-
Berobat Gratis Untuk Seluruh Warga Sidoarjo	Dinas Kesehatan	UHC	100%	100,44%
		<b>Pagu</b>	<b>95.027.944.947</b>	<b>106.193.927.148</b>
Makan Bergizi Gratis untuk Warga Miskin	Dinas Sosial	Penerima	800	800
		<b>Pagu</b>	<b>8.760.000.000</b>	<b>8.169.650.000</b>

PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025
dan Lansia				
20.000 Beasiswa Kuliah, SD, SMP, (SD-SMA Negeri) untuk Anak Yatim	Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata	Penerima	1.000	1.007
		<b>Pagu</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.331.959.394</b>
	Dinas Sosial	Penerima	1.000	500
		<b>Pagu</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penerima	1.500	0
		<b>Pagu</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>0</b>
Sekretariat Daerah	Penerima	500	500	
	<b>Pagu</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	
2.000 Pupuk dan Benih Gratis untuk Petani dan Nelayan	Dinas Perikanan	Pembudidaya	50	50
		<b>Pagu</b>	<b>50.000.000</b>	<b>3.775.000,00</b>
	Dinas Pangan dan Pertanian	Petani	1.950	1950
		<b>Pagu</b>	<b>800.000.000</b>	<b>1.102.293.500</b>
50 Juta Modal Usaha Mikro/UMKM	BPKAD/Bank Delta Artha	<b>UMKM</b>	<b>5.040.000.000</b>	<b>3.074.822.189</b>
500 Juta untuk Desa (BKK per Desa/Kelurahan + Insentif, BPD, LPMD, LPMK & Purna Kades)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Orang	-	-
		<b>Pagu</b>	-	-
	Kecamatan	Kelurahan	-	-
		<b>Pagu</b>	-	-
	BPKAD	Desa	-	-
<b>Pagu</b>		-	-	
20.000 UMKM Naik Kelas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	UMKM	3.850	5.317
		<b>Pagu</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>851.179.900</b>
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKM	150	150
		<b>Pagu</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.069.316.565</b>
Sidoarjo Membangun: Penataan Kota, Akses Jalan & Transportasi; PDAM Mudah dan Murah untuk Warga Sidoarjo; serta Bus Sekolah Gratis untuk Pelajar Sidoarjo	Dinas PU Bina Marga SDA	Km & Luas Genangan (ha)	8,5 & 471	13,176 & 491
		<b>Pagu</b>	<b>135.000.000.000</b>	<b>115.310.370.895,00</b>
	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Rumah Tangga	1226	979
		<b>Pagu</b>	<b>9.304.000.000</b>	<b>7.832.000.000</b>
	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Titik Lokasi	49	42
<b>Pagu</b>		<b>26.343.475.000</b>	<b>6.716.396.386</b>	

PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	
	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Km	64,8	131,58	
		<b>Pagu</b>	<b>9.803.596.500</b>	<b>20.255.571.000</b>	
	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Rumah	200	889	
		<b>Pagu</b>	<b>6.200.000.000</b>	<b>26.670.000.000</b>	
	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	SR Perkotaan	-	-	
		<b>Pagu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Dinas Perhubungan	Unit	-	Jasa Konsultansi Kajian Efektivitas Program Angkutan Sekolah Gratis	
		<b>Pagu</b>	<b>75.000.000</b>	<b>73.099.050</b>	
	Tunjangan Naik 100%: untuk Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu; dan GTT, Guru Swasta & Honorer, Insentif Guru Ngaji & Guru Agama Naik	Dinas Kesehatan	Tenaga kesehatan		
			<b>Pagu</b>		
Kader posyandu			12.794	12.794	
<b>Pagu</b>			<b>7.676.400.000</b>	<b>14.068.900.000</b>	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Guru ngaji & agama	-	-	
		<b>Pagu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Guru swasta	-	-	
		<b>Pagu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		GTT dan honorer	-	-	
		<b>Pagu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Membangun Pusat Kreativitas Anak Muda Sidoarjo	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Duta Wisata	346	146	
		<b>Pagu</b>	<b>500.000.000</b>	<b>120.971.000</b>	
		Event	4	15	
		<b>Pagu</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>4.342.920.656</b>	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lokasi	1	0	
		<b>Pagu</b>	<b>6.020.000.000</b>	<b>0</b>	
		Event	4	8	
		<b>Pagu</b>	<b>400.000.000</b>	<b>286.208.250</b>	
2.000 Renovasi Warung Rakyat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kegiatan	4	4	
		<b>Pagu</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	
	BPKAD	Warung	380	257	
		<b>Pagu</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>1.285.000.000</b>	
	Kecamatan	Warung	20	60	
		<b>Pagu</b>	<b>100.000.000</b>	<b>300.000.000,00</b>	
Perizinan	Dinas	Perusahaan	52	171	

PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025
Mudah untuk Bisnis Kondusif Melalui Program Smart City Sidoarjo	Penanaman Modal dan PTSP	<b>Pagu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Persentase perizinan yang diproses sesuai dengan ketentuan	100	100
		<b>Pagu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelatihan	-	-
		<b>Pagu</b>	-	-
Revitalisasi Taman Kota dan Perumahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kecamatan	4	4
		<b>Pagu</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.108.600.136</b>
	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Lokasi	-	-
		<b>Pagu</b>	-	-

Keterangan (-) : dilaksanakan mulai Tahun 2026

### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Tugas Pembantuan Pusat atau Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota diberikan untuk melaksanakan sebagian urusan pelaksanaan pemerintahan dalam lingkup daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun Program dan Kegiatan yang didapat dari Pemerintah Pusat berupa : Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Sedangkan untuk Penugasan, selama Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan tugas pembantuan secara eksplisit kepada Desa / Kelurahan, yang diberikan dalam bentuk bantuan stimulan Pembangunan Desa / Kelurahan, baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan pembangunan Desa / Kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat Desa / Kelurahan dalam proses pembangunan terus digalang melalui kegiatan Musrenbang.

## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND). Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif. Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

#### 4.1. Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

##### 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan antara lain :

**Tabel 4.1**

**Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan**

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
1	Pendidikan Dasar
2	Pendidikan Kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini

##### 4.1.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

**Tabel 4.2**

**Target Pencapaian Urusan Pendidikan**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		15Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)		
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2025
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2025

#### 4.1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Urusan Pendidikan**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	204423	204423	100 %	Jumlah Warga Kabupaten/Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) _____ Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-15Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5369	5369	100 %	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan _____ Jumlah Warga Kabupaten Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah
3	Pendidikan Anak Usia	Persentase (%) Jumlah Warga	Dinas Pendidikan dan	83819	83819	100 %	Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
	Dini	Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Kebudayaan				Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun

Adapun realisasi anggaran Bidang Urusan Pendidikan antara lain :

**Tabel 4.4**

**Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
-1	-2	-3	-4	-9	-10	-11
				655,399,077,247	612,687,269,637	93.48 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,609,989,000	1,555,901,097	96.64 %
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30,677,150,185	27,142,606,757	88.48 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	873,596,825	686,962,858	78.64 %
		4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	1,133,000,000	528,900,000	46.68 %
		5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	13,746,240	12,777,600	92.95 %
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	59,936,848,373	41,705,720,135	69.58 %
		7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,672,215,200	1,274,153,604	76.20 %
		8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8,139,357,700	8,115,305,000	99.70 %
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	248,295,700	228,687,500	92.10 %
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	572,793,037	537,226,795	93.79 %
		11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	89,133,447	78,620,000	88.20 %
		12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	31,058,649	30,997,500	99.80 %
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,854,686,856	1,787,504,390	96.38 %
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	83,200,000	71,875,000	86.39 %

		15	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3,827,996,500	3,612,793,590	94.38 %
		16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,038,160,800	766,706,295	73.85 %
		17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5,584,815,400	5,551,212,600	99.40 %
		18	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	375,008,766	370,793,375	98.88 %
		19	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	163,314,050	158,600,000	97.11 %
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	247,749,050	239,003,178	96.47 %
		21	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	431,043,950	290,724,100	67.45 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA			536,795,917,519	517,940,198,263	96%
	1.	4 2025 Pengeloan dana BOP PAUD 1202333		40,070,185,000.00	39,858,996,759.00	99.47 %
	2.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD 1202344		21,262,500.00	14,962,500.00	70.37 %
	3.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dasar 1202354		2,275,184,589.00	1,195,315,961.00	52.54 %
	4.	4 2025 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa sekolah dasar 1202360		375,652,393.00	354,058,500.00	94.25 %
	5.	4 2025 Pengelolaan dana BOS sekolah dasar 1202371		214,741,538,000.00	214,740,038,000.00	100.00 %
	6.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar 1202373		119,072,298.00	118,482,500.00	99.50 %
	7.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dasar 1202380		42,409,893,699.00	37,065,876,489.00	87.40 %
	8.	4 2025 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa sekolah menengah pertama 1202386		225,085,193.00	185,054,500.00	82.22 %
	9.	4 2025 Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama 1202392		180,811,708,600.00	180,547,078,600.00	99.85 %
	10.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama 1202398		31,452,900.00	30,767,500.00	97.82 %
	11.	4 2025 Sosialisasi dan advokasi kebijakan Pendidikan sekolah menengah pertama 1202403		51,391,350.00	21,757,000.00	42.34 %
	12.	4 2025 Penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan 1202408		4,232,820,000.00	4,232,760,000.00	100.00 %

13.	4 2025 Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan 1202410	41,861,207,700.00	30,568,555,000.00	73.02 %
14.	4 2025 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan 1202414	139,539,050.00	97,407,250.00	69.81 %
15.	4 2025 Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan 1202419	5,143,597,500.00	4,940,101,471.00	96.04 %
16.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP nonformal/kesetaraan 1202422	852,394,413.00	793,562,083.00	93.10 %
17.	4 2025 Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan 1202432	3,133,523,684.00	2,886,551,650.00	92.12 %
18.	4 2025 Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik nonformal/kesetaraan 1202436	54,408,650.00	54,122,500.00	99.47 %
19.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas pendidikan nonformal 1202440	246,000,000.00	234,750,000.00	95.43 %

#### 4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi anggaran Bidang Urusan Pendidikan antara lain:

**Tabel 4.5**  
**Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan**

No	MATA ANGGARAN		BESARAN ANGGARAN
			655,399,077,247
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,609,989,000
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30,677,150,185
	3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	873,596,825
	4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	1,133,000,000
	5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	13,746,240
	6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	59,936,848,373
	7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,672,215,200
	8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8,139,357,700

		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	248,295,700
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	572,793,037
		11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	89,133,447
		12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	31,058,649
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,854,686,856
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	83,200,000
		15	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3,827,996,500
		16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,038,160,800
		17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5,584,815,400
		18	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	375,008,766
		19	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	163,314,050
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	247,749,050
		21	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	431,043,950
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA			536,795,917,519
	1.	4 2025 Pengeloaan dana BOP PAUD 1202333		40,070,185,000.00
	2.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD 1202344		21,262,500.00
	3.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dasar 1202354		2,275,184,589.00
	4.	4 2025 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa sekolah dasar 1202360		375,652,393.00
	5.	4 2025 Pengelolaan dana BOS sekolah dasar 1202371		214,741,538,000.00
	6.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar 1202373		119,072,298.00
	7.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dasar 1202380		42,409,893,699.00
	8.	4 2025 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa sekolah menengah pertama 1202386		225,085,193.00
	9.	4 2025 Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama 1202392		180,811,708,600.00
	10.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama 1202398		31,452,900.00
	11.	4 2025 Sosialisasi dan advokasi kebijakan Pendidikan sekolah menengah pertama 1202403		51,391,350.00

12.	4 2025 Penyediaanbiayapersonilpesertadidik nonformal/kesetaraan 1202408	4,232,820,000.00
13.	4 2025 Pengembangankarirpendidik dan tenagakependidikan pada satuanpendidikan nonformal/kesetaraan 1202410	41,861,207,700.00
14.	4 2025 Pembinaankelembagaan dan manajemensekolah nonformal/kesetaraan 1202414	139,539,050.00
15.	4 2025 Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan 1202419	5,143,597,500.00
16.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP nonformal/kesetaraan 1202422	852,394,413.00
17.	4 2025 Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan 1202432	3,133,523,684.00
18.	4 2025 Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik nonformal/kesetaraan 1202436	54,408,650.00
19.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas pendidikan nonformal 1202440	246,000,000.00

#### 4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain:

**Tabel 4.6**

#### Dukungan Personil Urusan Pendidikan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH GEDUNG	JUMLAH KELAS	JUMLAH MURID	TENAGA PENGAJAR
1	Sekolah Dasar Negeri	463	4.055	103.218	5.832
2	Sekolah Dasar Swasta dan Sederajat	126	1.648	29988	2.203
3	Sekolah Menengah Pertama Negeri	46	1.362	41.261	1.976
4	Sekolah Menengah Pertama Swasta	146	1499	30.436	2.118
5	Sekolah PAUD Negeri	2	16	271	18
6	Sekolah PAUD Swasta	1.524	4.875	58.312	1.821

#### 4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan

eksternal maupun internal, dan Langkah Langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Pendidikan antara lain :

1. Dalam Proses Pengumpulan data :

Sumber data dari :

- a. Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
- b. Data kependudukan dari Dispendukcapil.
- c. Data Emis (Kemenag)

Terdapat beberapa permasalahan dari pengumpulan data, diantaranya;

- a. Data kependudukan yang diperlukan untuk menghitung APM, APK, APS berdasarkan klasifikasi usia PAUD 4-6 tahun, 5-6 tahun, SD sederajat 7-12 tahun, SMP sederajat 13-15 tahun, Kesetaraan 7-18 tahun. Data-data sesuai kriteria di atas tidak sesuai dengan aplikasi Dispendukcapil (SIAK)
- b. Data siswa dari Emis kemenag kita tidak mendapatkan akses, untuk mendapatkan data siswa RA, MI, MTs secara manual

2. Dalam Proses Penghitungan Kebutuhan :

Perhitungan kebutuhan berdasar Renstra OPD. Pagu anggaran bersifat dinamis disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (APBD)

3. Dalam Pelaksanaan kegiatan :

Pada pelaksanaan kegiatan seringkali terkendala faktor teknis, misal harus menyiapkan peraturan bupati, atau SK bupati yang memerlukan waktu untuk penyelesaiannya sehingga kegiatan menunggu hingga selesainya Perbub atau SK sebagai dasar pelaksanaan dan pencairan anggaran.

4. Dalam Perencanaan Dan Penganggaran :

Terjadinya perubahan kebijakan yang mempengaruhi perencanaan dan anggaran, sebagai contoh adanya rasionalisasi anggaran di tahun 2023 dan 2024, sehingga terdapat kegiatan yang harus ditunda ataupun tidak dilaksanakan. Pada sub kegiatan penerapan SPM banyak yang tidak sesuai dengan sub kegiatan pada DPA secara spesifik

#### 4.2. Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang SPM Bidang Kesehatan.

#### 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Kesehatan antara lain :

**Tabel 4.7**

#### Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV

#### 4.2.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

**Tabel 4.8**

#### Target Pencapaian Urusan Kesehatan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100%	2025

#### 4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan

membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan

**Tabel 4.9**  
**Realisasi Urusan Kesehatan**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	30947	31134	100%	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu Satu tahun yang sama
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	30947	31025	100%	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	29176	30885	100%	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	117736	118526	100%	Jumlah balita 0–59 bulan yang mendapat pelayanan Kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah balita 0–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	282660	295997	100%	Jumlah anak usia Pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan Pendidikan dasar Jumlah semua anak usia Pendidikan dasar kelas 1 dan 7

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
							yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	1391348	1466120	100%	Jumlah pengunjung usia 15 tahun ke atas mendapat pelayanan skrining Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	266597	270541	100%	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining Kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	156726	167120	100%	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	69784	71429	100%	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah penyandang DM berdasarkan angka revalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	4169	5325	100%	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjakab/kota yang mendapat pelayanan Kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
							tahun Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	28250	39862	100%	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	34098	37744	100%	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang berisikoterinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama

Adapun realisasi anggaran Bidang Urusan Kesehatan antara lain :

**Tabel 4.10**  
**Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO	10,612,840,658	9,156,107,603	86.27 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10,612,840,658	9,156,107,603	86.27 %
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237	10,612,840,658	9,156,107,603	86.27 %
	1 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3,932,782,500	3,899,755,108	99.16 %
	2 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	30,525,000	28,619,970	93.76 %
	3 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	211,422,500	207,317,770	98.06 %
	4 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Balita	28,782,005	26,197,680	91.02 %
	5 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	889,535,252	879,303,920	98.85 %
	6 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	20,528,500	19,347,470	94.25 %
	7 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	16,855,000	16,094,970	95.49 %
	8 Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	4,533,191	4,348,460	95.92 %

	9	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	14,750,000	14,719,970	99.80 %
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	407,845,750	405,451,720	99.41 %
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4,863,931,260	3,475,005,397	71.44 %
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	191,349,700	179,945,168	94.04 %
JUMLAH INDIKATOR			10,612,840,658	9,156,107,603	86.27 %

#### 4.2.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah.

Tabel 4.11

#### Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

No	MATA ANGGARAN		BESARAN ANGGARAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		10,612,840,658
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237	10,612,840,658
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
			3,932,782,500
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
			30,525,000
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
			211,422,500
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
			28,782,005
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			889,535,252
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
			20,528,500
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
			16,855,000
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
			4,533,191
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
			14,750,000
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
			407,845,750
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			4,863,931,260
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
			191,349,700

#### 4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Kesehatan antara lain :

**Tabel 4.12**

**Dukungan Personil Urusan Kesehatan**

	FASILITAS KESEHATAN	
	RS DI KABUPATEN SIDOARJO	PUSKESMAS
Jumlah Fasilitas	33RumahSakit	31Puskesmas
Dokter Umum	1224	143
Dokter Gigi	450	61
Dokter Spesialis	734	-
Perawat	3.202	509
Bidan	586	505
Apoteker dan Tenaga Kefarmasian	478	79
Tenaga umum/admin	2.421	541

#### 4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan Langkah Langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Kesehatan antara lain :

a. Dalam Proses Pengumpulan data :

Sumber data dari :

- a. Menggunakan data proyeksi yang telah dihitung oleh BPS dan diolah oleh Pusdatin Kemenkes RI)
- b. Data Riil yang di yakini benar

b. Dalam Proses Penghitungan Kebutuhan :

Penghitungan kebutuhan disesuaikan dengan data sasaran

Solusi yang akan dilaksanakan :

1. Meningkatkan kunjungan rumah kepada lansia dengan kemandirian C sesuai dengan pendataan yang telah dilaksanakan
2. Meningkatkan kerja sama dengan jejaring dengan memberikan format laporan kunjungan lansia untuk diisi setiap bulan dan dilaporkan kepuskesmas
3. Pada saat pelayanan posyandu dilakukan sosialisasi/Ojt tentang ceklis Pengkajian paripurna Pasien Geriatri (P3G) pada kader

### 4.3. Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

#### 4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain :

**Tabel 4.13**

#### Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

#### 4.3.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

**Tabel 4.14**

#### Target Pencapaian Urusan Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	100%	2025
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2025

#### 4.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

**Tabel 4.15**  
**Realisasi Urusan Pekerjaan Umum**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Penyebut	Pembilang	Nilai	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	PDAM Sidoarjo dan P2CKTR	24244	41288	100 %	Jumlah Rumah Warga yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari — Seluruh Rumah warga kabupaten
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air	21240	21563	100 %	Jumlah Rumah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air <u>Limbah domestik</u> — Seluruh Rumah warga kabupaten

Adapun Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

**Tabel 4.16**  
**Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO	52,096,433,280	42,129,708,816	80.87 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20,175,880,780	15,864,177,334	78.63 %
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638	20,175,880,780	15,864,177,334	78.63 %
1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	100,000,000	0	0%
2	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	122,838,700	0	0%
3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100,000,000	0	0%
4	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3,506,215,991	2,992,509,918	85.35 %
5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	17,5	0	0%

		(SPAM) JaringanPerpipaan			
	6	PerluasanSistemPenyediaan Air Minum (SPAM) JaringanPerpipaan	16,346,808,589	12,871,667,416	78.74 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		12,197,233,215	7,647,512,962	62.70 %
	1	Pengelolaan dan PengembanganSistem Air LimbahDomestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559	12,197,233,215	7,647,512,962	62.70 %
		PeningkatanInstalasiPengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	838,673,994	207,335,998	24.72 %
	2	Penyediaan Sub SistemPengolahan Air LimbahDomestik (SPALD) Setempat	11,358,541,721	7,440,176,964	65.50 %
	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalamPengembanganSistemPengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD)	17,5	0	0%
	4	PenyusunanRencana, Kebijakan, Strategi dan TeknisSistemPengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD)	0	0	0%
KEGIATAN LAINNYA					
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA				
	1.	PerluasanJaringan Pipa Distribusi	17,535,000,000	16,904,276,750	96.40 %
	2.	BiayaPajak dan Pemeliharaan Kendaraan BJP PDAM	779,653,665	305,076,150	39.13 %
	3.	Operasional BBM KendaraanTangki BJP PDAM	358,665,620	358,665,620	100.00 %
	4.	Pembangunan Sanitasi oleh Kelompok SANIMAS	1,050,000,000	1,050,000,000	100.00 %

#### 4.3.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah.

Tabel 4.17

#### Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

No	MATA ANGGARAN	BESARAN ANGGARAN
	KAB. SIDOARJO	52,096,433,280
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20,175,880,780
	1 Pengelolaan dan PengembanganSistemPenyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638	20,175,880,780

	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	100,000,000
	2	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	122,838,700
	3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100,000,000
	4	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3,506,215,991
	5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	17,5
	6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	16,346,808,589
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		12,197,233,215
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559	12,197,233,215
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	838,673,994
	2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	11,358,541,721
	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	17,5
	4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0
3			
	1.	Perluasan Jaringan Pipa Distribusi	17,535,000,000
	2.	Biaya Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan BJP PDAM	779,653,665
	3.	Operasional BBM Kendaraan Tangki BJP PDAM	358,665,620
	4.	Pembangunan Sanitasi oleh Kelompok SANIMAS	1,050,000,000

#### 4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

**Tabel 4.18**

#### Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Dukungan Personil	KET
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	6 PNS 4 PPPK PENUH WAKTU 2 PPPK PARUH WAKTU 2 Konsultan Individu	P2CKTR

		656 NON PNS	PDAM
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	6 PNS 4 PPPK PENUH WAKTU 2 PPPK PARUH WAKTU 2 Konsultan Individu	P2CKTR

#### 4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah - langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum antara lain :

Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
  - a. Data layanan SPAM Pedesaan belum terdata dalam RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum).
  - b. Data Lokasi Prioritas Layanan SPALD-S/ SPALD-T belum terdata dalam SSK (Strategi Sanitasi Kota).
2. Penghitungan Kebutuhan

Area layanan dalam RISPAM dan SSK belum terinci.
3. Perencanaan dan Anggaran

Pagu anggaran belum sesuai dengan kebutuhan layanan, karena pagu bersifat dinamis.
4. Pelaksanaan

Layanan air bersih dan sanitasi dari pemerintah murni yang terbangun belum memenuhi target SPM adapun masih banyak yang di bantu oleh pelayanan Swasta.

#### 4.4. Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

##### 4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

Tabel 4.19

## Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

## 4.4.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 4.20

## Target Pencapaian Urusan Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2025
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2025

## 4.4.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

Tabel 4.21

## Realisasi Urusan Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga	Realisasi 2025	Keterangan
----	-----------------	---------------	----------------	----------------	------------

			Penanggung Jawab	Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	DP2CKTR	163	163	100%	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak <u>huni</u>  Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang rumahnya tidak layak huni karena bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	DP2CKTR	0	0	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang <u>layak huni</u>  Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten

Adapun Realisasi Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

**Tabel 4.22**

**Realisasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO	2,779,081,900	2,774,221,900	99.83 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4,860,000	0	0.00 %
	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340	3,255,000	0	0.00 %
	1 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	1,605,000	0	0%
	2 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1,650,000	0	0%
	2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348	1,605,000	0	0.00 %
	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1,605,000	0	0%
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			
	1. BTT Hidrometeorologi Kecamatan Tanggulangin	1,201,546,900	1,201,546,900	100.00 %
	2. RKB BTT Perubahan (Ponpes Al Khoziny)	1,572,675,000	1,572,675,000	100.00 %

**4.4.4. Alokasi Anggaran**

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian

SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah.

Tabel 4.23

## Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

No	MATA ANGGARAN		ANGGARAN
	KAB. SIDOARJO		2,779,081,900
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		4,860,000
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340	3,255,000
	1	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	1,605,000
	2	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1,650,000
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348	1,605,000
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1,605,000
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA		
	1.	BTT Hidrometeorologi Kecamatan Tanggulangin	1,201,546,900
	2.	RKB BTT Perubahan (Ponpes Al Khoziny)	1,572,675,000

## 4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain :

Tabel 4.24

## Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil	KET
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	6 PNS 2 PPPK PENUH WAKTU 3 PPPK PARUH WAKTU 9 THL 1 Konsultan Individu	DP2CKTR
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi pemerintah kabupaten	6 PNS 2 PPPK PENUH WAKTU 3 PPPK PARUH WAKTU 9 THL 1 Konsultan Individu	CP2CKTR

## 4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan

yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

1. Data rumah yang layak huni untuk korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan secara maksimal.
2. Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak dimiliki secara lengkap sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. (tidak ada atau tidak diinformasikan ke DP2CKTR Dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) di setiap proyek Relokasi untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pengalokasian anggarannya).

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat antara lain :

1. Mencukupi/melengkapi data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antar OPD;
2. Memasukan data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

#### **4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standarpelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

##### **4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

Tabel 4.25

**Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan  
Perlindungan Masyarakat**

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2	Pelayanan Informasi rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

#### 4.5.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 4.26

**Target Pencapaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan  
Perlindungan Masyarakat**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	2025
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2025
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2025
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Kabupaten memperoleh penyelamatan Evakuasi Kebakaran	Warga yang layanan dan korban	100%	2025

#### 4.5.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

**Tabel 4.27**

#### Realisasi Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase (%)Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Satuan Polisi Pamong Praja	50039	50039	100%	JumlahWarga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan <u>perkara</u> Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkena penegakan hukum Perda dan perkara
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%)Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1500	5385	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi <u>rawan bencana</u> Jumlah Warga Kabupaten di wilayah rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	330	659	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap <u>bencana</u> . Jumlah Warga Kabupaten di wilayah rawan bencana

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2046	2046	100%	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang) Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang)
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	235	237	100%	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dampak kebakaran Jumlah kejadian kebakaran dengan menggunakan skala kabupaten/kota yang seharusnya diselamatkan dan dievakuasi menggunakan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamat lengkap (Orang)

Adapun Realisasi Anggaran Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

**Tabel 4.28**  
**Realisasi Anggaran Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO	29,852,959,258	27,249,187,915	91.28 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	13,787,867,214	12,328,170,609	89.41 %
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444	10,685,917,889	9,785,164,072	91.57 %
1	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1,064,181,968	921,174,790	86.56 %

	2	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	63,860,000	42,450,000	66.47 %
	3	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	110,000,000	107,068,895	97.34 %
	4	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1,514,945,200	1,416,360,488	93.49 %
	5	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	7,932,930,721	7,298,109,899	92.00 %
JUMLAH INDIKATOR			10,685,917,889	9,785,164,072	91.57 %
2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455	2,993,103,325	2,443,170,761	81.63 %
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	888,810,000	770,014,000	86.63 %
	2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2,104,293,325	1,673,156,761	79.51 %
JUMLAH INDIKATOR			2,993,103,325	2,443,170,761	81.63 %
3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457	108,846,000	99,835,776	91.72 %
	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	108,846,000	99,835,776	91.72 %
JUMLAH INDIKATOR			108,846,000	99,835,776	91.72 %
JUMLAH PROGRAM			13,787,867,214	12,328,170,609	89.41 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)		2,819,022,705	2,092,738,868	74.24 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456	558,372,750	423,523,110	75.85 %
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	105,155,500	87,787,010	83.48 %
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	453,217,250	335,736,100	74.08 %
JUMLAH INDIKATOR			558,372,750	423,523,110	75.85 %
5		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443	1,240,773,775	1,001,810,362	80.74 %
	1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	336,413,375	280,900,700	83.50 %

	2	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	258,008,000	172,805,330	66.98 %
	3	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	139,449,400	136,530,000	97.91 %
	4	Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	226,605,000	168,086,200	74.18 %
	5	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	100,298,000	68,345,800	68.14 %
	6	Penyusunan rencana kontijensi	180,000,000	175,142,332	97.30 %
	JUMLAH INDIKATOR		1,240,773,775	1,001,810,362	80.74 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445	434,593,000	414,105,800	95.29 %
	1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	123,593,000	104,305,800	84.39 %
	2	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	311,000,000	309,800,000	99.61 %
	JUMLAH INDIKATOR		434,593,000	414,105,800	95.29 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446	585,283,180	253,299,596	43.28 %
	1	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	71,583,180	53,814,536	75.18 %
	2	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	513,700,000	199,485,060	38.83 %
	JUMLAH INDIKATOR		585,283,180	253,299,596	43.28 %
	JUMLAH PROGRAM		2,819,022,705	2,092,738,868	74.24 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)		13,246,069,339	12,828,278,438	96.85 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449	13,059,269,339	12,644,478,438	96.82 %
	1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	625,125,420	618,933,500	99.01 %
	2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	174,480,019	164,277,550	94.15 %
	3	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	5,588,536,400	5,542,223,336	99.17 %
	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6,671,127,500	6,319,044,052	94.72 %
	JUMLAH INDIKATOR		13,059,269,339	12,644,478,438	96.82 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459	186,800,000	183,800,000	98.39 %

	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	186,800,000	183,800,000	98.39 %
JUMLAH INDIKATOR			186,800,000	183,800,000	98.39 %
JUMLAH PROGRAM			13,246,069,339	12,828,278,438	96.85 %

#### 4.5.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah.

**Tabel 4.29**  
**Alokasi Anggaran Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

N o	MATA ANGGARAN	TARGET
	KAB. SIDOARJO	21,959,287,117
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	12,199,401,198
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2025444	10,691,333,139
1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	1,380,778,800
2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	7,438,658,450
3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	585,631,089
4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	125,620,560
5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	417,394,240
6	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	743,250,000
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2025455	1,388,768,859
1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	500,000,000

	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100,000,000
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	788,768,859
3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2025457	119,299,200
	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	119,299,200
2		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	1,989,217,012
4		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2025456	643,246,470
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	75,000,000
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	568,246,470
5		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K2025447	342,998,867
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	80,000,000
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	81,348,867
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	165,000,000
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16,650,000
6		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2025445	270,000,000
	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	270,000,000
7		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2025446	732,971,675
	1	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	732,971,675
3		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	7,770,668,907
8		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2025449	7,516,679,256
	1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	520,000,000
	2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	57,500,000
	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	446,917,546
	4	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	6,492,261,710
9		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2025459	253,989,651
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	177,102,832
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	76,886,819

#### 4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

**Tabel 4.30**  
**Dukungan Personil Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Personil
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	78 PNS 32 PPPK PENUH WAKTU 214 PPPK PARUH WAKTU 8 NON ASN
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	43 PNS, 29 PPPK 175 TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

#### 4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

a. Penegakan perda dan perkara

Banyak peraturan perda perkara yang belum ditegakkan dengan baik sehingga dirasa perlu untuk melakukan kegiatan mulai penyuluhan, pembinaan maupun penegakan hukum. Kasus dominan terkait dengan penegakan perda adalah pelanggaran izin

b. KRB Belum detail mendeskripsikan kejadian rawan bencana tiap desa atau kelurahan, sehingga belum bisa dihitung secara detail kebutuhan

barang dan biaya untuk pengantasan bencana baik di pra bencana maupun pasca bencana.

- c. Pola Layanan dan kesiapsiagaan bencana selama ini belum maksimal karena selalu mengandalkan tatap muka yang diundang oleh BPBD Kabupaten.
- d. Untuk mencapai target SPM 15 menit, Kabupaten Sidoarjo harus memiliki 36 Pos Damkar, sedangkan kondisi eksisting hanya memiliki 5 Pos Damkar, sehingga rasio antara sumber daya dengan target kinerja sangat jauh. Selain itu belum terbentuknya relawan kebakaran dan Satuan Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di desa/kelurahan juga menjadi salah satu faktor belum terpenuhinya target respon time. Penanganan kebakaran di Kabupaten Sidoarjo sementara masih mengandalkan aparatur dan sarana prasarana dr BPBD, sementara itu dengan jumlah kejadian kebakaran yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 menyebabkan rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran menurun.

Adapun solusi yang kami upayakan antara lain :

- a. Dokumen Teknis dari KRB agar disahkan dalam PERBUP atau SK Bupati, agar mudah di Reviu tiap tahun (KRB Per Desa/Kelurahan)
- b. Reviu Bencana tiap tahun hendaknya melibatkan dari pihak Desa dan Kecamatan dengan Hasil Reviu berbasis peta citra.
- c. Dokumen Teknis KRB (KRB perdesa kelurahan) harus detail menyajikan area yang rawan bencana per Desa/Kelurahan sehingga bisa dihitung perencanaan kebutuhan barang dan biaya penanganan Bencana (Pra dan Pasca) lebih detail.
- d. Posting/alokasi anggaran dan barang diserahkan kepada OPD masing2 yang menangani dibawah koordinasi BPBD seperti Dinsos, Dinkes, DP2CKTR.
- e. Membuat Group WA berjenjang mulai dari tingkat kabupaten dan kecamatan, WA group Desa dan WA Group RT.
- f. BPBD Menyiapkan materi layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana seperti mitigasi bencana dan bagaimana penanganann bencana (Pra dan Pasca) Berupa video animasi dan paparan.
- g. Mengadakan pelatihan perwakilan dari satgas bencana tiap desa/kelurahan yang dibagi perkecamatan.

#### 4.6. Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

##### 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM di bidang Urusan Sosial antara lain :

**Tabel 4.31**

##### Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana

##### 4.6.2. Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

**Tabel 4.32**

##### Target Pencapaian Urusan Sosial

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2025
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2025
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	2025
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	100%	2025

#### 4.6.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

**Tabel 4.33**  
**Realisasi Urusan Sosial**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Penyebut	Pembilang	Nilai	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	Dinas Sosial	3805	7533	100%	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti Jumlah keseluruhan warga kabupaten penyandang disabilitas diluar panti
2	Rehabilitasi social dasar anak telantar diluar Panti	Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar	DinasSosia	1681	1681	100%	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Penyebut	Pembilang	Nilai	
		panti					Jumlah keseluruhan anak terlantar diluar panti
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantardiluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial	75804	75804	100%	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh <u>Rehabilitasi sosial diluar panti</u> JumlahWarga Kabupaten lanjut usia terlantar diluar panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	Dinas Sosial	80	80	100 %	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar <u>panti</u> Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis diluar panti
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	Dinas Sosial	12155	12155	100 %	Jumlah korban bencana yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan <u>pasca</u> Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca

Adapun Realisasi Anggaran Bidang Urusan Sosial antara lain:

**Tabel 4.34**

**Realisasi Anggaran Urusan Sosial**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO		12,849,988,235	12,039,252,007	93.69 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		11,055,218,235	10,256,462,807	92.77 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152	10,705,218,235	10,066,999,107	94.04 %
		1 Penyediaan permakanan	8,307,158,622	7,982,754,756	0%
		2 Penyediaan sandang	94,778,460	84,004,800	0%

	3	Penyediaan alat bantu	661,698,640	574,469,100	0%
	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	554,441,995	547,906,400	0%
	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	124,963,640	51,170,850	0%
	10	Pemberian layanan kedaruratan	962,176,878	826,693,201	0%
2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153	350,000,000	189,463,700	54.13 %
	1	Penyediaan makanan	350,000,000	189,463,700	54.13 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA				
	1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota - Belanja Natura dan Pakan dari BTT	1,794,770,000	1,782,789,200	99.33 %

#### 4.6.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah.

**Tabel 4.35**  
**Alokasi Anggaran Urusan Sosial**

No	MATA ANGGARAN		ANGGARAN
	KAB. SIDOARJO		8,312,813,555
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		8,312,813,555
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2025152	8,256,813,555
		1 Penyediaan permakanan	7,048,825,600
		2 Penyediaan sandang	14,459,322
		3 Penyediaan alat bantu	100,815,000
		4 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social	191,075,000
		5 Pemberian layanan data dan pengaduan	121,595,538
		6 Pemberian layanan kedaruratan	780,043,095
	JUMLAH INDIKATOR		8,256,813,555
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2025153	56,000,000
		1 Penyediaan makanan	48,000,000
		2 Penanganan khusus bagi kelompok	8,000,000

rentan

#### 4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Sosial antara lain :

**Tabel 4.36**

#### **Dukungan Personil Urusan Sosial**

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Dukungan Personil
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar di luar Panti	17 PNS 5 PPPK PENUH WAKTU 48 PPPK PARUH WAKTU 121 SRLT 15 TKSK 39 TAGANA 114 PKH 8 PENDAMPING REHSOS 11 TENAGA OUTSOURCHING
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar Panti	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	
6.	Penyediaan sarana dan Prasarana sosial	

#### 4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial antara lain: Target yang dilayani pada SPM bencana disesuaikan dengan bantuan yang tersalurkan sampai dengan 31 Desember 2025 sehingga menjadi capaian 100% karena sifatnya yang insidental, dan sampai dengan selesainya Tahun Anggaran 2025 tercatat masih terdapat persediaan sembako (anggaran DPA Dinsos sebanyak 1072 sembako) untuk bencana yang akan disalurkan apabila terjadi bencana dan terdapat laporan atau permintaan yang diterima.

#### 4.7. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah), Lintas SKPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan dinas lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spasial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan atau program lintas dinas.

### **Program SKPD**

Program SKPD ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program-program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program SKPD ini lebih mudah khususnya didalam pengorganisasiannya. Dalam arti mengingat program SKPD hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

### **Program Lintas SKPD**

Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas SKPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapanprogram. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan. Program lintas SKPD ini diperlukan, karena pada beberapa permasalahan memang urusan SKPD yang terkait. Tidak hanya dalam hal program, tapi juga dalam hal lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Contohnya seperti program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Dimana program lintas SKPD ini membutuhkan koordinasi dari beberapa Dinas terkait seperti Disporabudpar dan Dinsosnaker Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu Dinas, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas SKPD. Untuk aspek perwilayahan, program – program lintas sektoral (lintas SKPD) akan lebih bermanfaat dari pada program – program SKPD. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.

Adapun program kegiatan per bidang Urusan yang dilakukan antara lain :

## 4.7.1. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 4.37

## Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
-1	-2	-3	-4
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
		4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan
		5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
		11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		15	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		18	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
		19	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		21	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA		
	1.	4 2025 Pengeloaan dana BOP PAUD 1202333	
	2.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD 1202344	

3.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dasar 1202354
4.	4 2025 Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa sekolah dasar 1202360
5.	4 2025 Pengelolaan dana BOS sekolah dasar 1202371
6.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar 1202373
7.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dasar 1202380
8.	4 2025 Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa sekolah menengah pertama 1202386
9.	4 2025 Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama 1202392
10.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama 1202398
11.	4 2025 Sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan sekolah menengah pertama 1202403
12.	4 2025 Penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan 1202408
13.	4 2025 Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan 1202410
14.	4 2025 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan 1202414
15.	4 2025 Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan 1202419
16.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP nonformal/kesetaraan 1202422
17.	4 2025 Koordinasi, perencanaanm supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan 1202432
18.	4 2025 Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik nonformal/kesetaraan 1202436
19.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas pendidikan nonformal 1202440

#### 4.7.2. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan

Tabel 4.38

#### Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan

PROG RAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
KAB. SIDOARJO		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2024237	
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita

	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

#### 4.7.3. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 4.39

##### Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	KAB. SIDOARJO	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638
	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM
	2	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	4	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
	2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA		
	1.	Perluasan Jaringan Pipa Distribusi	
	2.	Biaya Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan BJP PDAM	
	3.	Operasional BBM Kendaraan Tangki BJP PDAM	
	4.	Pembangunan Sanitasi oleh Kelompok SANIMAS	

#### 4.7.4. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 4.40

##### Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	KAB. SIDOARJO		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340	
	1	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	
	2	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348	
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA		
	1.	BTT Hidrometeorologi Kecamatan Tanggulangin	
	2.	RKB BTT Perubahan (Ponpes Al Khoziny)	

#### 4.7.5. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 4.41

##### Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	KAB. SIDOARJO		
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)		
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2025444	
	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	
	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	

		3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
		4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
		6	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
	2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2025455
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2025457
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
	2		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)
		4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2025456
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
	5		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K2025447
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	6		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2025445
		1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
	7		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2025446
		1	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota
	3		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)
		8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2025449

		1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
		2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		4	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
	9		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2025459
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

#### 4.7.6. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial

Tabel 4.42

#### Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
KAB. SIDOARJO		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2024152	
	1	Penyediaan permakanan
	2	Penyediaan sandang
	3	Penyediaan alat bantu
	4	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
	5	Pemberian layanan data dan pengaduan
	6	Pemberian layanan kedaruratan
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2024153	
	1	Penyediaan makanan
	2	Penanganan khusus bagi kelompok rentan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan Penyusunan Capaian LPPD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait di dalam LPPD telah dijalankan oleh Perangkat Daerah secara konsisten dan efektif.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dapat dipakai sebagai salah satu dasar dalam penetapan pembangunan pemerintah daerah sehingga program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025. Semoga di tahun-tahun mendatang, semua upaya dan perjuangan kita senantiasa mendapatkan hasil yang baik dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Sidoarjo.

**DAFTAR TABEL**

<b>TABEL</b>	<b>JUDUL TABEL</b>	<b>HAL</b>
1.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2025	3
1.2	Desa dan Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025	4
1.3	Suhu dan Kelembapan per Bulan di Tahun 2025	6
1.4	Kecepatan Angin dan Tekanan Udara per Bulan di Tahun 2025	6
1.5	Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari per Bulan di Tahun 2025	7
1.6	Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2025	8
1.7	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025	9
1.8	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2025	10
1.9	Jumlah Pegawai Negari Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025	11
1.10	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020-2025	14
1.11	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	14
1.12	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	15
1.13	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	15
1.14	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	16
1.15	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	16
1.16	Target dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	16
1.17	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten	17

	Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	
1.18	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021-2025	19
1.19	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	19
1.20	Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	20
1.21	Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	20
1.22	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	21
1.23	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	21
1.24	Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo	26
1-25	Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	27
1-26	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	30
1-27	Prioritas dan Arah Kebijakan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025	34
1-28	Pagu Anggaran Paket Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025	35
2.1	Capaian Kinerja Makro	47
2.2	Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo	48
2.3	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025	77
2.4	Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	79
2.5	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025	80
2.6	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo	83
2.7	Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025	86
2.8	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Nilai SAKIP Tahun 2024-2025	87
2.9	Hasil Opini atas Audit BPK	89
2.10	Tren Capaian Kapabilitas APIP	90

2.11	Tren Capaian Kapabilitas APIP	91
2.12	Hasil EKPKD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2025	91
2.13	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025	93
2.14	Capaian Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025	95
2.15	Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025	95
2.16	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025	96
2.17	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025	96
2.18	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Berdasarkan Perangkat Daerah	97
2.19	Capaian Program 100.000 Lapangan Kerja Baru Tahun 2021-2025	102
2.20	Capaian Program BPJS Kesehatan Gratis Tahun 2021-2025	104
2.21	Gratis Makan Tiap Hari Warga Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025	105
2.22	Capaian Pelaksanaan 10.000 Beasiswa Kuliah Sampai dengan Tahun 2025	106
2.23	Realisasi Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025	108
2.24	Realisasi Program Prioritas Rp.5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan	109
2.25	Insentif RT/RW di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025	110
2.26	20.000 UMKM Naik Kelas Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025	110
2.27	Pembebasan Lahan Frontage Tahun 2021-2025	114
2.28	Rincian Pembangunan Tahun 2021-2025	114
2.29	Rincian Pembangunan Betonisasi Jalan Tahun 2021-2025	114
2.30	Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu Tahun 2021-2025	120
2.31	Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta dan Tenaga Honorer Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025	121
2.32	Kegiatan Program Prioritas Youth Center, Bangun Pusat	122

	Kreativitas Anak Muda	
2.33	2.000 Warung Rakyat Direnovasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2025	123
2.34	Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025	124
2.35	Capaian Pelayanan Call Center 112 Sidoarjo Sampai dengan Tahun 2025	125
2.36	Program Prioritas Reformasi Perizinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025	126
2.37	Target Tahun 2024	126
2.38	Realisasi Tahun 2024	126
2.39	Target Tahun 2025	127
2.40	Realisasi Tahun 2025	127
2.41	Realisasi Program Unggulan Tahun 2025	129
4.1	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	134
4.2	Target Pencapaian Urusan Pendidikan	134
4.3	Realisasi Urusan Pendidikan	135
4.4	Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pendidikan	136
4.5	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan	138
4.6	Dukungan Personil Urusan Pendidikan	140
4.7	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	142
4.8	Target Pencapaian Urusan Kesehatan	142
4.9	Realisasi Urusan Kesehatan	144
4.10	Realisasi Anggaran Bidang Urusan Kesehatan	146
4.11	Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan	147
4.12	Dukungan Personil Urusan Kesehatan	148
4.13	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	149
4.14	Target Pencapaian Urusan Pekerjaan Umum	149
4.15	Realisasi Urusan Pekerjaan Umum	150
4.16	Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum	150
4.17	Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum	151
4.18	Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum	152
4.19	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat	154
4.20	Target Pencapaian Urusan Perumahan Rakyat	154

4.21	Realisasi Urusan Perumahan Rakyat	154
4.22	Realisasi Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat	155
4.23	Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat	156
4.24	Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat	156
4.25	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	158
4.26	Target Pencapaian Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	158
4.27	Realisasi Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	159
4.28	Realisasi Anggaran Bidang Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	160
4.29	Alokasi Anggaran Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	163
4.30	Dukungan Personil Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	165
4.31	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial	167
4.32	Target Pencapaian Urusan Sosial	167
4.33	Realisasi Urusan Sosial	168
4.34	Realisasi Anggaran Bidang Urusan Sosial	169
4.35	Alokasi Anggaran Urusan Sosial	170
4.36	Dukungan Personil Urusan Sosial	171
4.37	Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan	173
4.38	Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan	174
4.39	Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	175
4.40	Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat	176
4.41	Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	176
4.42	Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial	178

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HAL
1.1	Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo	5

**DAFTAR GRAFIK**

GRAFIK	JUDUL GRAFIK	HAL
1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo	7
1.2	Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo Semester I Tahun 2025	8
1.3	Proporsi Penduduk Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin Semester I Tahun 2025	9
1.4	Target dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020-2025	14
1.5	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo	19
2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2024	48
2.2	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo	50
2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo	51
2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo dibanding Provinsi dan Nasional	52
2.5	Pertumbuhan Ekonomi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	52
2.6	Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo	55
2.7	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025	87
2.8	Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024	93
2.9	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025	94
2.10	Program Prioritas 100.000 Lapangan Kerja Baru Tahun 2021-2025	102
2.11	Capaian Pelaksanaan Program Prioritas 100.000 Lapangan Kerja Baru Sampai dengan Tahun 2025	103
2.12	Program BPJS Kesehatan Gratis Tahun 2021-2025	104
2.13	Pemberian Beasiswa	107
2.14	Realisasi Pemberian Beasiswa Sampai dengan Tahun 2025	107
2.15	Jumlah Penerima Program KURMA	109
2.16	Target dan Realisasi 20.000 UMKM Naik Kelas Kabupaten Sidoarjo	111

2.17	2.000 Warung Rakyat Direnovasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2025	123
------	---	-----